

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Subjek Penelitian

4.1.1. Profil Media *Online* MediaIndonesia.com



MediaIndonesia.com merupakan platform digital dari harian *Media Indonesia*, salah satu surat kabar nasional tertua dan berpengaruh di Indonesia. Media Indonesia pertama kali terbit pada 19 Januari 1970 dalam format mingguan dengan empat halaman. Pada masa awal, surat kabar ini didirikan oleh Teuku Yousli Syah dan terus berkembang hingga akhirnya menjalin kemitraan strategis dengan Surya Paloh pada tahun 1988. Kemitraan ini memperkuat struktur manajemen Media Indonesia melalui pembentukan PT Citra Media Nusa Purnama, yang kemudian membawa perubahan besar terhadap desain, konten, dan arah redaksional media tersebut. Pada 1995, kantor redaksi dipindahkan ke Gedung Media Group di Kedoya, Jakarta Barat, menandai era baru profesionalisasi dan ekspansi bisnis media (Simanungkalit, 2018).

Sebagai bagian dari transformasi menuju era digital, Media Indonesia meluncurkan MediaIndonesia.com untuk menjangkau pembaca daring yang terus bertumbuh. Kehadiran portal berita ini merupakan bagian dari strategi Media Group dalam menghadapi perubahan perilaku konsumsi informasi di era internet. MediaIndonesia.com menyajikan beragam rubrik, termasuk politik, ekonomi, hukum, sosial, serta opini dan editorial yang menjadi ciri khasnya. Gaya pemberitaan Media Indonesia dikenal tegas, faktual, dan berorientasi pada kepentingan nasional, yang tercermin dalam motto redaksionalnya: “Lugas, Tegas, Terpercaya”, dan kini lebih dikenal dengan semboyan “Referensi Bangsa”.

Dalam struktur kepemilikannya, MediaIndonesia.com berada di bawah naungan Media Group konglomerasi media yang juga mengelola MetroTV, Lampung Post, dan sejumlah media regional lainnya. Surya Paloh sebagai pendiri dan tokoh sentral Media Group, menjadikan Media Indonesia sebagai corong jurnalisme yang berimbang, namun tetap memiliki identitas kuat terhadap isu-isu kebangsaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fajriani & Fachrurrozie (2020), MediaIndonesia.com disebut sebagai media yang konsisten mengedepankan sudut pandang institusional, yakni banyak mengutip pejabat negara dan narasumber resmi sebagai dasar validitas beritanya.

Dalam perkembangannya selama delapan tahun terakhir, MediaIndonesia.com aktif berinovasi dalam digitalisasi kontennya. Mereka menyediakan layanan e-paper, rubrik interaktif seperti konsultasi hukum, serta memanfaatkan platform multimedia untuk memperluas jangkauan audiens. Menurut Juwita & Astuti (2019), media ini cenderung mempertahankan gaya konvensional dalam struktur berita, tetapi tetap adaptif terhadap perkembangan digital dengan menghadirkan pemberitaan yang cepat, dapat dipercaya, dan mudah diakses.

Karakter pembacanya sebagian besar berasal dari kalangan profesional, manajer, birokrat, dan pembuat kebijakan, terutama di wilayah Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya. Segmentasi ini turut memengaruhi gaya dan pilihan narasi dalam setiap pemberitaannya, termasuk dalam kasus-kasus besar seperti korupsi. Dalam konteks penelitian ini, MediaIndonesia.com menjadi penting untuk dianalisis karena gayanya yang informatif dan berorientasi pada penyampaian fakta hukum secara sistematis, menjadikannya sebagai bahan pembanding yang kontras dengan media lain yang mungkin lebih naratif atau investigatif.

4.1.2. Profil Media *Online* Kompas.com



Gambar 4.2. Logo Kompas.com (Website Resmi Kompas.com, 2025)

Kompas.com adalah salah satu portal berita daring tertua dan paling berpengaruh di Indonesia. Diluncurkan pada 14 September 1995 dengan nama *Kompas Online*, awalnya berfungsi sebagai replika harian cetak Kompas untuk menjangkau pembaca di wilayah terpencil dan luar negeri. Pada awal 1996, domainnya berubah menjadi *kompas.com* seiring meningkatnya antusiasme pembaca daring. Kemudian pada 6 Agustus 1998, *Kompas Online* resmi menjadi unit bisnis independen di bawah PT Kompas Cyber Media (KCM), dan semakin bertransformasi sejak rebranding pada 29 Mei 2008 menjadi Kompas.com dengan identitas visual, kanal berita, dan kedalaman liputan yang diperluas (Kompas.com). Visi redaksi Kompas.com terlihat dari tagline “Jernih Melihat Dunia”, yang menekankan verifikasi, objektivitas, dan tanggung jawab jurnalistik. Mottos ini merefleksikan filosofi redaksional bahwa "get it first, but first get it right"—mengutamakan kecepatan tanpa mengorbankan akurasi. Portal ini menyediakan berbagai format konten, mulai dari berita cepat (hard news), reportase mendalam (feature dan long-form), hingga multimedia interaktif seperti Visual Interaktif Kompas (VIK) (Kompas.com).

Dalam aspek bisnis, Kompas.com juga telah berkembang menjadi platform yang ramah pengguna (user-friendly) dan mendukung pengiklan (advertiser-friendly) lewat desain yang bersih, navigasi yang intuitif, dan kanal tematik seperti Health, Otomotif, Hype, dan Food. Penelitian oleh Rofifah (2020) mengonfirmasi bahwa strategi ini terbukti efektif dalam mempertahankan loyalitas pembaca dan memperluas segmen konsumen, termasuk generasi milenial.

Kompas.com kini berada di bawah PT Kompas Cyber Media, bagian dari

KG Media —unit digital terbaru dari Kompas Gramedia— namun tetap mempertahankan tim redaksi yang terpisah dari versi cetak. Situs ini mencatat puluhan juta pengguna aktif bulanan, dan menjadi salah satu portal berita terbesar kedua di Indonesia setelah Detik.com. Karakter audiennya umumnya adalah profesional, eksekutif, dan pembuat kebijakan urban yang mengutamakan kecepatan dan kedalaman berita.

4.1.3. Sidang Vonis Kasus Korupsi Harvey Moeis

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana media *online* membongkar kasus vonis korupsi Harvey Moeis melalui pendekatan analisis *framing* model Pan & Kosicki. Objek penelitian ini adalah pemberitaan terkait vonis kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis dalam tata niaga timah di PT Timah Tbk, sebagaimana dimuat dalam dua media daring yaitu Kompas.com dan MediaIndonesia.com, selama periode Desember 2024 hingga Februari 2025.

Kasus ini mencuat karena besarnya kerugian negara yang ditimbulkan, mencapai lebih dari Rp 271 triliun menurut perhitungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta kerusakan lingkungan yang sangat parah akibat aktivitas penambangan timah ilegal yang berlangsung selama bertahun-tahun di wilayah Bangka Belitung. Aktivitas ini menyebabkan kerusakan ekosistem hutan mangrove, terumbu karang, serta pencemaran lahan dan air yang berdampak pada kehidupan masyarakat lokal (Kompas, 2025).

Harvey Moeis, seorang pengusaha yang dikenal luas publik sebagai suami dari aktris Sandra Dewi, menjadi sorotan karena posisinya sebagai perantara dan penghubung antara PT Refined Bangka Tin (RBT) dengan mantan Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani. Dalam skema tersebut, Harvey diduga aktif melobi pemilik smelter agar menyisihkan keuntungan dari kerja sama ilegal untuk dibagikan dalam bentuk dana CSR fiktif. Dana tersebut disalurkan melalui perusahaan bernama PT Quantum Skyline Exchange, yang diduga digunakan untuk menyamarkan aliran dana hasil kejahatan (Kompas, 2025).

Pada Desember 2024, Harvey Moeis dijatuhi vonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, dengan tambahan 6 bulan kurungan jika denda tidak dibayar.

Vonis tersebut menuai kontroversi publik karena dinilai terlalu ringan dibandingkan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), lebih dari 70% responden menilai vonis tersebut tidak setimpal (Katadata, 2025).

Tak puas dengan vonis tersebut, Kejaksaan Agung mengajukan banding. Hasilnya, pada Februari 2025, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara dan denda tetap sebesar Rp1 miliar, dengan tambahan 8 bulan kurungan jika tidak dibayar. Majelis hakim menyatakan bahwa Harvey memiliki peran kunci dalam tindak pidana ini dan menyebutnya sebagai otak di balik kolusi dan pengelolaan dana ilegal yang merugikan negara secara masif (Kompas.com, 2025).

Pemilihan Kompas.com dan MediaIndonesia.com sebagai objek kajian bukan tanpa alasan. Peneliti telah mencari dari berbagai macam media berita *online* yang mengandung tulisan “Sidang Vonis Harvey Moeis” lalu hasilnya tertera bahwa media Kompas.com dan MediaIndonesia.com merupakan media yang memiliki berita terbanyak dan terminim yang mencapai ketentuan dari penelitian ini.

4.2. Hasil dan Pembahasan

4.2.1. Analisis Berita 1 Kompas.com

Judul : Vonis Harvey Moeis Dinilai Penuhi Validitas meskipun Dikritik Ringan dan Tak adil

Sumber : Kompas.com Tanggal : 27 Desember 2024

Ringkasan : Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi tata niaga komoditas timah dengan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun, dijatuhi vonis 6,5 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 210 miliar. Vonis ini menuai kritik karena dianggap terlalu ringan, salah satunya dari Mahfud MD yang mempertanyakan keadilan putusan tersebut. Meski demikian, Guru Besar Hukum Pidana UI, Topo Santoso, menyatakan bahwa vonis itu valid secara normatif karena sesuai dengan rentang pidana dalam

UU Tipikor. Topo juga menjelaskan bahwa jumlah uang pengganti dihitung dari jumlah yang diambil terdakwa, bukan keseluruhan kerugian negara. Mahfud menilai bahwa vonis ini tidak mencerminkan rasa keadilan publik, terutama karena jumlah vonis keuangan yang dijatuhkan hanya sekitar 0,007% dari total kerugian negara.

Tabel 4.1. Analisis Berita 1 Kompas.com

Struktur Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	Headline	Vonis Harvey Moeis Dinilai Penuhi Validitas meskipun Dikritik Ringan dan Tak Adil
	Lead	Vonis ringan yang diterima Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi tata niaga komoditas Timah, dianggap sudah memenuhi validitasnya.
	Latar Berita	Berita dari Kompas.com (27 Desember 2024) membahas putusan pengadilan terhadap Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun, menuai sorotan publik karena dianggap terlalu ringan. Harvey dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 210 miliar. Vonis ini mengundang reaksi dari sejumlah tokoh, termasuk Mahfud MD, yang mempertanyakan keadilan dalam putusan tersebut. Di sisi lain, pakar hukum pidana seperti Topo Santoso menyatakan bahwa secara normatif vonis tersebut tetap memenuhi unsur legalitas sesuai Undang-Undang Tipikor.
	Kutipan Sumber	Topo Santoso (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia) <ol style="list-style-type: none"> 1. "Dilihat secara normatif, putusan itu memenuhi validitasnya, sebab itu sesuai dengan minimal dan maksimal ancaman pidana dalam UU Tipikor." 2. "Sangat wajar dan bisa dipahami keberatan dari Prof Mahfud MD, yang menyatakan putusan itu terlampau kecil. Itu kita lihat dari sisi <i>soundness/virtue</i> (keadilan, kewajaran, kebajikan). Masyarakat berbeda-beda pandangannya." 3. "(Sedangkan) kalau denda tidak dikaitkan dengan berapa keuangan negara yang diambil terdakwa. Denda sudah ada batasan minimal dan maksimalnya seperti pidana penjara." 4. Mahfud MD (Mantan Menko Polhukam, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) 5. "Di mana keadilan?" 6. "Selain hukuman penjaranya ringan, yang menyesakkan adalah dari dakwaan merugikan keuangan negara Rp 300 triliun, tapi jatuh vonisnya hanya Rp 211 miliar (denda dan uang pengganti), atau sekitar 0,007 persen saja dari dakwaan kerugian keuangan negara."

	Pernyataan Opini	Pernyataan :
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahfud MD mempertanyakan keadilan atas vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, dengan menyatakan, “Di mana keadilan?” 2. Mahfud menilai bahwa hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Harvey tergolong ringan dan tidak setimpal dengan kerugian negara yang besar. Ia menyebut bahwa hanya sekitar 0,007 persen dari kerugian negara yang dikembalikan melalui denda dan uang pengganti. 3. Mahfud menyatakan bahwa yang paling menyesakkan adalah perbedaan besar antara angka dakwaan kerugian negara Rp 300 triliun dan total vonis keuangan yang dijatuhkan, yaitu hanya Rp 211 miliar. 4. Topo Santoso menyatakan bahwa keberatan Mahfud MD terhadap putusan hakim sangat wajar dan bisa dipahami karena dilihat dari sisi keadilan, kewajaran, dan kebajikan. 5. Topo juga menyampaikan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap vonis semacam ini, tergantung dari nilai-nilai yang mereka anut.
	Penutup	“Selain hukuman penjaranya ringan, yang menyesakkan adalah dari dakwaan merugikan keuangan negara Rp 300 triliun, tapi jatuh vonisnya hanya Rp 211 miliar (denda dan uang pengganti), atau sekitar 0,007 persen saja dari dakwaan kerugian keuangan negara.” (27/12/2024)
Scrip	<i>What</i>	Vonis ringan terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi tata niaga Timah yang merugikan negara Rp 300 triliun.
	<i>Who</i>	Harvey Moeis sebagai terdakwa; Mahfud MD dan Prof. Topo Santoso sebagai pemberi komentar.
	<i>When</i>	Putusan dibacakan pada Desember 2024; tanggapan Mahfud dipublikasikan pada 26-27 Desember 2024.
	<i>Where</i>	Jakarta, di lingkungan peradilan tindak pidana korupsi.
	<i>Why</i>	Karena vonis yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan dibandingkan besarnya kerugian negara, memicu pertanyaan soal keadilan.
	How	Harvey Moeis 6,5 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang denda pengganti Rp 210 miliar; Mahfud MD dan Topo Santoso memberikan pandangan hukum dan moral atas putusan tersebut.
Tematik	Paragraph, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat,	Struktur tematik yang dimulai dengan paragraf pembuka yang menginformasikan bahwa vonis terhadap Harvey Moeis dianggap ringan, meskipun kasusnya menyebabkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun. Paragraf ini langsung menyampaikan fakta vonis: 6,5 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 210 miliar, yang memicu kritik publik. Paragraf-paragraf selanjutnya berisi penjelasan hukum dan tanggapan tokoh, seperti komentar Guru Besar Hukum Pidana UI, Prof. Topo Santoso, yang menyatakan bahwa vonis tersebut tetap sah secara hukum karena sesuai

Retoris	Kata, gambar/foto, metafora	idiom, grafik, Gambar yang digunakan adalah foto sosok Harvey Moeis menggunakan rompi pink dan masker hitam sedang berjalan menghadap ke arah depan dan dikelilingi oleh polisi yang menjaga di bagian belakangnya. Tidak terdapat kata istilah, idiom atau grafik yang di tampilan pada berita tersebut.
---------	-----------------------------	---

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Berita "Vonis Harvey Moeis Dinilai Penuhi Validitas meskipun Dikritik Ringan dan Tak Adil" dimulai dengan *Headline* yang menyoroti vonis yang diterima oleh Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah yang dinilai ringan oleh sejumlah pihak, namun sah secara hukum. *Lead* berita menyampaikan bahwa meskipun vonis tersebut dianggap memenuhi validitas, vonis yang dijatuhkan terhadap Harvey Moeis dianggap terlalu ringan oleh beberapa tokoh publik, termasuk Mahfud MD. Latar berita menjelaskan konteks kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 300 triliun, namun hukuman yang dijatuhkan hanya Rp 211 miliar dalam bentuk denda dan uang pengganti. Kutipan dari Mahfud MD dan Topo Santoso mempertegas dua pandangan yang berbeda mengenai vonis tersebut. Mahfud MD mengkritik vonis yang dianggap tidak adil, sementara Topo Santoso menilai vonis tersebut sah menurut hukum. Pernyataan atau opini disampaikan untuk menyoroti ketidakpuasan terhadap keputusan hukum dan ketidaksesuaian antara kerugian negara dengan hukuman yang dijatuhkan. Penutup berita menekankan pentingnya untuk memastikan hukuman yang

adil dan setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan dalam kasus-kasus korupsi besar. Struktur ini menyusun berita dengan cara yang terorganisir, menghubungkan berbagai elemen untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perdebatan publik tentang keputusan hukum tersebut.

2. Struktur Skrip

Berita "Vonis Harvey Moeis Dinilai Penuhi Validitas meskipun Dikritik Ringan dan Tak Adil" di Kompas.com mengangkat isu tentang vonis ringan yang diterima Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah. Apa (*What*) yang menjadi inti dari berita ini adalah bahwa meskipun vonis yang dijatuhkan dianggap memenuhi validitasnya, banyak pihak yang menganggapnya terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun. Siapa (*Who*) yang terlibat adalah Harvey Moeis sebagai terdakwa, Mahfud MD (Mantan Menko Polhukam), Topo Santoso (Guru Besar Hukum Pidana UI), serta pihak-pihak yang mengkritik dan mendukung keputusan tersebut. Kapan (*When*), isu ini muncul setelah vonis dijatuhkan pada Desember 2024, dan mendapatkan perhatian publik dalam beberapa hari setelahnya. Di mana (*Where*), pemberitaan ini terkait dengan peristiwa yang terjadi di Jakarta, Indonesia, dan menyentuh perdebatan di tingkat nasional mengenai keadilan hukum. Mengapa (*Why*), vonis yang dianggap ringan memicu kritik karena tidak sesuai dengan kerugian besar yang ditimbulkan dalam kasus korupsi ini, yang mengundang pertanyaan mengenai keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Bagaimana (*How*), berita ini menyajikan perdebatan antara dua pandangan yang berbeda—satu yang membela keputusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan satu lagi yang mengkritik karena dianggap tidak adil dan tidak sebanding dengan kerugian negara. Berita ini menekankan perlunya perhatian lebih dalam pemberian hukuman yang setimpal dengan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana besar seperti korupsi.

3. Struktur Tematik

Berita "Vonis Harvey Moeis Dinilai Penuhi Validitas meskipun Dikritik

Ringan dan Tak Adil" disusun dengan struktur tematik yang jelas. Paragraf pertama memperkenalkan isu utama tentang vonis yang diterima oleh Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah, yang dianggap ringan meskipun sudah memenuhi validitas hukum. Berita ini menyatakan bahwa meskipun vonis tersebut sah secara hukum, banyak pihak yang mengkritik karena dianggap tidak setimpal dengan kerugian negara yang besar, yakni Rp 300 triliun. Setiap kalimat dalam berita ini saling terhubung secara logis, dimulai dengan pengenalan kasus, diikuti dengan kutipan dari Mahfud MD yang mempertanyakan keadilan vonis tersebut, serta pandangan dari Topo Santoso yang membela keputusan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Semua elemen ini membangun argumen bahwa meskipun vonis tersebut sah, ada ketidakpuasan sosial terhadap keputusan hukum tersebut, dan menekankan pentingnya keadilan dalam memberikan hukuman yang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan.

4. Struktur Retoris

Gambar yang digunakan menunjukkan Harvey Moeis mengenakan rompi pink dan masker hitam, berjalan di bawah pengamanan ketat oleh polisi yang menjaga di belakangnya. Rompi pink menandakan bahwa dia berada dalam tahanan, sementara masker hitam menunjukkan upaya untuk menyembunyikan identitas. Gambar ini menggambarkan situasi hukum yang sedang berjalan tanpa adanya penambahan istilah, idiom, atau elemen grafis lain yang memberikan interpretasi tambahan.

4.2.2. Analisis Berita 2 Kompas.com

Judul : Vonis Ringan Harvey Moeis: “Perang-perangan” Lawan Koruptor

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 24 Desember 2024

Ringkasan : Berita ini mengangkat kritik terhadap vonis ringan yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah yang

merugikan negara sebesar Rp 300 triliun. Meskipun vonis 6 tahun dan 6 bulan penjara dianggap memenuhi syarat hukum, banyak pihak yang merasa bahwa hukuman tersebut terlalu ringan mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan. Berita ini menyoroti ketidakpuasan publik terhadap sistem peradilan Indonesia yang dianggap tidak tegas dalam menangani kasus korupsi besar. Penulis mengkritik pertimbangan faktor-faktor meringankan seperti sikap sopan Harvey di pengadilan dan tanggungan keluarga, yang dianggap tidak sebanding dengan dampak sosial dan ekonomi dari korupsi yang dilakukan. Artikel ini juga membandingkan kasus ini dengan vonis yang lebih berat terhadap Setya Novanto, menunjukkan ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Pada akhirnya, berita ini mengajak untuk konsistensi dalam penegakan hukum yang tegas terhadap koruptor, agar dapat membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Tabel 4.2. Analisis Berita 2 Kompas.com

Struktur Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline</i>	Vonis Ringan Harvey Moeis: "Perang-perangan" Lawan Koruptor?
	<i>Lead</i>	"KEADILAN tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus dirasakan." Pepatah ini mencerminkan esensi dari penegakan hukum yang diharapkan oleh masyarakat, terutama dalam konteks korupsi timah
	Latar Berita	Harvey Moeis yang mencoreng wajah keadilan. Berita dari Kompas.com (24/12/2024) "Vonis Ringan Harvey Moeis: 'Perang-perangan' Lawan Koruptor?" yang diterbitkan pada 24 Desember 2024. Artikel ini mengkritik vonis ringan yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Vonis 6 tahun 6 bulan penjara dinilai tidak sebanding dengan kerugian besar yang ditimbulkan, dan dianggap melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Berita ini mempertanyakan keadilan dari putusan tersebut, menyebutkan bahwa faktor-faktor meringankan seperti sikap sopan di persidangan tidak dapat membenarkan hukuman yang ringan dalam kasus yang melibatkan kerugian negara sebesar itu. Selain itu, perbandingan dengan vonis Setya Novanto menyoroti inkonsistensi dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana kasus dengan kerugian yang lebih kecil dijatuhi hukuman yang jauh lebih berat. Berita ini menyarankan agar hukuman yang diberikan sebanding dengan dampak sosial dan ekonomi dari tindakan korupsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
	Kutipan Sumber	Kutipan langsung "Vonis ringan yang diterima Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi tata niaga komoditas timah, dianggap sudah memenuhi validitasnya. Dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 300 triliun itu, Harvey telah divonis 6,5 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 210 miliar." Kutipan ini menyampaikan bahwa vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dianggap sah

		secara hukum meskipun menuai kritik karena dianggap terlalu ringan mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan
	Pernyataan Opini	<p>“Vonis ringan ini tidak hanya merugikan kepercayaan publik, tetapi juga menciptakan kesan bahwa pelaku korupsi tidak akan menghadapi konsekuensi setimpal.”</p> <p>Pernyataan ini mencerminkan opini dari media yang mengkritik keputusan hakim yang dianggap tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi tersebut. Selain itu artikel ini juga mempertanyakan efektivitas sistem hukum Indonesia dalam memberantas korupsi, dengan menyebutkan bahwa vonis ringan dapat memperkuat keberanian pelaku korupsi untuk terus melanggar hukum tanpa rasa takut. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap penegakan hukum yang dianggap tidak konsisten dan tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku kejahatan besar.</p>
	Penutup	Hanya dengan cara ini, kita dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa keadilan benar-benar dirasakan oleh semua.
Skrip	<i>What</i>	Vonis yang diterima oleh Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi Timah, yang dianggap terlalu ringan mengingat kerugian negara mencapai Rp 300 triliun. Vonis tersebut hanya 6 tahun 6 bulan penjara, yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 12 tahun penjara.
	<i>Who</i>	Yang terlibat adalah Harvey Moeis, yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi Timah. Selain itu, Mahfud MD, Topo Santoso, Komisi Yudisial, Kejaksaan Agung, dan public juga berperan dalam membahas dan mengkritik vonis tersebut.
	<i>When</i>	Kapan berita ini diterbitkan adalah pada 24 Desember 2024, dan berkaitan dengan putusan pengadilan yang diterima oleh Harvey Moeis.
	<i>Where</i>	Di mana peristiwa ini terjadi adalah di Indonesia, dengan konteks hukum yang berlaku di negara tersebut, terkait dengan penegakan hukum terhadap kasus korupsi besar.
	<i>Why</i>	karena vonis ringan yang diterima Harvey Moeis menimbulkan pertanyaan besar mengenai keadilan dan efektivitas sistem hukum di Indonesia, terutama terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar.
	<i>How</i>	Dengan membahas kritik dari berbagai pihak, termasuk Mahfud MD dan Komisi Yudisial, yang mempertanyakan apakah vonis yang ringan mencerminkan sistem peradilan yang adil. Berita ini juga membandingkan dengan kasus lainnya seperti Setya Novanto untuk menyoroti ketidakadilan dalam penegakan hukum.
Tematik	Paragraph, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat,	Artikel ini tentang vonis ringan terhadap Harvey Moeis yang memicu perdebatan tentang keadilan hukum di Indonesia. Artikel ini memperkenalkan isu utama mengenai vonis 6 tahun 6 bulan yang dianggap tidak sebanding dengan kerugian negara Rp 300 triliun. Kalimat-kalimat dalam artikel ini menjelaskan bagaimana vonis tersebut, meskipun sah secara hukum, mengundang kritik karena dinilai tidak memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi. Hubungan antar kalimat menggambarkan ketidakpuasan publik terhadap sistem peradilan yang dianggap lemah dalam menangani kasus korupsi besar, serta pentingnya konsistensi dalam pemberian hukuman yang setimpal dengan kerugian

Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik, metafora	yang ditimbulkan. Gambar yang digunakan adalah sebuah foto yang memfokuskan ke arah Harvey Moeis sedang merapihkan kerah rompi tahanan yang digunakan dengan dua orang tersangka lainnya yang membelakangi arah kamera.
---------	--	---

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Berita "Vonis Ringan Harvey Moeis: 'Perang-perangan' Lawan Koruptor?" dimulai dengan *Headline* yang menyoroti vonis ringan yang diterima Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. *Lead* berita menyampaikan bahwa vonis 6 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yang meminta 12 tahun penjara. Latar berita menjelaskan lebih lanjut tentang kerugian besar yang ditimbulkan oleh korupsi timah dan bagaimana vonis tersebut dianggap tidak sebanding dengan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Kutipan dari Mahfud MD dan berbagai tokoh lainnya mempertegas ketidakpuasan terhadap keputusan hukum tersebut, terutama terkait dengan pertimbangan faktor meringankan seperti sikap sopan dan tanggungan keluarga yang diambil oleh hakim. Pernyataan atau opini disampaikan untuk menggambarkan ketidakadilan dalam putusan hukum dan menyoroti kesenjangan antara hukuman yang diberikan dan kerugian yang dialami negara. Penutup berita mengajak pembaca untuk merenungkan apakah keputusan ini akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan menggarisbawahi perlunya sistem hukum yang konsisten dan tegas. Struktur ini menyusun berita dengan cara yang terorganisir, menghubungkan berbagai elemen untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak sosial dan ketidakpuasan terhadap sistem peradilan dalam menangani korupsi besar.

2. Struktur Skrip

Berita "Vonis Ringan Harvey Moeis: 'Perang-perangan' Lawan Koruptor?" dimulai dengan *Headline* yang menyoroti vonis ringan terhadap Harvey

Moeis dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara sebesar Rp 300 triliun. Apa (*What*) yang menjadi inti dari berita ini adalah kritik terhadap vonis 6 tahun 6 bulan yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, yang dianggap tidak sebanding dengan kerugian besar yang ditimbulkan. Siapa (*Who*) yang terlibat dalam berita ini adalah Harvey Moeis sebagai terdakwa, Mahfud MD sebagai tokoh yang mengkritik keputusan tersebut, dan hakim yang menjatuhkan vonis, serta masyarakat yang merasakan dampak dari ketidakadilan hukum. Kapan (*When*), berita ini muncul setelah vonis dijatuhkan pada Desember 2024, yang kemudian memicu reaksi publik. Di mana (*Where*), peristiwa ini terjadi di Indonesia, dengan fokus pada sistem peradilan Indonesia dan dampaknya terhadap kepercayaan publik. Mengapa (*Why*), vonis ringan ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan karena tidak sebanding dengan kerugian yang timbul akibat tindakan korupsi. Bagaimana (*How*), berita ini mengkritik keputusan hukum dengan menyatakan bahwa vonis yang lebih ringan dari tuntutan jaksa dan faktor meringankan seperti sikap sopan yang dipertimbangkan hakim menciptakan kesan bahwa koruptor tidak akan menghadapi hukuman yang setimpal. Berita ini menekankan pentingnya memberikan hukuman yang lebih tegas agar sistem hukum dapat kembali mendapatkan kepercayaan publik.

3. Struktur Tematik

Berita tentang vonis ringan yang diterima Harvey Moeis dimulai dengan penekanan pada keadilan yang diharapkan dari sistem hukum Indonesia, yang seharusnya tidak hanya ditegakkan tetapi juga dirasakan oleh masyarakat. Paragraf pertama memperkenalkan inti masalah, yaitu vonis 6 tahun 6 bulan penjara yang dianggap tidak sebanding dengan kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun akibat korupsi timah. Paragraf berikutnya menjelaskan lebih lanjut tentang ketidakpuasan masyarakat dan tokoh seperti Mahfud MD terhadap keputusan tersebut. Proposisi utama berita ini adalah bahwa vonis yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan, menimbulkan kesan bahwa pelaku korupsi bisa menghindari konsekuensi

berat. Artikel ini menyampaikan opini tentang pentingnya sistem hukum yang tegas dalam menangani korupsi besar. Kalimat-kalimat dalam berita ini saling mendukung, dengan hubungan antar kalimat yang menggambarkan perbedaan pendapat antara pihak yang membela putusan berdasarkan ketentuan hukum dan pihak yang mengkritik karena ketidakadilan sosial. Pada bagian akhir, berita menekankan bahwa keadilan harus diterima oleh masyarakat dan sistem hukum perlu memberikan hukuman yang setimpal agar publik kembali percaya pada penegakan hukum.

4. Struktur Retoris

Gambar yang digunakan menunjukkan Harvey Moeis yang sedang merapikan kerah rompi tahanan, sementara dua tersangka lainnya membelakangi kamera. Hal ini menggambarkan situasi yang terkontrol, dengan satu tersangka yang tampak mematuhi aturan meskipun berada dalam proses hukum yang berat. Posisi membelakangi kamera pada dua tersangka lainnya dapat mencerminkan upaya untuk menjaga privasi atau mengurangi sorotan pada mereka. Secara keseluruhan, gambar ini menunjukkan situasi pengawasan dan penahanan yang formal, dengan fokus pada tindakan Harvey Moeis.

4.2.3. Analisis Berita 3 Kompas.com

Judul : Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara Dalam Kasus Timah

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 23 Desember 2024

Ringkasan : Berita ini menginformasikan tentang vonis yang diterima Harvey Moeis dalam kasus dugaan korupsi terkait tata niaga timah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 6 tahun 6 bulan penjara kepada Harvey Moeis setelah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Vonis tersebut lebih ringan

dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta 12 tahun penjara. Harvey juga dihukum membayar denda Rp 1 miliar, yang jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana badan. Dalam kasus ini, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp 300 triliun. Harvey Moeis, yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT), bersama dengan eks Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar untuk memperoleh keuntungan ilegal.

Tabel 4.3. Analisis Berita 3 Kompas.com

Struktur Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<p><i>Headline</i></p> <p><i>Lead</i></p> <p>Latar Berita</p> <p>Kutipan Sumber</p>	<p>Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara Dalam Kasus Timah</p> <p>Terdakwa kasus dugaan korupsi pada tata niaga komoditas Timah, Harvey Moeis divonis 6 tahun dan 6 bulan penjara,</p> <p>Berita ini mengangkat putusan terhadap Harvey Moeis, terdakwa kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang melibatkan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun. Harvey divonis 6 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 23 Desember 2024, setelah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama eks Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan pertambangan ilegal. Meskipun Harvey dijatuhi hukuman, tuntutan jaksa sebelumnya meminta vonis 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, serta uang pengganti sebesar Rp 210 miliar. Berita ini juga mencakup penjelasan mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Harvey, yang diduga memperoleh keuntungan sebesar Rp 420 miliar dari hasil korupsi. Berita ini juga menunjukkan bagaimana proses hukum dalam kasus ini berjalan dengan vonis yang lebih ringan daripada yang diharapkan publik dan jaksa.</p> <p>Eko Aryanto (Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor)</p> <p>1. "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan di rutan," Jaksa</p> <p>1. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 12 tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap dilakukan penahanan di rutan," "Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena Lim setidaknya Rp 420.000.000.000," "Vonis ringan ini tidak hanya merugikan kepercayaan publik, tetapi juga menciptakan kesan bahwa pelaku korupsi tidak akan menghadapi konsekuensi setimpal." Pernyataan ini mengungkapkan pandangan bahwa hukuman yang dijatuhkan</p>
	Pernyataan Opini	

terhadap Harvey Moeis dianggap terlalu ringan, sehingga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menimbulkan kesan bahwa koruptor tidak akan dihukum secara adil.

"Perilaku baik dan sopan dalam persidangan tidak memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat yang telah dirampas haknya."

Opini ini mengkritik fakta bahwa factor meringankan seperti sikap sopan Harvey di ruang sidang tidak seharusnya mengurangi hukuman dalam kasus

korupsi besar yang merugikan masyarakat.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010

tentang TPPU.

Harvey Moeis divonis 6 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun. Selain itu, Harvey juga dihukum membayar denda Rp 1 miliar yang akan diganti dengan pidana badan jika tidak dibayar.

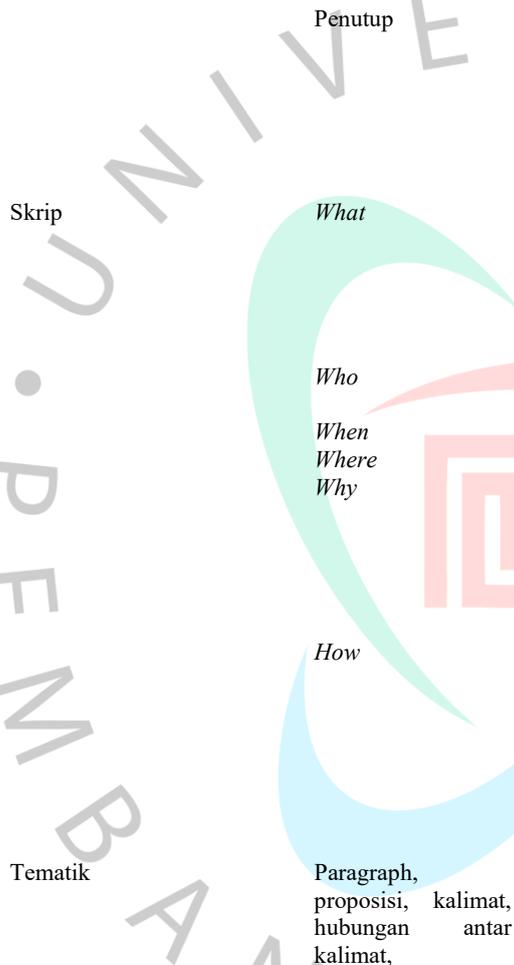
Terdakwa Harvey Moeis, yang merupakan perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT).

Vonis dijatuhkan pada Senin, 23 Desember 2024.

Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia. Harvey Moeis terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun dan melakukan tindak pidana pencucian uang melalui kegiatan pertambangan ilegal yang menguntungkan dirinya dan pihak lain.

Vonis dijatuhkan setelah Harvey Moeis terbukti bersalah melakukan korupsi bersama dengan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan sejumlah pihak lainnya, serta menjalankan kegiatan pencucian uang dari hasil korupsi. Hakim memberikan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara meskipun jaksa sebelumnya menuntut 12 tahun penjara.

Struktur tematik dimulai dengan paragraf pembuka yang menginformasikan bahwa vonis terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun dinilai terlalu ringan. Paragraf ini langsung menyampaikan fakta vonis 6 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti yang jika tidak dibayar, akan diganti dengan pidana badan. Penjelasan berikutnya mengungkapkan bahwa jaksa sebelumnya menuntut vonis yang lebih berat, yakni 12 tahun penjara dan uang pengganti sebesar Rp 210 miliar. Paragraf- paragraf selanjutnya memaparkan alasan hukum di balik vonis tersebut, termasuk pendapat Mahfud MD yang mempertanyakan keadilan dalam vonis tersebut. Mahfud MD menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dibandingkan dengan kerugian negara yang timbul. Berita ini juga menyoroti bagaimana faktor meringankan seperti sikap sopan di persidangan tidak dapat mengurangi hukuman dalam kasus besar



Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik, metafora	<p>seperti ini. Hubungan antar kalimat disusun secara logis dan berurutan, dimulai dengan fakta hukum, dilanjutkan dengan perbandingan antara tuntutan dan vonis, dan diakhiri dengan kritik terhadap keputusan hakim. Paragraf penutup menekankan ketidakpuasan masyarakat terhadap vonis yang dianggap tidak setimpal dengan kerugian yang ditanggung negara, serta menyuarakan kekecewaan terhadap sistem hukum yang dinilai lemah dalam menangani kasus korupsi besar.</p> <p>Gambar yang digunakan adalah foto sosok Harvey Moeis menggunakan rompi pink dan masker hitam sedang berjalan menghadap ke arah depan dan dikelilingi oleh polisi yang menjaga di bagian belakangnya. Tidak terdapat kata istilah, idiom atau grafik yang di tampilan pada berita tersebut.</p>
---------	--	--

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Berita "Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dalam Kasus Timah" dimulai dengan *Headline* yang langsung menyampaikan inti berita yaitu vonis terhadap Harvey Moeis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. *Lead* berita menginformasikan bahwa Harvey divonis 6 tahun 6 bulan penjara, meskipun sebelumnya jaksa menuntut hukuman 12 tahun penjara. Latar berita menyajikan konteks hukum yang lebih luas, seperti kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun dan tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh Harvey. Kutipan langsung dari hakim dan jaksa memberikan pernyataan terkait keputusan yang diambil, seperti penetapan vonis dan alasan hukum yang mendasarinya. Pernyataan atau opini menyampaikan kritik terhadap keputusan hukum yang dianggap tidak setimpal dengan kerugian besar yang terjadi, serta peran meringankan dalam keputusan vonis. Penutup berita menekankan bahwa meskipun vonis telah dijatuhkan, banyak pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut, terutama karena jumlah kerugian yang sangat besar dan dampak sosial dari tindak pidana ini. Struktur berita ini terorganisir dengan baik, menghubungkan fakta hukum, kutipan dari pihak terkait, dan kritik terhadap sistem peradilan.

2. Struktur Skrip

Berita "Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dalam Kasus Timah" dimulai dengan *Headline* yang menyampaikan inti berita mengenai vonis yang dijatuhkan terhadap Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun. Apa (*What*) yang menjadi inti berita ini adalah vonis 6 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, meskipun sebelumnya jaksa menuntut hukuman yang lebih berat, yaitu 12 tahun penjara. Siapa (*Who*) yang terlibat adalah Harvey Moeis sebagai terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang memutuskan vonis, jaksa penuntut umum yang mengajukan tuntutan 12 tahun penjara, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.

Kapan (*When*) berita ini dipublikasikan adalah pada 23 Desember 2024, setelah vonis dijatuhkan. Di mana (*Where*) peristiwa ini terjadi adalah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Mengapa (*Why*) berita ini penting karena vonis yang dianggap ringan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam sistem peradilan Indonesia, terutama mengingat kerugian yang sangat besar akibat korupsi ini. Bagaimana (*How*) berita ini disampaikan dengan menyajikan fakta hukum mengenai vonis, kutipan dari hakim dan jaksa, serta kritik terhadap keputusan hukum yang dinilai tidak memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi besar. Berita ini menekankan pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia.

3. Struktur Tematik

Dimulai dengan paragraf pembuka yang menginformasikan tentang vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Paragraf ini langsung menyampaikan vonis 6 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Paragraf penjelas kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai tuntutan jaksa yang lebih berat, yakni 12 tahun penjara, dan mengungkapkan fakta hukum terkait dengan pasal-pasal

yang dilanggar oleh Harvey. Proposisi utama dari berita ini adalah kritik terhadap vonis yang dianggap terlalu ringan, mengingat dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi tersebut.

Paragraf pendukung berikutnya menyampaikan rincian lebih lanjut mengenai bagaimana Harvey Moeis melakukan tindak pidana pencucian uang serta keterlibatannya dalam kegiatan pertambangan ilegal yang menguntungkan pihak tertentu. Pernyataan atau opini disampaikan melalui kutipan jaksa yang menilai vonis tersebut sebagai keputusan yang terlalu ringan dan tidak mencerminkan keseriusan kerugian yang dialami negara. Hubungan antar kalimat dalam berita ini dimulai dengan penyajian fakta mengenai vonis yang dijatuhkan, dilanjutkan dengan informasi mengenai pasal yang dilanggar, dan diakhiri dengan kritik terhadap keputusan hukum tersebut. Paragraf penutup menekankan pentingnya hukuman yang lebih tegas dalam kasus korupsi besar dan bagaimana ketidakpuasan publik terhadap keputusan ini dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap sistem peradilan Indonesia.

4. Struktur Retoris

Gambar yang digunakan menunjukkan Harvey Moeis mengenakan rompi pink dan masker hitam, sedang berjalan menghadap ke depan dengan pengawalan polisi yang menjaga di belakangnya. Penggunaan rompi pink dan masker hitam menandakan bahwa sosok ini berada dalam pengawasan hukum yang ketat. Posisi pengawalan oleh polisi menggambarkan bahwa dia dalam situasi yang memerlukan keamanan ekstra, sementara tidak adanya elemen teks atau grafik pada gambar menunjukkan bahwa fokus hanya pada situasi visual tanpa interpretasi tambahan.

4.2.4. Analisis Berita 4 Kompas.com

Judul : Dihukum 6 Tahun BUI, Harvey Moeis Pikir-pikir
Sumber : Kompas.com
Tanggal : 23 Desember 2024

Ringkasan : Berita ini menginformasikan bahwa setelah vonis 6 tahun 6 bulan penjara terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah, pihak terdakwa dan jaksa penuntut umum menyatakan "pikir-pikir" atas keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Hakim Eko Aryanto memberikan waktu tujuh hari untuk terdakwa dan jaksa untuk mempertimbangkan sikap mereka, baik menerima, mengajukan banding, atau mempertimbangkan keputusan tersebut. Setelah berdiskusi, Harvey dan rekan-rekannya memutuskan untuk menunggu lebih lanjut. Selain itu, hukuman yang dijatuhkan jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menginginkan 12 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 210 miliar. Para terdakwa diberi waktu hingga tujuh hari kerja untuk memutuskan langkah hukum selanjutnya.

Tabel 4.4. Analisis Berita 4 Kompas.com

Struktur Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	Headline Lead	Dihukum 6 Tahun BUI, Harvey Moeis Pikir-pikir Pihak terdakwa dugaan korupsi pada tata niaga Komoditas timah, Harvey Moeis hingga jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir atas hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
	Latar Berita	Berita ini mengangkat keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 6 tahun 6 bulan penjara kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah. Setelah putusan dibacakan, pihak terdakwa dan jaksa penuntut umum menyatakan "pikir-pikir" mengenai hukuman tersebut. Harvey Moeis bersama dengan Suparta dan Reza Andriansyah, yang juga terdakwa dalam kasus ini, diberi waktu tujuh hari untuk mempertimbangkan apakah akan menerima vonis atau mengajukan banding. Hal ini menjadi sorotan karena hukuman yang dijatuhkan jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, serta uang pengganti Rp 210 miliar. Keputusan hakim juga mengingatkan terdakwa dan jaksa akan liburan akhir tahun, yang mempengaruhi perhitungan waktu selama tujuh hari yang diberikan.
	Kutipan Sumber	Eko Aryanto (Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat) "apabila ada yang tidak menerima putusan ini dapat mengajukan upaya hukum yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Penuntut umum bagaimana sikapnya?" Jaksa Penuntut Umum "Izin Yang Mulia, sikap kami pikir-pikir" Pengacara Harvey Moeis "Setelah kami pertimbangkan majelis hakim, baik Terdakwa maupun kami penasihat hukum menyatakan pikir-pikir dulu"
	Pernyataan Opini	Pernyataan opini dalam berita ini menyatakan bahwa vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta hukuman

		12 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 210 miliar. Frasa ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap keputusan hakim yang dianggap tidak setimpal dengan kerugian besar yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moeis. Dengan vonis yang lebih ringan, ada anggapan bahwa hukuman tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi publik, mengingat dampak sosial dan ekonomi dari tindak pidana tersebut.
	Penutup	Sementara, Suparta dihukum 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan, dari tuntutan jaksa 14 tahun penjara dan denda subsidair Rp 1 tahun bui.
Skrip	<i>What</i>	putusan vonis terhadap Harvey Moeis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, yaitu 6 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 210 miliar. Pihak terdakwa dan jaksa penuntut umum menyatakan "pikir-pikir" atas keputusan ini, memberi mereka waktu tujuh hari untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya.
	<i>Who</i>	Harvey Moeis, terdakwa dalam kasus korupsi timah, jaksa penuntut umum, dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Hakim Eko Aryanto.
	<i>When</i>	23 Desember 2024, setelah vonis dijatuhkan di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
	<i>Where</i>	Di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia.
	<i>Why</i>	Karena vonis terhadap Harvey Moeis dianggap lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta 12 tahun penjara, dan ini menimbulkan ketidakpuasan publik. Selain itu, berita ini juga mencakup sikap jaksa dan terdakwa yang masih mempertimbangkan apakah akan menerima vonis atau mengajukan banding.
	<i>How</i>	Dengan menyajikan fakta tentang vonis yang dijatuhkan dan reaksi kedua pihak (terdakwa dan jaksa) yang menyatakan "pikir-pikir." Hakim juga mengingatkan mereka tentang waktu yang tersedia untuk membuat keputusan, serta membahas perhitungan waktu yang dipengaruhi liburan akhir tahun.
Tematik	Paragraph, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat,	Berita ini dimulai dengan paragraf pembuka yang menginformasikan tentang vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Vonis tersebut adalah 6 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 210 miliar. Proposisi utama dari berita ini adalah bahwa meskipun vonis tersebut dijatuhkan, baik pihak terdakwa maupun jaksa penuntut umum menyatakan "pikir-pikir" tentang putusan tersebut dan meminta waktu untuk mempertimbangkannya lebih lanjut. Paragraf selanjutnya menjelaskan bahwa setelah putusan dibacakan, hakim memberi waktu tujuh hari bagi pihak-pihak terkait untuk mempertimbangkan sikap mereka, baik itu mengajukan banding atau Menerima vonis tersebut. Kalimat penjelas menggambarkan diskusi yang terjadi antara terdakwa dan tim kuasa hukum, yang akhirnya memutuskan untuk mengambil waktu lebih lama sebelum mengambil keputusan. Kemudian, hakim mengingatkan tentang perhitungan waktu yang harus mempertimbangkan libur akhir tahun. Hubungan antar kalimat dalam berita ini bersifat logis dan berurutan, dimulai dengan pengenalan vonis yang dijatuhkan, dilanjutkan dengan sikap yang diambil oleh kedua pihak terhadap putusan tersebut, dan diakhiri dengan penekanan bahwa mereka memiliki waktu

Retoris

Kata, idiom, gambar/foto, grafik, metafora

tujuh hari untuk menentukan sikap, dengan pertimbangan liburan. Paragraf penutup menekankan perbedaan antara tuntutan jaksa dan vonis yang lebih ringan yang dijatuhkan oleh hakim, serta dinamika keputusan yang belum final.

terdapat gambar yang menampilkan Harvey Moeis di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Gambar tersebut menunjukkan Harvey Moeis mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dengan masker, duduk di kursi terdakwa, dan tampak serius mendengarkan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Gambar ini menggunakan metafora visual yang kuat untuk menggambarkan suasana ketegangan dan keseriusan dalam proses peradilan. Warna rompi tahanan yang mencolok dan ekspresi wajah Harvey Moeis yang serius menciptakan kontras yang menekankan keseriusan kasus yang sedang dihadapi. Tidak terdapat grafik atau elemen visual lain dalam gambar tersebut.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dimulai dengan *Headline* yang menyampaikan inti berita mengenai vonis

- yang dijatuhkan terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah. *Lead* berita menginformasikan bahwa setelah putusan dibacakan, baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum menyatakan "pikir-pikir" mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Latar berita menyajikan konteks mengenai hak yang dimiliki oleh terdakwa dan jaksa untuk mengajukan banding atau menerima keputusan hakim dalam waktu tujuh hari. Selanjutnya, kutipan langsung dari hakim Eko Aryanto memberikan informasi lebih lanjut mengenai waktu yang diberikan dan pengingat mengenai liburan akhir tahun yang mempengaruhi penghitungan waktu. Pernyataan atau opini disampaikan melalui penjelasan mengenai perbedaan antara tuntutan jaksa yang menginginkan hukuman lebih berat dan vonis yang dijatuhkan oleh hakim yang lebih ringan. Hal ini menggambarkan ketidakpuasan terhadap keputusan yang dianggap tidak setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan. Penutup berita menekankan bahwa meskipun vonis yang dijatuhkan lebih ringan daripada tuntutan jaksa, terdakwa dan jaksa masih diberikan waktu untuk mempertimbangkan sikap mereka mengenai keputusan tersebut. Struktur ini mengorganisir berita secara logis, dimulai dengan fakta hukum, diikuti dengan informasi tentang hak banding, dan diakhiri dengan penekanan pada proses

pertimbangan lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait.

2. Struktur Skrip

Berita "Dihukum 6 Tahun Bui, Harvey Moeis Pikir-Pikir" dimulai dengan *Headline* yang menyampaikan bahwa Harvey Moeis, terdakwa dalam kasus korupsi timah, dan jaksa penuntut umum menyatakan "pikir-pikir" atas hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Apa (*What*) yang menjadi inti berita ini adalah keputusan hakim yang menjatuhkan vonis 6 tahun 6 bulan penjara kepada Harvey Moeis, serta keputusan jaksa dan pihak terdakwa yang meminta waktu untuk mempertimbangkan sikap mereka terkait putusan tersebut. Siapa (*Who*) yang terlibat adalah Harvey Moeis sebagai terdakwa, jaksa penuntut umum, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, dan pengacara Harvey. Kapan (*When*) berita ini dipublikasikan adalah pada 23 Desember 2024, setelah putusan dijatuhkan di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dimana (*Where*) peristiwa ini terjadi adalah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jakarta. Mengapa (*Why*) berita ini penting adalah karena meskipun vonis terhadap Harvey Moeis dianggap lebih ringan daripada tuntutan jaksa, proses hukum masih berlanjut dengan kemungkinan banding yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Bagaimana (*How*) berita ini disampaikan adalah dengan menjelaskan fakta vonis yang lebih ringan, pernyataan pihak terdakwa dan jaksa yang menyatakan "pikir-pikir", serta keputusan hakim yang memberi waktu tujuh hari untuk mempertimbangkan sikap terhadap keputusan tersebut.

3. Struktur Tematik

Dimulai dengan paragraf pembuka yang menyampaikan inti dari berita, yaitu bahwa setelah vonis 6 tahun 6 bulan penjara dijatuhkan kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah, baik pihak terdakwa maupun jaksa penuntut umum menyatakan "pikir-pikir" mengenai keputusan tersebut. Paragraf ini langsung menginformasikan keputusan hakim dan reaksi kedua pihak terhadap putusan yang dijatuhkan. Paragraf penjelas berikutnya

memberikan detail lebih lanjut tentang hak yang diberikan kepada para pihak, yaitu waktu tujuh hari untuk mempertimbangkan apakah akan menerima vonis atau mengajukan banding. Di dalamnya terdapat kutipan langsung dari Hakim Eko Aryanto yang mengingatkan mereka untuk mempertimbangkan waktu yang ada, mengingat liburan akhir tahun. Proposisi utama dari berita ini adalah adanya ketidakpastian tentang apakah vonis yang dijatuhkan akan diterima atau dibawa ke tingkat banding. Paragraf-paragraf selanjutnya menguraikan lebih lanjut tentang perbedaan antara tuntutan jaksa dan vonis yang lebih ringan yang dijatuhkan oleh hakim, serta membahas proses hukum yang sedang berlangsung. Pernyataan atau opini dari berita ini menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap keputusan hakim, yang dianggap tidak setimpal dengan tuntutan jaksa dan kerugian negara yang timbul dari kasus ini. Hubungan antar kalimat di dalam berita ini terorganisir dengan baik, dimulai dengan pengenalan fakta hukum, dilanjutkan dengan informasi mengenai hak banding dan waktu yang diberikan, serta ditutup dengan penekanan pada keputusan yang masih terbuka untuk dipertimbangkan oleh terdakwa dan jaksa. Paragraf penutup menekankan bahwa keputusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa ini menyisakan pertanyaan tentang keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

4. Struktur Retoris

Gambar yang digunakan menampilkan Harvey Moeis di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, mengenakan rompi tahanan merah muda dan masker, duduk di kursi terdakwa sambil serius mendengarkan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Gambar ini menggunakan **metafora visual** yang kuat untuk menggambarkan ketegangan dan keseriusan dalam proses peradilan. Warna rompi tahanan yang mencolok serta ekspresi wajah Harvey Moeis yang serius menciptakan yang menekankan keseriusan dan beratnya kasus yang sedang dihadapi, menambah kedalaman emosional pada situasi tersebut.

4.2.5. Analisis Berita 5 Kompas.com

Judul : Vonis Ringan Harvey Moeis: Opera Sabun Peradilan

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 7 Januari 2025

Ringkasan : Berita ini mengkritik vonis ringan yang diterima oleh Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah, yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Dengan vonis 6 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 210 miliar, banyak yang menganggap keputusan ini sebagai lelucon tragis yang mencerminkan ketidakadilan dalam sistem hukum Indonesia. Penulis mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan yang dianggap tidak memberikan efek jera, bahkan menambah moral hazard di kalangan pelaku korupsi. Menggunakan teori kriminologi klasik dari Jeremy Bentham, penulis menilai vonis ini sebagai penghinaan terhadap prinsip keadilan, karena tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Artikel ini menyoroti ketimpangan antara hukuman yang diterima oleh elite ekonomi dan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada rakyat biasa. Dengan kritikan terhadap sistem hukum yang tidak efektif, artikel ini menyerukan reformasi peradilan untuk mencapai keadilan sejati.

Tabel 4.5. Analisis Berita 5 Kompas.com

Struktur Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<p>Headline</p> <p>Lead</p> <p>Latar Berita</p>	<p>Vonis Ringan Harvey Moeis: Opera Sabun Peradilan</p> <p>Kala tembok-tembok keadilan yang mestinya kokoh berdiri kini menjelma setipis kertas minyak. Kita saksikan lakon tragikomedi peradilan yang bisa membuat sopchocles menangis di sudut ruangan.</p> <p>Berita ini membahas ketidakpuasan publik terhadap vonis ringan yang diterima oleh Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Harvey divonis 6 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 210 miliar, yang dianggap terlalu ringan mengingat besarnya kerugian negara. Artikel ini menggambarkan sistem peradilan Indonesia yang dianggap tidak mampu memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan besar yang dilakukan oleh para pelaku korupsi. Dalam konteks ini, penulis mengkritik hakim yang menggunakan teks-teks hukum yang dianggap usang dan tidak memberikan efek jera, serta menyoroti ketimpangan hukum antara elit ekonomi dan rakyat kecil. Artikel ini mengacu pada teori kriminologi klasik dari Jeremy Bentham, yang menyatakan bahwa hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang</p>

		dilakukan, dan menyoroti bagaimana sistem hukum di Indonesia masih jauh dari keadilan yang sejati.
	Kutipan Sumber	Penulis "Enam setengah tahun penjara, saudara-saudara sekalian, untuk kasus yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun! Ya, anda tidak salah baca. Triliun, bukan miliar apalagi juga"
	Pernyataan Opini	Penulis mengungkapkan ketidakpuasan terhadap vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, yang dianggap terlalu ringan mengingat kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun. Vonis 6 tahun 6 bulan penjara dianggap tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, yang memicu pernyataan bahwa keputusan ini adalah "penghinaan intelektual yang telanjang bulat." Penulis juga mengkritik bahwa vonis ini gagal menciptakan efek jera dan malah membuka potensi moral hazard, yang dapat mendorong pelaku korupsi untuk terus melakukannya tanpa takut akan hukuman berat. Opini ini menyoroti bagaimana korupsi di Indonesia sudah dianggap biasa, seperti permainan yang hanya menghibur pihak-pihak berkuasa, tanpa memberikan keadilan bagi masyarakat.
	Penutup	Dengan mata yang masih basah, hati yang masih panas, dan semangat yang tak padam, kita akan terus melawan. Sebab, seperti kata pujangga: "Gelap tak akan bertahan lama jika kita berani menyalakan lentera
Skrip	<i>What</i>	kritik terhadap vonis yang diterima Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Penulis menganggap vonis 6 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan terhadap Harvey Moeis sebagai terlalu ringan dan tidak
	<i>Who</i>	sebanding dengan kerugian besar yang ditimbulkan. Harvey Moeis sebagai terdakwa kasus korupsi, penulis artikel sebagai pihak yang mengkritik keputusan hukum, dan sistem peradilan Indonesia yang dianggap tidak memberikan efek jera yang
	<i>When</i>	cukup terhadap pelaku korupsi. 7 Januari 2025, setelah vonis dijatuhkan kepada Harvey Moeis pada Desember 2024.
	<i>Where</i>	Di Indonesia
	<i>Why</i>	karena vonis yang diterima oleh Harvey Moeis dianggap tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang melibatkan kerugian negara yang sangat besar. Berita ini mengkritik sistem peradilan yang dianggap tidak memberikan efek jera dan mengungkapkan kegelisahan masyarakat tentang ketidakadilan hukum.
	<i>How</i>	melalui penjelasan tentang vonis yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa, dikaitkan dengan teori kriminologi klasik dari Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa hukuman harus sebanding dengan kejahatan. Artikel ini menyuarakan kekecewaan terhadap sistem hukum yang tidak adil dan menyerukan reformasi untuk memperbaiki sistem peradilan Indonesia.
Tematik	Paragraph, proposisi, kalimat, hubungan Antar kalimat,	Paragraf pembuka yang menggambarkan kekecewaan penulis terhadap vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah, yang dianggap terlalu ringan mengingat kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun. Paragraf ini juga menggunakan bahasa yang kuat dan metafora untuk menunjukkan betapa tragisnya vonis tersebut dalam konteks keadilan yang hilang. Proposisi

utama dari berita ini adalah bahwa vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis tidak sesuai dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut, yang mengarah pada kritik terhadap sistem hukum Indonesia yang dianggap lemah dan tidak memberikan efek jera. Penulis membandingkan vonis ini dengan pandangan Jeremy Bentham, seorang tokoh kriminologi, yang percaya bahwa hukuman harus sebanding dengan kejahatan untuk memberikan efek jera. Kalimat-kalimat dalam berita ini mengembangkan ide ini, dimulai dengan penjelasan mengenai vonis yang lebih ringan dari tuntutan jaksa, diikuti dengan kritik terhadap ketidakmampuan sistem hukum untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku korupsi. Hubungan antar kalimat yang terjalin adalah logis dan berurutan: berita dimulai dengan fakta hukumnya, lalu berlanjut ke pandangan moral dan kriminologis yang lebih mendalam, dan diakhiri dengan penekanan pada reformasi hukum yang dibutuhkan untuk memperbaiki sistem peradilan. Paragraf penutup menegaskan kembali bahwa vonis ini adalah simbol ketidakadilan dan bahwa sistem hukum Indonesia membutuhkan pembaruan radikal untuk memastikan keadilan yang lebih nyata dan setimpal, bukan hanya untuk masyarakat kecil, tetapi juga untuk kasus-kasus besar yang melibatkan elit ekonomi.

Gambar yang digunakan sosok harvey moeis sedang berjalan dalam ruangan sidang menggunakan kemeja putih rapih dan masker hitam

Retoris

Kata, idiom/gambar/foto, grafik, metafora

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dimulai dengan *Headline* yang menyampaikan secara langsung inti dari berita, yaitu kritikan terhadap vonis ringan yang diterima Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah, yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. *Lead* berita mengungkapkan ketidakpuasan terhadap vonis tersebut, yang dianggap lebih mirip dengan sebuah "sentilan alis" daripada hukuman yang setimpal. Latar berita kemudian menjelaskan lebih rinci mengenai vonis yang dijatuhkan, yaitu 6 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 210 miliar, yang jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang meminta 12 tahun penjara. Kutipan langsung dari artikel ini menyatakan: "Enam setengah tahun penjara, saudara-saudara sekalian, untuk kasus yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun! Ya, Anda tidak salah baca. Triliun, bukan miliar, apalagi juta. Pernyataan atau opini disampaikan melalui analisis teori kriminologi klasik dari Jeremy Bentham, yang menyatakan bahwa hukuman harus sebanding dengan kejahatan untuk memberikan efek

jera. Penulis mengkritik bahwa vonis ini tidak hanya gagal menciptakan efek jera tetapi juga membuka gerbang moral hazard, yang mendorong pelaku korupsi untuk merasa aman karena hukuman yang diterima tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Penutup berita menyuarakan bahwa vonis ini adalah simbol ketidakadilan dalam sistem hukum Indonesia. Penulis menekankan bahwa kasus Harvey Moeis bukan hanya soal individu, tetapi juga mencerminkan ketimpangan yang ada dalam sistem hukum, di mana elit ekonomi sering mendapatkan hukuman ringan, sementara rakyat biasa dihukum berat untuk pelanggaran kecil.

Struktur berita ini terorganisir dengan paragraf pembuka yang mengungkapkan inti masalah, diikuti dengan penjelasan rinci mengenai vonis, pendapat atau opini dari penulis yang menggunakan teori kriminologi, dan diakhiri dengan seruan untuk reformasi dalam sistem hukum Indonesia. Kalimat-kalimat dalam artikel ini saling mendukung, memberikan gambaran jelas tentang ketidakadilan hukum yang ada, dan mengajak pembaca untuk berpikir kritis mengenai sistem peradilan yang tidak berfungsi dengan semestinya.

2. Struktur Skrip

Berita "Vonis Ringan Harvey Moeis: Opera Sabun Peradilan" dimulai dengan *Headline* yang langsung menyoroti ketidakpuasan terhadap vonis 6 tahun 6 bulan penjara yang diterima oleh Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah, yang dianggap terlalu ringan mengingat kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun. Apa (*What*) yang menjadi inti berita ini adalah kritikan terhadap vonis yang dianggap tidak setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan, serta ketidakberdayaan sistem hukum yang diwakili oleh vonis tersebut. Siapa (*Who*) yang terlibat dalam berita ini adalah Harvey Moeis sebagai terdakwa, para hakim yang menjatuhkan vonis, serta penulis artikel yang menyuarakan ketidakpuasan publik. Kapan (*When*) berita ini diterbitkan adalah pada 7 Januari 2025, setelah vonis dijatuhkan pada bulan Desember 2024. Di mana (*Where*) peristiwa ini terjadi adalah di Indonesia, dengan fokus pada sistem peradilan Indonesia yang menangani kasus

korupsi besar tersebut. Mengapa (*Why*) berita ini penting adalah karena vonis yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa memperlihatkan ketidakadilan yang terjadi dalam proses hukum di Indonesia, yang dapat memperburuk moral hazard di kalangan pelaku korupsi. Bagaimana (*How*) berita ini disampaikan adalah dengan menggunakan kritik tajam terhadap keputusan hakim, metafora kuat, dan teori kriminologi klasik dari Jeremy Bentham untuk menggambarkan kegagalan sistem hukum Indonesia, serta seruan untuk melakukan reformasi peradilan untuk memastikan keadilan yang lebih setimpal dan nyata.

3. Struktur Tematik

Dimulai dengan paragraf pembuka yang menggambarkan ketidakpuasan terhadap vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah. Penulis menyatakan bahwa vonis 6 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis tidak sebanding dengan kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun, menggunakan metafora kuat seperti "tembok-tembok keadilan yang mestinya kokoh berdiri kini menjelma setipis kertas minyak" untuk menggambarkan sistem peradilan yang rapuh. Paragraf selanjutnya mengembangkan kritik terhadap vonis tersebut dengan mengaitkannya dengan teori kriminologi klasik yang digagas oleh Jeremy Bentham. Penulis menilai bahwa vonis yang dijatuhkan adalah "penghinaan intelektual", dan menekankan bahwa hukuman yang ringan akan menambah moral hazard, memberi pelaku korupsi rasa aman. Di sini, penulis mengkritik gagasan bahwa hukuman harus sebanding dengan kejahatan untuk memberikan efek jera yang maksimal. Proposisi utama dari berita ini adalah bahwa vonis ini merupakan simbol ketidakadilan yang menggambarkan ketimpangan hukum di Indonesia, terutama antara elit ekonomi dan rakyat biasa. Penulis memperlihatkan bagaimana "moral hazard" yang muncul akibat vonis yang ringan ini dapat merusak sistem peradilan yang diharapkan dapat menjaga kepentingan publik. Pernyataan atau opini dalam berita ini menyampaikan pandangan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis hanya memperlihatkan ketidakadilan yang

semakin nyata, menggambarkan sistem hukum Indonesia sebagai alat yang bisa dimainkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan uang. Hubungan antar kalimat dalam artikel ini saling terhubung secara argumentatif dan kritis. Setiap kalimat membangun argumen yang lebih luas mengenai kegagalan sistem peradilan, dimulai dari pengenalan vonis yang dianggap terlalu ringan, dilanjutkan dengan kritik terhadap ketimpangan hukuman yang terjadi, serta diakhiri dengan seruan untuk reformasi total dalam sistem hukum Indonesia. Paragraf penutup menekankan bahwa kasus Harvey Moeis adalah contoh nyata dari bagaimana hukum di Indonesia lebih mirip permainan untuk orang kaya dan berkuasa, dengan penulis menyerukan pembaruan besar dalam sistem peradilan untuk memastikan keadilan yang benar-benar adil, yang tidak hanya terasa manis di bibir, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat yang menderita akibat ketidakadilan.

4. Struktur Retoris

Gambar yang digunakan menampilkan Harvey Moeis yang sedang berjalan di dalam ruang sidang, mengenakan kemeja putih rapi dan masker hitam. Istilah gambar ini menggambarkan kesan formalitas dan keseriusan dalam situasi hukum yang dihadapi, dengan pilihan pakaian yang mencerminkan kedisiplinan. Penggunaan masker hitam juga dapat diartikan sebagai simbol untuk menutupi identitas atau menjaga jarak emosional dengan publik, menambah kesan keterasingan atau kerahasiaan dalam proses hukum yang berlangsung. Berita ini menggunakan kata-kata kuat seperti "tembok-tembok keadilan" untuk menggambarkan sistem peradilan yang seharusnya kokoh, namun kini dianggap rapuh dan tidak mampu menegakkan keadilan. Penulis juga menggunakan idiom "menyalakan lilin" untuk mengajak pembaca berperan dalam perbaikan sistem hukum yang rusak, dengan harapan agar sistem ini bisa diperbaiki melalui kesadaran kolektif.

4.2.6. Analisis Berita 6 Kompas.com

Judul : Ketika Kejagung Ajukan Banding Atas Vonis Harvey Moeis

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 1 Januari 2025

Ringkasan : Berita ini menginformasikan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia telah mengajukan banding terhadap vonis ringan yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk. Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut 12 tahun penjara untuk Harvey, namun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hanya menjatuhkan vonis 6 tahun 6 bulan. Kejagung, melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Harli Siregar, menyatakan bahwa mereka telah mendaftarkan banding dan saat ini sedang menyusun dalil-dalil untuk memori banding sembari menunggu salinan putusan. Langkah ini sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyindir vonis ringan tersebut, mengingat kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah. Prabowo bahkan menyarankan agar Harvey Moeis dijatuhi hukuman penjara hingga 50 tahun.

Tabel 4.6. Analisis Berita 6 Kompas.com

Struktur Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline</i>	Ketika Kejagung Ajukan Banding atas Vonis Harvey Moeis...
	<i>Lead</i>	Kejaksaan Agung (kejagung) RI mengonfirmasi bahwa jaksa telah mengajukan banding terhadap vonis ringan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kepada Harvey Moeis
	Latar Berita	Berita ini mengangkat langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengajukan banding terhadap vonis ringan yang diterima oleh Harvey Moeis dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah di PT Timah Tbk. Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hanya 6 tahun 6 bulan penjara, jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menginginkan 12 tahun penjara. Kejaksaan Agung menyatakan bahwa mereka sedang menyusun memori banding dan menunggu salinan putusan untuk merumuskan dalil-dalil banding. Selain itu, langkah Kejagung ini juga didorong oleh arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang mengkritik vonis yang dianggap terlalu ringan mengingat kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah. Presiden bahkan menyarankan agar Harvey Moeis dijatuhi hukuman yang jauh lebih berat, yakni

	Kutipan Sumber	50 tahun penjara, mencerminkan ketidakpuasan terhadap keputusan hakim yang dianggap tidak adil.
	Pernyataan Opini	<p>Harli siregar (Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) kejakung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Kami berkomitmen, dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan" Prabowo (Presiden RI) 2. "Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo enggak ngerti hukum lagi" 3. "Jaksa Agung, naik banding enggak? Naik banding ya. Naik banding" 4. "vonisnya ya 50 tahun begitu kira - kira"
	Penutup	Presiden Prabowo Subianto mengkritik vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, menyatakan bahwa hukuman tersebut terlalu ringan mengingat kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah. Dalam pandangannya, vonis yang diberikan tidak mencerminkan keseriusan tindak pidana yang dilakukan, sehingga ia menyarankan agar hukuman yang dijatuhkan lebih berat, bahkan menyebutkan bahwa vonis seharusnya bisa mencapai 50 tahun penjara. Prabowo juga mendesak Jaksa Agung untuk segera mengajukan banding atas keputusan tersebut, menilai bahwa keputusan hakim tidak memberikan efek jera yang cukup dan tidak setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kasus korupsi ini.
Skrip	<i>What</i>	Untuk diketahui, kerugian negara dari dugaan korupsi pada pengelolaan tata niaga timah yang melibatkan Harvey Moeis dan PT Refined Bangka Tin (RBT), dinilai mencapai Rp 300 triliun
	<i>Who</i>	Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding terhadap vonis ringan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah di PT Timah Tbk. Kejaksaan Agung sedang menyusun memori banding.
	<i>When</i>	Terkait dengan Harvey Moeis, terdakwa dalam kasus korupsi, Kejaksaan Agung, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Harli Siregar, serta Presiden Prabowo Subianto yang memberikan arahan terkait langkah hukum tersebut.
	<i>Where</i>	Kejaksaan Agung mengajukan banding pada 31 Desember 2024 dan Presiden Prabowo memberikan komentarnya pada 30 Desember 2024.
	<i>Why</i>	Peristiwa ini terjadi di Jakarta, Indonesia, dengan fokus pada proses hukum yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
	<i>How</i>	Kejaksaan Agung mengajukan banding karena vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dianggap terlalu ringan, mengingat kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah dan tuntutan jaksa sebelumnya adalah 12 tahun penjara.
	Tematik	Kejaksaan Agung menyusun memori banding dan menunggu salinan putusan untuk melanjutkan langkah hukum tersebut. Langkah banding ini juga sejalan dengan kritik Presiden Prabowo yang menyarankan agar hukuman yang dijatuhkan lebih berat, bahkan menyarankan vonis mencapai 50 tahun penjara.
	Paragraph, proposisi, kalimat,	Struktur tematik dari berita no 6 dimulai dengan paragraf pembuka yang menginformasikan bahwa Kejaksaan Agung

	<p>hubungan antar kalimat,</p>	<p>(Kejagung) telah mengajukan banding terhadap vonis ringan yang diterima Harvey Moeis dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah di PT Timah Tbk. Paragraf ini langsung menyampaikan bahwa Kejagung telah mendaftarkan banding dan sedang menyusun memori banding sambil menunggu salinan putusan. Proposisi utama dari berita ini adalah bahwa Kejaksaan Agung tidak puas dengan vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dan menganggap hukuman tersebut tidak setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan. Penulis juga menyebutkan bahwa langkah banding ini didorong oleh kritik dari Presiden Prabowo Subianto, yang menyarankan agar hukuman bagi Harvey Moeis lebih berat, bahkan bisa mencapai 50 tahun penjara. Kalimat-kalimat dalam berita ini saling mendukung untuk mengungkapkan ketidakpuasan terhadap vonis hakim yang dianggap terlalu ringan. Kalimat penjelas menyampaikan langkah Kejaksaan Agung yang sedang menyusun dalil-dalil banding dan menunggu salinan putusan, sedangkan kalimat yang mengutip pernyataan Presiden Prabowo memberikan konteks lebih lanjut tentang ketidakpuasan atas keputusan tersebut. Hubungan antar kalimat bersifat logis, dimulai dengan fakta bahwa Kejaksaan Agung mengajukan banding, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai langkah hukum yang diambil, dan diakhiri dengan kritik dari Presiden Prabowo yang mendukung langkah banding dan mendesak hukuman lebih berat. Paragraf penutup menegaskan bahwa langkah banding ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap keputusan yang dianggap tidak adil, serta menyarankan adanya perubahan besar dalam penegakan hukum terhadap korupsi besar di Indonesia.</p>
<p>Retoris</p>	<p>Kata, idiom, gambar/foto, grafik, metafora</p>	<p>Gambar yang digunakan ada sosok kapuspenkum seperti dalam ruangan sidang. berita ini menggunakan kata-kata yang kuat dan metafora untuk menyoroti ketidakpuasan terhadap vonis yang dianggap terlalu ringan, serta menunjukkan bahwa pendapat Prabowo. memberikan tekanan terhadap Kejaksaan Agung untuk melakukan banding</p>

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dimulai dengan *Headline* yang menginformasikan tentang langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengajukan banding terhadap vonis ringan yang diterima oleh Harvey Moeis dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah di PT Timah Tbk. *Lead* berita menyampaikan informasi bahwa Kejaksaan Agung sudah melakukan banding dan telah mendaftarkannya di pengadilan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyatakan bahwa jaksa penuntut umum sedang menyusun dalil-dalil memori banding sembari menunggu salinan putusan. Latar berita memberikan informasi lebih lanjut mengenai tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta 12 tahun penjara untuk Harvey Moeis, tetapi vonis yang dijatuhkan hanya 6,5 tahun. Ini menjadi dasar bagi

Kejaksaan Agung untuk mengajukan banding, dengan Harli Siregar menjelaskan bahwa tuntutan yang sudah diajukan sesuai dengan alat bukti yang ada. Pernyataan atau opini disampaikan melalui pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa vonis yang dijatuhkan terlalu ringan, mengingat kerugian negara yang besar. Prabowo menyarankan agar hukuman yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis jauh lebih berat, bahkan bisa mencapai 50 tahun penjara. Pernyataan ini juga menunjukkan dukungan terhadap langkah Kejaksaan Agung untuk mengajukan banding. Penutup berita menegaskan langkah Kejaksaan Agung yang mengajukan banding sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo, yang meminta agar keputusan ini ditinjau kembali, untuk memastikan vonis yang lebih berat dan setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan. Hubungan antar kalimat dalam berita ini terorganisir dengan baik dan logis: berita dimulai dengan fakta yang paling penting (banding yang diajukan), dilanjutkan dengan penjelasan lebih lanjut mengenai tuntutan jaksa, pendapat Presiden Prabowo yang mendukung banding, dan diakhiri dengan penekanan pada tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

2. Struktur Skrip

Kejaksaan Agung mengonfirmasi bahwa mereka telah mengajukan banding terhadap vonis ringan yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah, yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Kejaksaan Agung merasa bahwa vonis 6 tahun 6 bulan penjara yang diterima Harvey Moeis tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan, mengingat jaksa sebelumnya menuntut hukuman 12 tahun penjara. Harli Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, menyatakan bahwa tuntutan jaksa sudah sesuai dengan alat bukti yang ada, dan banding diajukan untuk memastikan keputusan hukum yang lebih adil. Langkah Kejaksaan Agung ini juga didukung oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mengkritik vonis tersebut dan menyarankan agar hukuman terhadap Harvey Moeis lebih berat, bahkan mencapai 50 tahun penjara. Kejaksaan Agung saat ini sedang menyusun memori banding dan menunggu

salinan putusan, dengan tujuan untuk mendapatkan hukuman yang lebih setimpal dengan kerugian negara yang ditimbulkan.

3. Struktur Tematik

Dimulai dengan paragraf pembuka yang menginformasikan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengajukan banding terhadap vonis yang diterima Harvey Moeis dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah. Paragraf ini langsung menyampaikan bahwa Kejaksaan Agung telah mendaftarkan banding di pengadilan dan sedang menyusun memori banding sambil menunggu salinan putusan. Proposisi utama dari berita ini adalah bahwa Kejaksaan Agung merasa bahwa vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis terlalu ringan dan tidak sesuai dengan kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk memperjuangkan hukuman yang lebih setimpal dengan kerugian yang timbul. Paragraf penjelas memberikan informasi lebih lanjut mengenai pernyataan dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, yang menekankan bahwa tuntutan jaksa sebelumnya adalah 12 tahun penjara, dan banding ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Pernyataan atau opini dalam berita ini mengutip Presiden Prabowo Subianto yang memberikan kritik terhadap vonis yang dianggap terlalu ringan. Prabowo menyarankan agar Harvey Moeis dijatuhi hukuman penjara hingga 50 tahun, yang juga menjadi dorongan untuk Kejaksaan Agung untuk mengajukan banding. Hubungan antar kalimat dalam berita ini bersifat logis dan berurutan. Dimulai dengan fakta Kejaksaan Agung mengajukan banding, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai tuntutan jaksa, kemudian disampaikan kritik dari Presiden Prabowo. Penutup berita menegaskan bahwa langkah Kejaksaan Agung untuk mengajukan banding sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, yang mendukung langkah tersebut untuk memastikan hukuman yang lebih adil.

4. Struktur Retoris

Gambar yang digunakan menampilkan sosok Kapuspenkum di dalam ruangan sidang, yang menggambarkan ketegasan dan otoritas dalam menyampaikan pernyataan. Gambar ini dipadukan dengan penggunaan kata-kata yang kuat dan metafora untuk menyoroti ketidakpuasan terhadap vonis yang dianggap terlalu ringan. Kehadiran Kapuspenkum menambah konotasi tekanan dan tuntutan terhadap Kejaksaan Agung untuk melakukan banding, menunjukkan bahwa pihak berwenang tidak puas dengan hasil keputusan pengadilan dan mendorong langkah hukum selanjutnya.

4.2.7. Analisis Berita 7 Kompas.com

Judul : KY Buka Peluang Periksa Hakim yang Vonis Ringan

Harvey Moeis Sumber : Kompas.com

Tanggal : 23 Januari 2025

Ringkasan : Komisi Yudisial (KY) mengumumkan bahwa mereka akan memeriksa pihak-pihak terkait dalam laporan dugaan pelanggaran etik yang terkait dengan vonis ringan terhadap Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi tata niaga timah. Harvey Moeis dihukum 6,5 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 210 miliar. Laporan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terhadap majelis hakim yang menyidangkan perkara ini diterima KY pada 6 Januari 2025. KY telah menganalisis laporan tersebut dan akan memulai pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi, serta mungkin akan memanggil terlapor. Sebelumnya, KY sudah memperkirakan bahwa putusan ringan ini akan memicu reaksi publik. Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, juga mengkritik vonis tersebut, menganggapnya tidak adil dan tidak sebanding dengan kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun.

Tabel 4.7. Analisis Berita 7 Kompas.com

Struktur Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline</i>	KY Buka Peluang Periksa Hakim yang Vonis Ringan Harvey Moeis
	<i>Lead</i>	Komisi Yudisial (KY) menyatakan akan mulai

	<p>memeriksa para pihak terkait laporan dugaan pelanggaran etik menyangkut vonis ringan suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis</p>
Latar Berita	<p>Berita ini mengangkat langkah Komisi Yudisial (KY) yang akan memeriksa para pihak terkait laporan dugaan pelanggaran etik terhadap hakim yang menjatuhkan vonis ringan kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi tata niaga timah. Vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis adalah 6,5 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 210 miliar, yang dianggap tidak sebanding dengan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun. Laporan tersebut diterima KY pada 6 Januari 2025 dan mencakup dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). KY memutuskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, serta kemungkinan memanggil hakim yang terlibat dalam perkara ini. Langkah ini diambil karena sebelumnya KY telah memprediksi bahwa vonis yang ringan terhadap Harvey Moeis akan menimbulkan gejolak di masyarakat, dan untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap adil, imparisial, dan independen.</p>
Kutipan Sumber	<p>Mukti Fajar Nur Dewata (Juru Bicara KY)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “KY mulai mengagendakan pemeriksaan terhadap beberapa pihak pelapor dan saksi- saksi, juga mungkin akan dilakukan pemanggilan terhadap terlapor” 2. “(KY) selesai menganalisis dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang selanjutnya dibawa ke rapat konsultasi” 3. “Hal ini sebagai upaya agar hakim dapat menjaga imparisialitas dan independensinya agar bisa memutus perkara dengan adil” Mahfud MD (Mantan Menteri Koordinator, Politik, Hukum dan Keamanan) <p>“Artinya uang konkret yang dicuri dari negara. Sesudah dihitung lagi jadi Rp 300 triliun.. hanya dikabulakn perampasannya Rp 210 miliar ditambah denda Rp 1 miliar, berarti Rp 211 miliar. Ini sungguh tidak adil”</p>
Pernyataan Opini	<p>Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, mengkritik vonis ringan yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, dengan mengatakan bahwa hukuman tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, mengingat kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun. Ia menilai vonis tersebut tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Sementara itu, Mukti Fajar Nur Dewata, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY), menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etik hakim dilakukan untuk memastikan bahwa hakim dapat menjaga imparisialitas dan independensinya dalam memutus perkara dengan adil.</p>
Penutup	<p>“Artinya uang konkret yang dicuri dari negara. Sesudah dihitung lagi jadi Rp 300 triliun. Hanya dikabulkan perampasannya Rp 210 miliar ditambah denda Rp 1 miliar, berarti Rp 211 miliar. Ini sungguh tidak adil,” ujar Mahfud.</p>
Skrip	<p><i>What</i></p> <p>Komisi Yudisial (KY) akan memeriksa dugaan pelanggaran etik yang terkait dengan vonis ringan terhadap Harvey Moeis, terdakwa dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah. Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terhadap majelis hakim yang menyidangkan</p>

	<i>Who</i>	perkara ini sudah diterima KY. Komisi Yudisial (KY), Harvey Moeis (terdakwa), Mahfud MD (Mantan Menko Polhukam), Mukti Fajar Nur Dewata (Juru Bicara KY), dan majelis hakim yang menyidangkan perkara Harvey Moeis.
	<i>When</i>	Laporan diterima oleh KY pada 6 Januari 2025, dan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi mulai dijadwalkan pada 23 Januari 2025.
	<i>Where</i>	Pemeriksaan dilakukan oleh Komisi Yudisial di Jakarta, Indonesia
	<i>Why</i>	Vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dianggap terlalu ringan dan tidak mencerminkan keadilan, mengingat kerugian negara yang sangat besar. KY menganggap ini perlu diperiksa untuk memastikan bahwa hakim yang memutuskan perkara ini tidak melanggar etik dan tetap menjaga imparialitas serta independensinya.
	<i>How</i>	KY akan memulai pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi, serta mungkin memanggil terlapor (hakim) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etik, meskipun pendalaman tidak akan mencakup substansi hukum dari vonis yang dijatuhkan.
Tematik	Paragraph, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat,	Paragraf pembuka yang menginformasikan bahwa Komisi Yudisial (KY) akan memeriksa lap telah menerima laporan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan mereka mulai merencanakan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi serta memanggil terlapor. Proposisi utama dari berita ini adalah bahwa KY memulai langkah untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik hakim, yang terkait dengan vonis yang dianggap tidak adil, mengingat kerugian negara yang besar akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moeis. Kalimat-kalimat dalam berita ini menguraikan langkah-langkah yang diambil KY, dimulai dengan penerimaan laporan pada 6 Januari, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap saksi-saksi dan terlapor. Hubungan antar kalimat adalah untuk menggambarkan urutan kejadian, yaitu laporan yang diterima, analisis yang dilakukan oleh KY, dan langkah-langkah selanjutnya dalam pemeriksaan. Paragraf penutup menekankan pernyataan dari KY yang menyatakan bahwa meskipun pemeriksaan dilakukan, pendalaman tidak akan memasuki substansi hukum, melainkan bertujuan untuk memastikan bahwa hakim menjaga imparialitas dan independensinya dalam proses peradilan, sesuai dengan prinsip-prinsip etik yang berlaku. Secara keseluruhan, berita ini disusun dengan cara yang terstruktur, dimulai dengan informasi tentang langkah KY, dilanjutkan dengan penjelasan rinci tentang proses pemeriksaan, dan diakhiri dengan penekanan pada tujuan pemeriksaan yang berkaitan dengan menjaga kualitas independensi dan objektivitas hakim. oran dugaan pelanggaran etik terhadap hakim yang menjatuhkan vonis ringan kepada Harvey Moeis. Paragraf ini memberikan informasi utama bahwa KY
Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik, metafora	Gambar yang digunakan adalah sosok Harvey Moeis sedang berjalan menggunakan kemeja putih polos dengan masker hitam.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dimulai dengan *Headline* yang langsung menginformasikan bahwa Komisi Yudisial (KY) akan memeriksa laporan dugaan pelanggaran etik terkait vonis ringan yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi tata niaga timah. *Lead* berita menyampaikan bahwa laporan tersebut diterima pada 6 Januari dan bahwa KY telah mengagendakan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi-saksi serta kemungkinan memanggil terlapor (hakim) terkait masalah ini. Latar berita memberikan rincian tentang proses yang dilakukan oleh KY, seperti analisis terhadap laporan yang diajukan, serta pengawasan yang sudah dilakukan oleh KY sejak awal persidangan untuk memastikan hakim menjaga imparialitas dan independensinya. Kutipan langsung dari Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, menyatakan bahwa laporan mengenai dugaan pelanggaran etik hakim tersebut sudah selesai dianalisis dan sedang dibawa ke rapat konsultasi. Pernyataan atau opini dalam berita ini disampaikan oleh Mahfud MD, yang mengkritik vonis yang dianggap tidak adil dan tidak setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan, serta menganggap hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hubungan antar kalimat dalam berita ini menghubungkan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KY dengan kritik dari tokoh publik (Mahfud MD) mengenai keputusan vonis yang dijatuhkan oleh hakim. Penutup berita menegaskan langkah KY dalam memeriksa pelanggaran etik hakim dan menyoroti bahwa meskipun pemeriksaan ini berlangsung, substansi hukum dari keputusan hakim tidak akan dipengaruhi oleh proses ini. Secara keseluruhan, berita ini disusun dengan paragraf pembuka yang menginformasikan langkah KY, diikuti dengan penjelasan lebih lanjut mengenai proses pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh KY, serta pendapat dari Mahfud MD yang mengkritik vonis ringan tersebut. Paragraf penutup menggarisbawahi langkah KY untuk menjaga imparialitas dan integritas hakim dalam proses peradilan.

2. Struktur Skrip

Komisi Yudisial (KY) mengumumkan bahwa mereka akan memeriksa laporan dugaan pelanggaran etik terkait vonis ringan yang diterima Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah. Laporan tersebut diterima KY pada 6 Januari 2025, dan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi akan dimulai pada 23 Januari 2025. Kejaksaan Agung merasa bahwa vonis yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun, yang kemudian memicu pemeriksaan ini untuk memastikan integritas dan independensi hakim. Mukti Fajar Nur Dewata, Juru Bicara KY, menyatakan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan hakim menjaga imparialitas dan memberikan keputusan yang adil. Selain itu, Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, mengkritik vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, menilai bahwa hukuman tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Sebagai langkah selanjutnya, KY akan memeriksa pelapor, saksi, dan kemungkinan memanggil hakim yang terlibat dalam perkara ini untuk memastikan keputusan yang diambil mencerminkan integritas dan prinsip keadilan.

3. Struktur Tematik

paragraf pembuka yang menginformasikan bahwa Komisi Yudisial (KY) akan memeriksa laporan dugaan pelanggaran etik terhadap hakim yang menjatuhkan vonis ringan kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah. Berita ini langsung menyampaikan bahwa KY telah menerima laporan pada 6 Januari 2025 dan kini sedang merencanakan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor (hakim). Proposisi utama dari berita ini adalah bahwa KY berkomitmen untuk memastikan proses peradilan tetap adil dengan memeriksa dugaan pelanggaran etik yang melibatkan hakim dalam perkara Harvey Moeis, mengingat vonis ringan yang dijatuhkan memicu kontroversi di masyarakat. Kalimat-kalimat dalam berita ini menjelaskan bagaimana KY mulai menganalisis laporan dan mengagendakan pemeriksaan, serta pernyataan dari Mukti Fajar Nur Dewata yang

menekankan pentingnya menjaga imparialitas dan independensi hakim. Penjelasan lebih lanjut disampaikan mengenai langkah-langkah yang diambil oleh KY, termasuk pemantauan proses persidangan sejak awal untuk memastikan hakim dapat memutus perkara secara adil. Hubungan antar kalimat di berita ini terjalin secara logis dan berurutan, dimulai dengan informasi penting tentang langkah yang diambil oleh KY, dilanjutkan dengan penjelasan tentang latar belakang laporan pelanggaran etik, diikuti oleh opini dari Mahfud MD yang mengkritik vonis tersebut sebagai tidak adil, dan diakhiri dengan penekanan pada langkah konkret yang dilakukan oleh KY untuk menjaga kualitas independensi hakim. Paragraf penutup mengingatkan kembali bahwa meskipun KY melakukan pemeriksaan, proses ini tidak akan menyentuh substansi hukum, melainkan akan lebih fokus pada menjaga etika dan integritas hakim dalam membuat keputusan.

4. Struktur Retoris

Gambar yang digunakan menunjukkan Harvey Moeis sedang berjalan mengenakan kemeja putih polos dan masker hitam. Penampilan ini menonjolkan kesan formal dan netral, dengan warna putih yang melambangkan kebersihan atau keteraturan, sementara masker hitam memberikan kesan penutupan identitas atau kerahasiaan, yang dapat menunjukkan upaya untuk menghindari sorotan publik. Gambar ini menguatkan suasana tenang namun penuh ketegangan, mencerminkan situasi yang sedang dihadapi oleh Harvey Moeis dalam proses hukum. Berita ini mengkritik vonis ringan yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah, yang dianggap tidak sebanding dengan kerugian negara yang sangat besar. Istilah "vonis ringan" digunakan untuk menggambarkan hukuman yang dinilai tidak memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan besar. Komisi Yudisial (KY) memulai pemeriksaan dugaan pelanggaran etik terhadap hakim yang memutuskan perkara ini, dengan fokus untuk memastikan bahwa hakim menjaga imparialitas dan independensinya dalam memutuskan perkara secara adil. Metafora "gejolak di masyarakat" menggambarkan ketidakpuasan publik yang muncul akibat

keputusan vonis yang dianggap tidak adil. Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, mengungkapkan bahwa vonis tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, mengingat kerugian negara yang sangat besar. Di sisi lain, Mukti Fajar Nur Dewata dari Komisi Yudisial menyatakan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim tidak terpengaruh oleh faktor eksternal dan bisa memutuskan perkara dengan adil. Berita ini menekankan pentingnya langkah yang diambil oleh KY untuk menjaga integritas dan kualitas sistem peradilan di Indonesia.

4.2.8. Analisis Berita 8 Kompas.com

Judul : Vonis Harvey Moeis Diperberat 3 Kali Lipat, DPR: Sesuai Harapan Rakyat

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 14 Februari 2025

Ringkasan : Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka, menyambut baik putusan banding yang memperberat hukuman Harvey Moeis dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara. Martin mengatakan bahwa keputusan ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat dan menjadi preseden penting bagi penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam pemberantasan korupsi. Ia menilai hukuman yang lebih berat ini diperlukan untuk memberikan efek jera, terutama mengingat kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun akibat tindakan Harvey Moeis. Martin juga mengingatkan bahwa korupsi besar merugikan negara secara finansial dan menghambat kesejahteraan masyarakat, sehingga hukuman yang tegas menjadi sangat penting. Dalam putusan banding tersebut, selain pidana penjara, denda sebesar Rp 1 miliar juga dijatuhkan kepada Harvey Moeis, serta uang pengganti yang meningkat menjadi Rp 420 miliar.

Tabel 4.8. Analisis Berita 8 Kompas.com

Struktur Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline</i>	Vonis Harvey Moeis Diperberat 3 Kali Lipat, DPR: Sesuai Harapan Rakyat
	<i>Lead</i>	Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Martin Daniel

Latar Berita

Tumbelaka, putusan banding yang memperberat hukuman Harvey Moeis hingga tiga kali lipat, sudah sesuai dengan harapan masyarakat.

Reaksi positif dari anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka, terhadap putusan banding yang memperberat hukuman Harvey Moeis dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah. Sebelumnya, Harvey Moeis dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, namun dalam putusan banding, hukumannya diperberat menjadi 20 tahun penjara, dengan tambahan denda Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 420 miliar. Martin menilai keputusan ini sebagai langkah tegas dalam menegakkan hukum, khususnya dalam kasus korupsi berskala besar yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Ia menyatakan bahwa vonis yang lebih berat ini sesuai dengan harapan masyarakat dan menjadi preseden penting bagi penegakan hukum di Indonesia, menunjukkan bahwa koruptor tidak kebal hukum. Martin juga mengingatkan bahwa korupsi besar tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat kesejahteraan masyarakat, sehingga penindakan yang tegas sangat diperlukan. Putusan banding ini juga mencerminkan komitmen aparat penegak hukum untuk memperkuat pemberantasan korupsi, khususnya di sektor sumber daya alam yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. Dengan demikian, latar belakang berita ini adalah respons positif terhadap peningkatan hukuman dalam kasus korupsi besar, sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Kutipan Sumber

Martin Daniel Tumbelaka (Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra)

1. "ini momentum bagi aparat penegak hukum untuk terus memperkuat komitmennya dalam memberantas korupsi, khususnya di sektor sumber daya alam yang memiliki dampak luas bagi masyarakat"
2. "ini sesuai harapan masyarakat. Dengan kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun, sudah sepatutnya hukuman yang dijatuhkan memberikan efek jera dan menegaskan bahwa korupsi tidak bisa toleransi"
3. "korupsi seperti ini bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat kesejahteraan masyarakat. Putusan ini di harapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat"

Teguh (Hakim ruang sidang PT Jakarta)

"Menjatuhkan pidana kepada Harvey Moeis selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider delapan bulan kurungan"

Pernyataan Opini

Martin Daniel Tumbelaka, anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, berpendapat bahwa putusan banding yang memperberat hukuman Harvey Moeis menjadi momentum penting bagi aparat penegak hukum untuk memperkuat komitmennya dalam memberantas korupsi, khususnya di sektor sumber daya alam yang berdampak luas bagi masyarakat. Ia menilai bahwa dengan kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun, hukuman yang lebih berat untuk Harvey Moeis sangat diperlukan agar memberikan efek jera dan menegaskan bahwa korupsi tidak bisa ditoleransi. Selain itu, Martin juga mengungkapkan bahwa korupsi semacam ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat kesejahteraan masyarakat, sehingga penindakan yang tegas sangat diperlukan untuk memastikan keadilan.

Skrip

Penutup	Selain pidana badan dan denda, majelis hakim banding juga menambah hukuman pidana pengganti Harvey Moeis dari Rp 210 miliar menjadi Rp 420 miliar
<i>What</i>	Putusan banding yang memperberat hukuman Harvey Moeis dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara. Selain itu, denda yang dijatuhkan sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti meningkat menjadi Rp 420 miliar.
<i>Who</i>	Martin Daniel Tumbelaka (Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra), Harvey Moeis (terdakwa), dan Teguh Harianto (Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta).
<i>When</i>	Putusan banding dijatuhkan pada 13 Februari 2025 dan pernyataan Martin Daniel Tumbelaka diberikan pada 14 Februari 2025.
<i>Where</i>	Pengadilan Tinggi Jakarta dan pernyataan Martin diberikan di Jakarta.
<i>Why</i>	Putusan banding yang memperberat hukuman Harvey Moeis dianggap penting oleh Martin Daniel Tumbelaka karena memberikan efek jera terhadap korupsi, terutama di sektor sumber daya alam yang berisiko merugikan masyarakat secara luas.
<i>How</i>	Putusan banding memperberat hukuman Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara dan menambah uang pengganti menjadi Rp 420 miliar. Ini menjadi momentum bagi penegak hukum untuk lebih tegas dalam menanggapi kasus korupsi besar, yang diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Tematik Paragraph, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat,	Paragraf pembuka yang menginformasikan bahwa Martin Daniel Tumbelaka, anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, menyatakan bahwa putusan banding yang memperberat hukuman Harvey Moeis sesuai dengan harapan masyarakat dan menjadi preseden penting bagi penegakan hukum di Indonesia. Paragraf ini langsung menyampaikan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis diperberat tiga kali lipat, dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara, yang dianggap sebagai langkah tegas dalam menanggulangi korupsi. Proposisi utama dari berita ini adalah bahwa hukuman yang lebih berat ini sesuai dengan harapan masyarakat, yang menginginkan penindakan yang tegas terhadap pelaku korupsi, terutama dalam kasus-kasus besar yang merugikan negara. Martin menilai bahwa keputusan ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan menegaskan bahwa tindakan korupsi tidak dapat ditoleransi. Kalimat-kalimat dalam berita ini membangun argumen dengan mengungkapkan berbagai alasan mengenai pentingnya keputusan tersebut. Misalnya, kalimat pertama mengungkapkan pendapat Martin mengenai pentingnya hukuman yang lebih berat, yang diikuti dengan penjelasan bahwa kerugian negara yang sangat besar menjadikan hukuman tersebut lebih adil. Selanjutnya, kalimat tersebut dijelaskan lebih lanjut dengan pernyataan bahwa keputusan ini juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hubungan antar kalimat dalam berita ini berfungsi untuk menyambung argumen dan menjelaskan pentingnya keputusan yang diambil. Kalimat pertama memperkenalkan pendapat Martin Daniel Tumbelaka mengenai hukuman yang lebih berat, sementara kalimat berikutnya memperkuat pendapat tersebut dengan alasan tentang dampak korupsi terhadap masyarakat dan pentingnya penegakan hukum yang tegas. Di akhir, kalimat-kalimat tersebut memberikan kesimpulan bahwa putusan banding ini sesuai dengan harapan masyarakat dan menunjukkan bahwa hukum

Retoris

Kata, idiom,
gambar/foto,
grafik, metafora

berpihak pada keadilan. Paragraf penutup menekankan kembali bahwa hukuman yang lebih berat ini memberikan harapan bagi masyarakat untuk melihat penegakan hukum yang lebih adil dan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi besar.

Gambar yang digunakan adalah sosok Harvey Moeis menggunakan kemeja putih dengan masker hitam lalu di belakangnya terdapat beberapa polisi dan banyak wartawan yang menyoroti beliau. Kata-kata kuat seperti "vonis diperberat" dan "preseden penting" untuk menggambarkan dampak dari keputusan banding yang memperberat hukuman Harvey Moeis. Idiom "momentum bagi aparat penegak hukum" menekankan bahwa keputusan ini menjadi kesempatan penting bagi aparat penegak hukum untuk memperkuat komitmen mereka dalam memberantas korupsi, khususnya di sektor sumber daya alam. Metafora seperti "korupsi yang menghambat kesejahteraan masyarakat" menggambarkan kerugian besar yang ditimbulkan oleh korupsi, yang tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghalangi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, berita ini menyampaikan bahwa hukuman yang lebih berat terhadap Harvey Moeis dianggap sebagai langkah yang tepat dalam menegakkan keadilan, memberikan efek jera bagi pelaku korupsi, dan memberikan harapan bagi masyarakat bahwa hukum akan berpihak pada keadilan.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dimulai dengan paragraf pembuka yang menginformasikan bahwa anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka, menyambut baik keputusan banding yang memperberat hukuman Harvey Moeis dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara. Paragraf ini langsung menyampaikan bahwa keputusan ini sesuai dengan harapan masyarakat dan menjadi preseden penting bagi penegakan hukum di Indonesia, dengan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Proposisi utama dalam berita ini adalah bahwa hukuman yang diperberat tersebut mencerminkan langkah tegas dalam menegakkan hukum, terutama dalam kasus-kasus korupsi besar yang merugikan negara. Martin menilai bahwa keputusan ini sesuai dengan harapan masyarakat, yang menginginkan hukuman yang lebih berat dan menegaskan bahwa korupsi tidak bisa ditoleransi. Kalimat-kalimat dalam berita ini menjelaskan pendapat Martin mengenai keputusan yang lebih tegas dan mengapa ini penting, seperti hukuman yang lebih berat memberikan efek jera, sesuai dengan kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun. Kalimat-kalimat ini memperkuat argumen mengenai keadilan

dan pentingnya penindakan tegas terhadap korupsi besar. Hubungan antar kalimat dalam berita ini saling mendukung secara logis dan bertujuan untuk membangun argumen bahwa keputusan banding ini adalah langkah yang tepat. Dimulai dengan pernyataan Martin yang menyambut baik putusan tersebut, dilanjutkan dengan alasan-alasan mengapa keputusan tersebut penting, dan diakhiri dengan penegasan bahwa masyarakat menaruh harapan besar agar korupsi besar ditindak secara tegas. Paragraf penutup kembali menekankan bahwa hukuman yang lebih berat ini memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, yang merasa bahwa penegakan hukum harus menanggulangi kerugian besar yang ditimbulkan oleh korupsi. Secara keseluruhan, berita ini menggabungkan informasi utama, penjelasan rinci, dan pendapat tokoh publik untuk memperjelas pentingnya keputusan yang diambil dalam memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa hukum tetap berpihak pada keadilan.

2. Struktur Skrip

Putusan banding yang memperberat hukuman Harvey Moeis dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara, bersama dengan denda Rp 1 miliar dan uang pengganti yang meningkat menjadi Rp 420 miliar, sesuai dengan harapan masyarakat. Martin Daniel Tumbelaka, anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, menyambut baik keputusan tersebut, yang dianggap sebagai preseden penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, keputusan ini memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa korupsi besar yang merugikan negara tidak bisa ditoleransi. Martin juga mengingatkan bahwa korupsi seperti ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat kesejahteraan masyarakat. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, Teguh Harianto, menjelaskan bahwa Harvey Moeis terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara bersama-sama, yang menjadikan keputusan banding lebih berat. Dengan hukuman yang lebih tinggi, Martin berharap ini dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan menjadi contoh bagi aparat penegak hukum untuk memperkuat komitmen dalam memberantas korupsi.

3. Struktur Tematik

Dimulai dengan paragraf pembuka yang menginformasikan tentang keputusan banding yang memperberat hukuman Harvey Moeis dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara, dengan tambahan denda Rp 1 miliar dan uang pengganti yang meningkat menjadi Rp 420 miliar. Paragraf ini langsung mengungkapkan bahwa keputusan ini sesuai dengan harapan masyarakat dan dianggap sebagai preseden penting untuk penegakan hukum di Indonesia. Proposisi utama dari berita ini adalah bahwa hukuman yang lebih berat terhadap Harvey Moeis menunjukkan langkah tegas dalam menegakkan hukum, terutama dalam kasus korupsi berskala besar yang berdampak luas pada negara dan masyarakat. Martin Daniel Tumbelaka, anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, menyatakan bahwa hukuman yang lebih berat sesuai dengan harapan masyarakat dan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Kalimat-kalimat dalam berita ini membangun argumen dengan menjelaskan pentingnya keputusan banding tersebut. Misalnya, kalimat pertama mengungkapkan bahwa keputusan ini menjadi preseden penting bagi penegakan hukum, diikuti dengan alasan Martin yang menekankan bahwa hukuman yang lebih berat adalah bentuk penegakan keadilan mengingat kerugian negara yang sangat besar. Kalimat-kalimat ini kemudian diikuti oleh pernyataan Teguh Harianto, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, yang menjelaskan alasan hukuman lebih berat dijatuhkan kepada Harvey Moeis. Hubungan antar kalimat dalam berita ini terjalin dengan rapi, di mana kalimat pertama memperkenalkan pendapat Martin mengenai keputusan banding, dilanjutkan dengan penjelasan lebih lanjut mengenai dampak positif dari keputusan tersebut, dan diakhiri dengan pernyataan hakim yang memberikan alasan di balik keputusan tersebut. Berita ini menghubungkan berbagai elemen untuk membangun argumen bahwa keputusan banding memperberat hukuman merupakan langkah yang tegas dan sesuai dengan harapan masyarakat. Paragraf penutup menekankan bahwa putusan ini memberikan harapan bagi masyarakat, bahwa penegakan hukum tetap berpihak pada keadilan, dan diharapkan dapat memperkuat komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi, terutama

yang merugikan negara dan masyarakat. Secara keseluruhan, berita ini disusun dengan cara yang terstruktur dengan jelas, menggabungkan informasi utama, penjelasan rinci, kritik dan dukungan dari tokoh publik, serta tujuan penegakan hukum yang lebih tegas.

4. Struktur Retoris

Gambar yang digunakan menampilkan Harvey Moeis mengenakan kemeja putih dan masker hitam, dengan beberapa polisi di belakangnya dan banyak wartawan yang menyoroti dirinya. Keberadaan polisi di belakangnya menunjukkan bahwa ia berada dalam pengawasan ketat, sementara perhatian wartawan yang mengarah padanya menandakan bahwa dirinya adalah sorotan publik. Penampilan dengan masker hitam memberikan kesan tertutup, sementara kemeja putih memberikan kesan formalitas.

Gambar ini mencerminkan ketegangan dan perhatian media yang tinggi terhadap kasus yang sedang dihadapi oleh Harvey Moeis. Berita ini menggunakan kata-kata kuat seperti "vonis diperberat," "preseden penting," dan "efek jera" untuk menyoroti dampak besar dari keputusan banding yang memperberat hukuman Harvey Moeis. Idiom seperti "momentum bagi aparat penegak hukum" dan "korupsi tidak bisa ditoleransi" menekankan pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas. Metafora seperti "korupsi yang menghambat kesejahteraan masyarakat" menggambarkan dampak negatif yang luas dari korupsi terhadap negara dan rakyat. Secara keseluruhan, berita ini menekankan bahwa keputusan banding memperberat hukuman adalah langkah penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan harapan bagi masyarakat bahwa hukum akan berpihak pada keadilan.

4.2.9. Analisis Berita 9 Kompas.com

Judul : Hakim Ungkap Alasan Harvey Moeis Dijatuhi Vonis 20 Tahun Penjara
Sumber : Kompas.com
Tanggal : 13 Februari 2025

Ringkasan : Hukuman Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah, diperberat menjadi 20 tahun penjara setelah Pengadilan Tinggi Jakarta menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum terpidana. Sebelumnya, pada Desember 2024, Harvey dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Harvey sangat merugikan negara dan tidak mendukung program pemberantasan korupsi, apalagi terjadi pada saat ekonomi sedang susah. Selain hukuman penjara, uang pengganti yang wajib dibayar Harvey juga meningkat dari Rp 210 miliar menjadi Rp 420 miliar, dengan ancaman hukuman tambahan jika uang pengganti tidak dibayar. Selain itu, denda Rp 1 miliar yang sebelumnya dijatuhkan tetap berlaku, namun masa kurungan untuk tidak membayar denda diperpanjang dari enam bulan menjadi delapan bulan. Harvey Moeis terbukti merugikan negara hingga Rp 300 triliun dan menerima uang Rp 420 miliar, yang juga terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

Tabel 4.9. Analisis Berita 9 Kompas.com

Struktur Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline</i>	Hakim Ungkap Alasan Harvey Moeis Dijatuhi Vonis 20 Tahun Penjara
	<i>Lead</i>	Hukuman terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah, Harvey Moeis diperberat menjadi 20 tahun penjara.
	Latar Berita	Kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah yang melibatkan Harvey Moeis telah menjadi sorotan publik setelah Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman terdakwa dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara. Sebelumnya, pada Desember 2024, Harvey divonis ringan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, yang menimbulkan kritik dari berbagai pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Vonis ringan tersebut dianggap tidak sebanding dengan kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun akibat praktik korupsi tersebut. Sebagai respons, Kejaksaan Agung mengajukan banding, yang kemudian diterima oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Selain hukuman penjara, majelis hakim juga menambah denda dan uang pengganti yang harus dibayar Harvey, serta menetapkan ketentuan tambahan jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Putusan ini dianggap sebagai langkah penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi besar di Indonesia.
	Kutipan Sumber	Teguh Harianto (Hakim Ketua di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat) “Dengan demikian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pengadilan Tipikor Jakarta)

Pernyataan Opini		<p>“Hal meringankan tidak ada”</p> <p>Martin Daniel Tumbelaka, anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, berpendapat bahwa putusan banding yang memperberat hukuman Harvey Moeis adalah langkah penting bagi aparat penegak hukum untuk memperkuat komitmennya dalam memberantas korupsi, khususnya di sektor sumber daya alam yang berdampak luas pada masyarakat. Ia juga menekankan bahwa dengan kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun, hukuman yang lebih berat sangat diperlukan untuk memberikan efek jera dan menegaskan bahwa korupsi tidak bisa ditoleransi. Selain itu, Martin juga mengungkapkan bahwa korupsi besar seperti ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat kesejahteraan masyarakat, sehingga penindakan yang tegas sangat dibutuhkan.</p>
Penutup		<p>Ia terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan</p>
Skrip	<i>What</i>	<p>Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ke-1 KUHP. Hukuman Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah, diperberat menjadi 20 tahun penjara di tingkat banding. Selain itu, uang pengganti yang wajib dibayar meningkat dari Rp 210 miliar menjadi Rp 420 miliar, dengan ketentuan jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan, harta bendanya akan dirampas untuk negara. Jika harta tidak mencukupi, hukumannya akan ditambah 10 tahun. Denda juga dikenakan sebesar Rp 1 miliar</p>
	<i>Who</i>	<p>subsider 8 bulan kurungan. Harvey Moeis, suami aktris Sandra Dewi, merupakan terdakwa dalam kasus korupsi tata niaga timah. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis sebelumnya yang dianggap terlalu ringan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang dipimpin oleh Ketua Majelis Teguh Harianto</p>
	<i>When</i>	<p>menjatuhkan putusan banding ini. Putusan banding dijatuhkan pada Kamis, 13 Februari 2025. Sebelumnya, pada Senin, 23 Desember 2024, Harvey divonis 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan</p>
	<i>Where</i>	<p>Tipikor Jakarta. Putusan banding dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Jakarta.</p>
	<i>Why</i>	<p>Sidang sebelumnya berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Hukuman diperberat karena perbuatan Harvey Moeis dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan sangat menyakit hati rakyat, terutama karena terjadi saat kondisi ekonomi sedang sulit. Selain itu, kerugian negara akibat tindak pidana ini mencapai Rp 300</p>
	<i>How</i>	<p>triliun. Harvey Moeis terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp 420 miliar. Jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan dirampas untuk negara. Jika harta tidak mencukupi, hukumannya akan ditambah 10 tahun.</p>
Tematik	Paragraph,	<p>Menginformasikan bahwa hukuman Harvey Moeis dalam</p>

	proposisi, hubungan antar kalimat,	kalimat, antar	kasus korupsi timah diperberat menjadi 20 tahun penjara setelah Pengadilan Tinggi Jakarta menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum. Sebelumnya, pada Desember 2024, ia dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Hukuman diperberat karena perbuatan Harvey dinilai sangat merugikan negara dan masyarakat, terutama karena terjadi saat kondisi ekonomi sulit. Selain penjara, uang pengganti yang harus dibayar Harvey juga meningkat menjadi Rp 420 miliar, dengan ancaman tambahan hukuman jika tidak dibayar. Putusan ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas dalam menangani korupsi besar yang berdampak luas.
Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik, metafora		Gambar yang digunakan menunjukkan Harvey Moeis dengan kemeja putih sedang seolah berbicara dengan seseorang. Berita ini menggunakan kata-kata yang kuat seperti "vonis diperberat" dan "tidak ada hal yang meringankan" untuk menunjukkan ketegasan hukum terhadap pelaku korupsi besar. Metafora seperti "korupsi yang menghambat kesejahteraan masyarakat" dan "menyakiti hati rakyat" menggambarkan dampak besar yang ditimbulkan oleh korupsi pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Berita ini menginformasikan bahwa hukuman Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah, diperberat menjadi 20 tahun penjara setelah Pengadilan Tinggi Jakarta menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum. Sebelumnya, pada Desember 2024, Harvey dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Harvey sangat merugikan negara dan masyarakat, apalagi terjadi pada saat kondisi ekonomi sedang sulit. Selain hukuman penjara, uang pengganti yang wajib dibayar Harvey juga meningkat dari Rp 210 miliar menjadi Rp 420 miliar. Hakim Teguh menegaskan bahwa jika Harvey tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan dirampas untuk negara dan masa penjaranya bisa bertambah sepuluh tahun. Denda Rp 1 miliar yang dijatuhkan tetap berlaku, namun jika tidak dibayar, masa kurungan diperpanjang dari enam bulan menjadi delapan bulan. Harvey Moeis terbukti merugikan negara hingga Rp 300 triliun dan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

2. Struktur Skrip

Hukuman Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah, diperberat menjadi 20 tahun penjara setelah Pengadilan Tinggi Jakarta menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum. Sebelumnya, pada Desember 2024, Harvey dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Majelis Hakim memutuskan untuk memperberat hukuman karena perbuatan Harvey dianggap sangat merugikan negara, terutama di tengah kesulitan ekonomi. Selain hukuman penjara, uang pengganti yang wajib dibayar Harvey juga meningkat dari Rp 210 miliar menjadi Rp 420 miliar, dengan ketentuan bahwa jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan dirampas untuk negara. Jika harta yang disita tidak mencukupi, masa hukuman Harvey bisa bertambah sepuluh tahun. Denda sebesar Rp 1 miliar tetap dijatuhkan, namun jika tidak dibayar, masa kurungan juga akan diperpanjang dari enam bulan menjadi delapan bulan. Harvey terbukti merugikan negara hingga Rp 300 triliun dan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

3. Struktur Tematik

Berita ini menginformasikan bahwa hukuman Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah, diperberat menjadi 20 tahun penjara setelah Pengadilan Tinggi Jakarta menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum. Sebelumnya, pada Desember 2024, Harvey dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Hukuman diperberat karena perbuatannya dianggap sangat merugikan negara dan tidak mendukung program pemberantasan korupsi, apalagi terjadi pada saat kondisi ekonomi sedang sulit. Selain hukuman penjara, uang pengganti yang wajib dibayar Harvey juga meningkat dari Rp 210 miliar menjadi Rp 420 miliar, dengan ketentuan bahwa jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan dirampas untuk negara. Jika harta yang disita tidak mencukupi, masa hukuman Harvey bisa bertambah sepuluh tahun. Denda

sebesar Rp 1 miliar tetap dijatuhkan, namun jika tidak dibayar, masa kurungan juga diperpanjang dari enam bulan menjadi delapan bulan. Harvey terbukti merugikan negara hingga Rp 300 triliun dan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

4. Struktur Retoris

Gambar yang digunakan menunjukkan Harvey Moeis mengenakan kemeja putih, seolah sedang berbicara dengan seseorang. Ekspresi dan posisi tubuh yang mengarah ke orang lain menandakan adanya interaksi atau komunikasi, yang mungkin mencerminkan momen penting dalam proses hukum atau percakapan yang berkaitan dengan kasus yang dihadapinya. Penampilan dengan kemeja putih menambah kesan formal dan serius, sementara tindakan berbicara mengindikasikan situasi yang dinamis dan penuh ketegangan. Berita ini menggunakan kata-kata kuat seperti "vonis diperberat" dan "tidak ada hal yang meringankan" untuk menunjukkan tegasnya keputusan hukum terhadap Harvey Moeis. Metafora seperti "korupsi yang menghambat kesejahteraan masyarakat" dan "menyakiti hati rakyat Indonesia" menggambarkan dampak emosional dan sosial dari tindakan korupsi yang dilakukan Harvey. Frasa seperti "korupsi tidak bisa ditoleransi" menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang tegas dalam kasus korupsi besar. Secara keseluruhan, berita ini memperkuat pesan bahwa penegakan hukum yang lebih tegas adalah langkah yang diperlukan untuk menanggulangi korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

4.2.10. Analisis Berita 10 Kompas.com

Judul : Hukuman Harvey Moeis Diperberat, Pengacara : Innalillahi wa inna ilaihi rajiun

Sumber ; Kompas.com

Tanggal : 13 Februari 2025

Ringkasan : Hukuman Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi tata niaga timah, diperberat menjadi 20 tahun penjara setelah Pengadilan Tinggi

Jakarta menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya, Harvey dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kuasa hukum Harvey, Junaedi Saibih, menyampaikan bahwa hukuman yang diperberat ini mencerminkan telah "wafatnya rule of law" di Indonesia, mengkritik keputusan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Junaedi menekankan pentingnya agar hukum tetap tegak berdasarkan aturan yang berlaku dan bukan berdasarkan tekanan populis. Selain hukuman penjara, uang pengganti yang harus dibayar Harvey meningkat dari Rp 210 miliar menjadi Rp 420 miliar. Jika Harvey tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan, harta bendanya akan dirampas untuk negara, dan jika tidak cukup, masa hukuman bisa bertambah sepuluh tahun.

Tabel 4.10. Analisis Berita 10 Kompas.com

Struktur Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	Headline	Hukuman Harvey Moeis Diperberat, Pengacara : Innalillahi wa inna ilaihi rajiun
	Lead	Kuasa hukum Harvey Moeis, Junaedi Saibih, menilai telah wafatnya <i>rule of law</i> atau prinsip negara hukum yang menjamin keadilan dan supremasi hukum di Indonesia.
	Latar Berita	Latar belakang berita ini berfokus pada reaksi kuasa hukum Harvey Moeis, Junaedi Saibih, terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperberat hukuman kliennya dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga timah. Junaedi menilai bahwa keputusan tersebut mencerminkan "wafatnya rule of law" di Indonesia, mengkritik keputusan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Ia menekankan pentingnya agar hukum tetap tegak berdasarkan aturan yang berlaku dan bukan berdasarkan tekanan populis. Junaedi juga mengingatkan bahwa "ratio legis" (alasan di balik pembuatan undang-undang) seharusnya tidak kalah oleh "ratio populis" (penilaian masyarakat), dan menyebut bahwa penggunaan ketentuan hukum yang salah adalah pembangkangan atas legalitas.
	Kutipan Sumber	Junaedi Saibih (Kuasa hukum Harvey Moeis) 1. "Inalillahi wa inna ilahi rajiun, telah wafat <i>rule fo law</i> pada hari Kamis, 13 Februari 2025, setelah rilisnya bocoran putusan pengadilan tinggi atas banding yang diajukan JPU terhadap putusan PN Jakarta Pusat" 2. "Mohon doanya agar hukum dapat tegak Kembali dan ratio legis tidak boleh kalah oleh ratio populis, apalagi akrobatik hukum atas penggunaan ketentuan hukum yang salah adalah pembangkangan atas legalitas" Teguh Harianto (Ketua Majelis Hakim) "Menjatuhkan pidana kepada Harvey Moeis selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan" "Menghukum uang pengganti Rp 420 miliar"
	Pernyataan Opini	Junaedi Saibih, kuasa hukum Harvey Moeis, menyatakan

Skrip	Penutup	<p>bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperberat hukuman kliennya mencerminkan "wafatnya rule of law" di Indonesia. Ia mengkritik keputusan tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap prinsip negara hukum dan menyampaikan bahwa hukum harus ditegakkan berdasarkan alasan hukum yang rasional (ratio legis), bukan berdasarkan tekanan dari opini masyarakat (ratio populis). Junaedi juga menekankan pentingnya agar ketentuan hukum yang berlaku digunakan dengan benar, dan menyatakan bahwa penyalahgunaan hukum adalah pembangkangan terhadap legalitas.</p>
	<i>What</i>	<p>"Menghukum uang pengganti Rp 420 miliar," kata hakim Teguh Hukuman Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi tata niaga timah, diperberat menjadi 20 tahun penjara setelah Pengadilan Tinggi Jakarta menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum. Kuasa hukum Harvey, Junaedi Saibih, mengkritik keputusan ini sebagai tanda "wafatnya rule of law" di Indonesia.</p>
	<i>Who</i>	<p>Harvey Moeis (terdakwa), Junaedi Saibih (kuasa hukum Harvey Moeis), Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Jakarta, Hakim Teguh Harianto.</p>
	<i>When Where Why</i>	<p>Putusan banding dijatuhkan pada 13 Februari 2025. Pengadilan Tinggi Jakarta.</p>
	<i>How</i>	<p>Junaedi Saibih menilai bahwa keputusan memperberat hukuman Harvey Moeis mencerminkan berakhirnya prinsip negara hukum (rule of law) di Indonesia. Ia juga menyebutkan bahwa hukum harus ditegakkan berdasarkan alasan hukum yang rasional, bukan berdasarkan opini masyarakat (ratio populis). Harvey Moeis dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, uang pengganti yang meningkat menjadi Rp 420 miliar, dan denda Rp 1 miliar setelah banding diterima. Kuasa hukum Harvey mengkritik keputusan tersebut dan mengingatkan bahwa hukum harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, bukan tekanan dari masyarakat.</p>
Tematik	Paragraph, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat,	<p>Berita ini menginformasikan bahwa hukuman Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi tata niaga timah, diperberat menjadi 20 tahun penjara setelah Pengadilan Tinggi Jakarta menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum. Kuasa hukum Harvey, Junaedi Saibih, mengkritik keputusan ini dan menyatakan bahwa hukuman yang diperberat mencerminkan "wafatnya rule of law" di Indonesia. Ia menegaskan bahwa hukum di Indonesia harus ditegakkan berdasarkan aturan yang berlaku dan alasan hukum yang rasional, bukan berdasarkan tekanan dari opini masyarakat atau "ratio populis." Junaedi juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan ketentuan hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap legalitas, dan ia mengajak masyarakat untuk mendoakan agar hukum dapat ditegakkan kembali dengan adil.</p>
Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik, metafora	<p>Gambar yang digunakan adalah sosok Harvey Moeis dari tampak samping menggunakan masker hitam. Berita ini menggunakan kata-kata kuat seperti "wafatnya rule of law" dan "ratio legis tidak boleh kalah oleh ratio populis" untuk menegaskan bahwa keputusan yang memperberat hukuman Harvey Moeis mencerminkan hilangnya keadilan dan supremasi hukum di Indonesia. Metafora seperti "pembangkangan atas legalitas" menggambarkan penyalahgunaan hukum sebagai tindakan yang merusak sistem peradilan yang sah.</p>

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Berita ini menginformasikan bahwa hukuman Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi tata niaga timah, diperberat menjadi 20 tahun penjara setelah Pengadilan Tinggi Jakarta menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum. Kuasa hukum Harvey, Junaedi Saibih, mengkritik keputusan ini dengan menyatakan bahwa hukuman yang diperberat mencerminkan "wafatnya *rule of law*" di Indonesia, yang menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak lagi berjalan berdasarkan prinsip keadilan. Junaedi juga menekankan bahwa hukum harus ditegakkan berdasarkan alasan hukum yang rasional (*ratio legis*) dan bukan berdasarkan tekanan masyarakat (*ratio populis*). Ia mengingatkan bahwa penyalahgunaan ketentuan hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap legalitas. Di akhir, Junaedi mengajak publik untuk mendoakan agar hukum di Indonesia dapat ditegakkan kembali dengan adil dan sesuai aturan yang berlaku.

2. Struktur Skrip

Berita ini menginformasikan bahwa hukuman Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi tata niaga timah, diperberat menjadi 20 tahun penjara setelah Pengadilan Tinggi Jakarta menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum. Kuasa hukum Harvey, Junaedi Saibih, mengkritik keputusan ini dengan menyatakan bahwa hukuman yang diperberat mencerminkan "wafatnya *rule of law*" di Indonesia, yang berarti bahwa sistem hukum Indonesia tidak lagi menegakkan prinsip keadilan yang semestinya. Junaedi juga menekankan pentingnya agar hukum ditegakkan berdasarkan *ratio legis* (alasan hukum yang rasional), bukan tekanan dari *ratio populis* (opini masyarakat). Ia mengingatkan bahwa penyalahgunaan hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap legalitas. Di akhir, Junaedi mengajak publik untuk mendoakan agar hukum di Indonesia dapat ditegakkan kembali dengan adil, sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Skruktur Tematik

Berita ini menginformasikan bahwa hukuman Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi tata niaga timah, diperberat menjadi 20 tahun penjara setelah Pengadilan Tinggi Jakarta menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum. Kuasa hukum Harvey, Junaedi Saibih, mengkritik keputusan ini dengan menyatakan bahwa hukuman yang diperberat mencerminkan "wafatnya rule of law" di Indonesia, yang berarti bahwa prinsip negara hukum yang seharusnya menjamin keadilan tidak lagi ditegakkan. Junaedi menekankan pentingnya hukum yang ditegakkan berdasarkan ratio legis (alasan hukum yang rasional), bukan pada ratio populis (penilaian atau opini masyarakat). Ia mengingatkan bahwa penyalahgunaan hukum akan merusak legalitas dan keadilan. Di akhir, Junaedi mengajak publik untuk mendoakan agar hukum dapat ditegakkan kembali dengan adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Struktur Retoris

Gambar yang digunakan menampilkan sosok Harvey Moeis dari tampak samping, mengenakan masker hitam. Perspektif samping ini memberikan kesan tertutup dan privasi, sementara masker hitam menambah nuansa kerahasiaan dan penutupan identitas. Gambar ini memperkuat kesan bahwa Harvey Moeis berada dalam situasi yang penuh dengan pengawasan dan sorotan publik, namun tetap menjaga jarak emosional dan visual dengan orang lain. Berita ini menginformasikan bahwa hukuman Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi tata niaga timah, diperberat menjadi 20 tahun penjara setelah Pengadilan Tinggi Jakarta menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum. Kuasa hukum Harvey, Junaedi Saibih, mengkritik keputusan tersebut dengan menyatakan bahwa ini mencerminkan "wafatnya rule of law" di Indonesia, yang berarti prinsip negara hukum yang menjamin keadilan kini dianggap hilang. Junaedi juga menekankan bahwa hukum seharusnya ditegakkan berdasarkan "ratio legis" (alasan hukum yang rasional), bukan berdasarkan "ratio populis" (penilaian atau opini masyarakat). Ia menggambarkan bahwa penyalahgunaan hukum

seperti ini adalah bentuk "pembangkangan terhadap legalitas", yang merusak sistem hukum dan keadilan. Junaedi mengajak masyarakat untuk mendoakan agar hukum di Indonesia kembali ditegakkan dengan adil, sesuai dengan aturan yang berlaku.

4.2.11. Analisis Berita 11 Media Indonesia

Judul : Diskon Besar-besaran Vonis Harvey Moeis Hancurkan Keadilan
 Sumber : MediaIndonesia.com
 Tanggal : 29 Desember 2024
 Ringkasan : Pemerhati hukum Yonathan Baskoro menilai vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah tidak berkeadilan. Vonis tersebut dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang meminta 12 tahun penjara. Yonathan menjelaskan bahwa masyarakat cenderung menginginkan hukuman yang setimpal, bahkan hukuman mati, meskipun undang-undang hanya memungkinkan hukuman maksimal seumur hidup. Ia juga mengkritik ketidakpuasan masyarakat terhadap proses hukum yang lambat, seperti eksekusi hukuman mati yang tidak kunjung dilakukan. Yonathan menganggap, meskipun keputusan ini diterima, keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia masih jauh dari harapan, terutama bila melihat stagnasi dalam indeks pemberantasan korupsi (IPK) Indonesia. Pendapat ini juga sejalan dengan kritik dari Mahfud MD yang menyebut vonis tersebut tidak logis dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Tabel 4.11. Analisis Berita 11 MediaIndonesia.com

Struktur Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline</i>	Diskon Besar-besaran Vonis Harvey Moeis Hancurkan Keadilan
	<i>Lead</i>	Pemerhati hukum, Yonathan Baskoro, menilai vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah tidak berkeadilan. Vonis itu setengah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yakni 12 tahun penjara.
	Latar Berita	Pemerhati hukum Yonathan Baskoro menilai vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah, tidak berkeadilan. Vonis tersebut dianggap tidak

memiliki rasa keadilan di tengah masyarakat, mengingat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah 12 tahun penjara. Yonathan menyatakan bahwa masyarakat menginginkan penghakiman yang setimpal, bahkan hukuman mati, meskipun undang-undang hanya memungkinkan hukuman maksimal seumur hidup. Ia juga menyoroti ketidakpuasan masyarakat terhadap proses hukum yang lambat, seperti eksekusi hukuman mati yang tidak kunjung dilakukan. Yonathan menganggap bahwa meskipun keputusan ini diterima, keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia masih jauh dari harapan, terutama bila melihat stagnasi dalam indeks pemberantasan korupsi (IPK) Indonesia. Pendapat ini juga sejalan dengan kritik dari Mahfud MD yang menyebut vonis tersebut tidak logis dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Kutipan Sumber

Yonathan Baskoro (Pemerhati Hukum)

“Tentu dalam hal ini, 6,5 tahun dianggap tidak memiliki rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, ditambah ketakutan masyarakat dan ketidakpercayaan masyarakat akan penegakan hukum maupun hal-hal yang terkait dengan pemberantasan korupsi ini”

Nofriansyah Yosua Hutabarat (Mantan pengacara brigadir)

1. “Sedangkan undang-undang terkait dengan tindak pidana atau pemberantasan korupsi ini maksimal itu hanya seumur hidup”
2. “Nah tentu dalam hal ini, kalau kita melihat dalam perspektif keadilan tentu itu masih cukup jauh dari harapan mas”

Pernyataan Opini

Pernyataan opini dalam berita ini datang dari Yonathan Baskoro, yang mengkritik vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Moeis sebagai keputusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat. Menurutnya, vonis tersebut tidak memuaskan publik karena banyak yang menginginkan hukuman yang lebih setimpal, bahkan hukuman mati, meskipun undang-undang membatasi hukuman maksimal hanya seumur hidup. Yonathan juga menilai bahwa masyarakat seringkali menginginkan hukuman yang cepat, padahal ada proses hukum yang harus dilalui, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Selain itu, ia menyoroti bahwa meskipun ada peningkatan dalam indeks pemberantasan korupsi Indonesia, hasilnya masih jauh dari harapan masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa dengan hukum yang berlaku saat ini, penerapan hukuman mati dalam kasus seperti ini tidak mungkin dilaksanakan.

Penutup

"Nah tentu dalam hal ini, kalau kita melihat dalam perspektif keadilan tentu itu masih cukup jauh dari harapan mas," pungkasnya. (Yon/I-2)

Skrip

What

Vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi tata niaga timah, dianggap tidak berkeadilan oleh pemerhati hukum Yonathan Baskoro. Ia menyebut vonis tersebut tidak memuaskan masyarakat, yang menginginkan hukuman yang lebih berat.

Who

Yonathan Baskoro (pemerhati hukum), Harvey Moeis (terdakwa kasus korupsi), Jaksa Penuntut Umum, Mahfud MD (Mantan Menko Polhukam).

When

29 Desember 2024, Yonathan Baskoro memberikan Pernyataan opini dalam program Crosscheck Medcom.id.

Where

Program Crosscheck Medcom.id, yang merupakan sumber dari wawancara dan pernyataan Yonathan Baskoro.

Why

Yonathan Baskoro mengkritik keputusan vonis 6,5 tahun penjara karena dianggap tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Ia juga menyoroti ketidakpuasan

	<i>How</i>	masyarakat terhadap proses hukum yang lambat dan pengharapan hukuman mati meskipun undang-undang hanya memperbolehkan hukuman maksimal seumur hidup. Yonathan menyarankan agar hukuman yang dijatuhkan terhadap kasus korupsi besar harus sesuai dengan prinsip keadilan yang diinginkan masyarakat, yang cenderung menginginkan hukuman yang lebih berat. Dia juga mengingatkan bahwa hukum Indonesia harus ditegakkan dengan proses yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh opini publik.
Tematik	Paragraph, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat,	Berita ini menghubungkan kritik terhadap vonis ringan terhadap Harvey Moeis dengan pandangan umum masyarakat tentang keadilan yang diinginkan. Kritik terhadap ketidakpuasan publik diperkuat dengan penekanan pada ketidaksempurnaan dalam pemberantasan korupsi dan lambatnya proses hukum yang ada. Semua elemen ini bekerja sama untuk mengungkapkan bahwa sistem peradilan Indonesia masih jauh dari harapan masyarakat dalam hal keadilan dan pemberantasan korupsi.
Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik, metafora	Gambar yang digunakan adalah ilustrasi kartun terdapat 1 koruptor yang sedang menyogok hakim dan seolah hakim akan mengambil uangnya dari bawah meja dan terdapat 2 orang saksi yang sedang tertawa sambil memegang kantung yang berisi uang di belakang kedua saksi.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Berita ini menginformasikan bahwa Yonathan Baskoro, pemerhati hukum, mengkritik vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Moeis yang dianggap tidak berkeadilan. Vonis tersebut dianggap lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta 12 tahun penjara. Yonathan berpendapat bahwa masyarakat menginginkan hukuman yang lebih berat, bahkan hukuman mati, meskipun undang-undang membatasi hukuman maksimal hanya seumur hidup. Ia juga menyoroti ketidakpuasan masyarakat terhadap eksekusi hukuman mati yang lambat serta ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang dianggap tidak memberikan keadilan yang memadai. Menurutnya, meskipun pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan peningkatan, hasil yang dicapai masih jauh dari harapan masyarakat. Yonathan mengingatkan bahwa proses hukum yang panjang, termasuk persidangan, banding, dan eksekusi, mempengaruhi persepsi publik tentang keadilan.

2. Struktur Skrip

Berita ini menginformasikan bahwa pemerhati hukum Yonathan Baskoro

mengkritik vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Moeis yang dianggap tidak berkeadilan. Yonathan menyatakan bahwa vonis tersebut terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta hukuman 12 tahun penjara. Menurutnya, masyarakat cenderung menginginkan hukuman yang lebih tegas, bahkan hukuman mati, meskipun itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yonathan juga menyoroti ketidakpuasan masyarakat terhadap lambatnya eksekusi hukuman dan proses hukum yang panjang, yang sering kali mempengaruhi persepsi publik tentang keadilan. Ia mengingatkan bahwa meskipun pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan beberapa perbaikan, namun hasil yang dicapai masih jauh dari harapan masyarakat. Di akhir, Yonathan mengajak agar proses hukum dijalankan secara transparan dan kecepatan eksekusi hukuman dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

3. Struktur Tematik

Berita ini menginformasikan bahwa Yonathan Baskoro, seorang pemerhati hukum, mengkritik vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah. Yonathan menilai vonis tersebut tidak berkeadilan karena jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang menginginkan hukuman 12 tahun penjara. Menurut Yonathan, dari sudut pandang publik, vonis yang lebih ringan ini tidak akan memuaskan masyarakat, yang justru menginginkan hukuman yang lebih berat, bahkan hukuman mati, meskipun itu tidak diizinkan oleh hukum Indonesia. Ia juga menyoroti ketidakpuasan masyarakat terhadap proses hukum yang lambat, seperti banding, kasasi, dan eksekusi yang tak kunjung dilakukan, yang memengaruhi persepsi publik terhadap efektivitas dan keadilan dalam pemberantasan korupsi. Di akhir, Yonathan mengingatkan bahwa meskipun ada perbaikan dalam pemberantasan korupsi, hasil yang dicapai masih jauh dari harapan masyarakat dan mengajak agar sistem hukum di Indonesia dijalankan lebih transparan dan efisien untuk meningkatkan kepercayaan publik.

4. Struktur Retoris

Gambar yang digunakan adalah ilustrasi kartun yang menggambarkan seorang koruptor sedang menyogok hakim, dengan hakim yang seolah akan mengambil uang dari bawah meja. Di belakang hakim, terdapat dua orang saksi yang tertawa sambil memegang kantung berisi uang. Gambar ini menggunakan metafora visual untuk menggambarkan praktik korupsi yang terjadi di balik layar, dengan simbol uang yang menunjukkan ketidakberesan dalam proses hukum. Ekspresi tertawa dari para saksi menambah kesan ironi dan kecurangan dalam situasi yang seharusnya lebih serius, menggambarkan dampak buruk dari sistem yang tidak transparan. Berita ini menginformasikan bahwa Yonathan Baskoro, seorang pemerhati hukum, mengkritik vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah, yang dianggap tidak berkeadilan.

- Menurut Yonathan, vonis tersebut terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta 12 tahun penjara. Ia menjelaskan bahwa masyarakat menginginkan hukuman yang setimpal, bahkan hukuman mati, meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Yonathan juga menyoroti proses hukum yang panjang dan lambat, yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan hukum. Ia berpendapat bahwa masyarakat menginginkan sistem hukum yang lebih cepat dan keputusan yang lebih adil. Semua elemen ini menggambarkan ketidakpuasan terhadap keputusan yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan yang diinginkan masyarakat, serta harapan agar sistem hukum Indonesia lebih transparan dan efisien dalam menegakkan keadilan.

4.2.12. Analisis Berita 12 Media Indonesia

Judul : Fakta-fakta Vonis Harvey Moeis Hukuman Ringan Karena dianggap Punya Tanggungan Keluarga

Sumber : MediaIndonesia.com

Tanggal : 23 Desember 2024

Ringkasan : Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi dalam pengelolaan

tata niaga timah yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun, dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta hukuman 12 tahun penjara. Majelis hakim mempertimbangkan beberapa faktor dalam penjatuhan hukuman, antara lain sikap sopan Harvey di persidangan, tanggungan keluarganya, dan fakta bahwa ia belum pernah dihukum sebelumnya. Hakim juga menilai bahwa Harvey tidak memiliki peran signifikan dalam kerjasama antara PT Timah Tbk dan PT Refined Bangka Tin (RBT), serta dengan pengusaha smelter lainnya. Kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini termasuk kerugian akibat kerja sama sewa alat pengolahan logam, pembayaran biji timah yang tidak sesuai, dan kerusakan lingkungan. Selain itu, Harvey dan rekannya Helena Lim diduga menerima uang Rp 420 miliar yang digunakan untuk membeli barang-barang mewah, termasuk mobil dan properti. Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding terhadap putusan ini. Dalam berita ini juga disebutkan tentang Sandra Dewi, istri Harvey Moeis, yang dikenal sebagai aktris, model, dan pengusaha. pernikahannya dengan Harvey, yang diadakan secara mewah pada tahun 2016, menarik perhatian media.

Tabel 4.12. Analisis Berita 12

Struktur Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline</i>	Fakta-fakta Vonis Harvey Moeis Hukuman Ringan Karena dianggap Punya Tanggungan Keluarga
	<i>Lead</i>	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memberikan vonis yang jauh lebih ringan terhadap Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi tata niaga timah. Kasus ini menyebabkan kerugian negara yang fantastis, mencapai Rp300 triliun. Harvey dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun 6 bulan, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta hukuman 12 tahun.
	Latar Berita	Kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis, suami aktris Sandra Dewi, terkait pengelolaan tata niaga timah, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun. Pada Desember 2024, Harvey dijatuhi vonis 6,5 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 12 tahun. Vonis ini mendapat kritik, dan Kejaksaan Agung mempertimbangkan untuk mengajukan banding. Selain itu, beberapa barang mewah yang disita,

		<p>seperti tas dan mobil, diduga berasal dari hasil korupsi. Kasus ini menyoroti tantangan dalam pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam Indonesia.</p>
Kutipan Sumber		<p>Eko Aryanto (Ketua majelis hakim, pengadilan negeri Jakarta Pusat) “Sopan di Persidangan, mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa belum pernah dihukum” “Jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa sebagaimana kronologis perkara, maka majelis hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang diajukan penuntut umum terlalu tinggi dan harus dikurangi”</p>
Pernyataan Opini		<p>Pernyataan opini dalam berita ini datang dari Ketua Majelis Hakim Eko Aryanto yang menyatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta 12 tahun penjara untuk Harvey Moeis dianggap terlalu berat. Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan seharusnya lebih rendah karena Harvey tidak memiliki peran yang signifikan dalam kerjasama antara PT Timah Tbk dan PT Refined Bangka Tin (RBT). Hakim juga menilai bahwa vonis yang lebih rendah adalah keputusan yang lebih tepat, mengingat Harvey dianggap sopan di persidangan dan memiliki tanggungan keluarga.</p>
Penutup		<p>Pernikahannya dengan Harvey Moeis pada 2016 menjadi sorotan besar, dengan resepsi mewah yang bahkan menggunakan tema negeri dongeng. Popularitasnya tidak hanya terbatas di layar kaca, tetapi juga di media sosial, di mana ia memiliki jutaan pengikut yang setia mengikuti kesehariannya, mulai dari kehidupan keluarga hingga aktivitas profesionalnya.</p>
Skrip	<i>What</i>	<p>Vonis Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi tata niaga timah, dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dengan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 12 tahun penjara. Vonis ini menyebabkan kontroversi karena kerugian negara yang sangat besar, mencapai Rp300 triliun.</p>
	<i>Who</i>	<p>Harvey Moeis (terdakwa), Jaksa Penuntut Umum (JPU), Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Eko Aryanto (Ketua Majelis Hakim), Sandra Dewi (istri Harvey Moeis).</p>
	<i>When</i>	<p>Senin, 23 Desember 2024</p>
	<i>Where</i>	<p>Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jakarta.</p>
	<i>Why</i>	<p>Vonis dianggap lebih ringan karena Majelis Hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti sikap sopan Harvey di persidangan, tanggungan keluarga, serta fakta bahwa Harvey tidak memiliki peran signifikan dalam kerjasama pengolahan timah antara PT Timah Tbk dan PT Refined Bangka Tin (RBT). Tuntutan jaksa yang lebih berat dianggap terlalu tinggi oleh majelis hakim.</p>
	<i>How</i>	<p>Majelis Hakim memutuskan hukuman lebih rendah setelah mempertimbangkan faktor-faktor meringankan, termasuk peran Harvey yang terbatas dalam kasus tersebut dan tidak ada rekam jejak hukum sebelumnya. Kejaksaan Agung juga mempertimbangkan langkah banding dalam waktu 7 hari setelah putusan tersebut.</p>
Tematik	Paragraph, proposisi,	Berita ini dimulai dengan informasi utama mengenai

	<p>kalimat, hubungan antar kalimat,</p>	<p>vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Moeis, yang dianggap lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menginginkan 12 tahun penjara. Proposisi utama adalah bahwa majelis hakim mempertimbangkan faktor meringankan seperti sikap sopan Harvey di persidangan dan tanggungan keluarganya. Kalimat pendukung menjelaskan alasan hakim yang menilai bahwa tuntutan jaksa terlalu berat, mengingat peran Harvey yang terbatas dalam kasus ini. Hubungan antar kalimat menunjukkan bahwa meskipun kerugian negara sangat besar, hakim merasa hukuman tersebut lebih sesuai dengan kondisi terdakwa, yang juga dihadapkan dengan keputusan hukum yang lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan.</p>
<p>Retoris</p>	<p>Kata, idiom, gambar/foto, grafik, metafora</p>	<p>Gambar yang digunakan adalah sosok Harvey Moeis menggunakan kemeja lalu rompi pink sambil memakai masker hitam. "Vonis yang jauh lebih ringan": Menggunakan kata "jauh lebih ringan" untuk menekankan perbedaan signifikan antara hukuman yang dijatuhkan dan tuntutan jaksa. "Kerugian negara yang fantastis": Istilah "fantastis" digunakan untuk menggambarkan besarnya kerugian negara, yaitu Rp300 triliun, yang kontras dengan vonis yang dijatuhkan. "Tuntutan pidana penjara yang diajukan penuntut umum terlalu tinggi dan harus dikurangi": Pernyataan ini mencerminkan opini hakim yang menilai tuntutan jaksa terlalu berat dan perlu dikurangi. "Harvey dianggap sopan di persidangan": Meskipun tidak secara eksplisit metaforis, penggunaan kata "sopan" memberikan gambaran karakter terdakwa yang dapat mempengaruhi persepsi pembaca terhadapnya.</p>

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dimulai dengan Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun, dijatuhi vonis 6,5 tahun penjara, jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman 12 tahun penjara. Majelis hakim mempertimbangkan beberapa faktor meringankan dalam menjatuhkan vonis, seperti sikap sopan Harvey di persidangan dan tanggungannya terhadap keluarga. Hakim juga menilai bahwa Harvey tidak memiliki peran signifikan dalam kerjasama antara PT Timah Tbk dan PT Refined Bangka Tin (RBT). Kejaksaan Agung menyatakan akan mempertimbangkan untuk mengajukan banding terhadap putusan tersebut, dengan tenggat waktu 7 hari untuk memutuskan langkah hukum selanjutnya.

2. Struktur Skrip

Dimulai dengan *Headline* yang menyebutkan vonis ringan terhadap Harvey Moeis, dilanjutkan dengan *Lead* yang menjelaskan informasi dasar mengenai siapa, apa, kapan, dan di mana. Fakta utama dan penjelasan mengenai alasan hakim memberikan vonis ringan dibahas lebih lanjut, serta ditutup dengan informasi bahwa Kejaksaan Agung sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding. Struktur ini membentuk berita secara logis dan memberikan gambaran yang jelas tentang keputusan yang diambil dalam kasus ini.

3. Struktur Tematik

Berita ini secara jelas menghubungkan berbagai elemen yang menjelaskan keputusan hakim, dengan memberikan alasan tentang faktor-faktor yang meringankan vonis dan mempertimbangkan keputusan banding yang masih akan diambil oleh Kejaksaan Agung. Struktur tematik ini menyusun informasi secara terorganisir, dengan memperkenalkan topik, mengembangkan alasan hakim, dan menutupnya dengan langkah hukum yang dapat diambil selanjutnya.

4. Struktur Retoris

Gambar yang digunakan menampilkan sosok Harvey Moeis mengenakan kemeja dan rompi pink, sambil memakai masker hitam. Penampilan ini menandakan bahwa ia sedang berada dalam pengawasan ketat dan dalam situasi hukum yang serius. Rompi pink memberikan kesan bahwa ia berada dalam tahanan, sementara masker hitam menambah kesan penutupan identitas dan kerahasiaan. Gambar ini menciptakan suasana yang tegang dan formal, mencerminkan situasi yang penuh tekanan yang dihadapi oleh Harvey Moeis. Kata/Idiom "Vonis yang jauh lebih ringan" Kata ini digunakan untuk menekankan perbedaan yang signifikan antara hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dan tuntutan jaksa yang jauh lebih tinggi. "Fantastis" Digunakan untuk menggambarkan kerugian negara yang sangat besar, yaitu Rp 300 triliun, yang kontras dengan vonis ringan yang

dijatuhkan. "Tuntutan pidana penjara yang diajukan penuntut umum terlalu tinggi" Menunjukkan pendapat hakim yang berusaha menjelaskan bahwa hukuman yang diminta oleh jaksa tidak sebanding dengan peran Harvey dalam kasus ini. "Harvey dianggap sopan di persidangan" Meskipun tidak secara eksplisit metaforis, frase ini menggambarkan karakter Harvey yang dilihat positif oleh hakim, yang menjadi salah satu pertimbangan dalam vonis ringan. "Peran yang tidak signifikan" Kalimat ini digunakan untuk menggambarkan bahwa Harvey tidak berperan besar dalam kerjasama yang merugikan negara, mempengaruhi seberapa berat hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Tidak ada gambar atau foto yang disertakan dalam artikel ini. Namun, gambar yang relevan bisa berupa suasana ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau foto Harvey Moeis dalam persidangan untuk memberikan gambaran visual mengenai situasi yang dibahas. Tidak ada grafik yang disertakan dalam berita ini. Namun, grafik yang dapat menggambarkan perbandingan antara vonis yang dijatuhkan, tuntutan jaksa, dan kerugian negara bisa memberikan gambaran yang lebih jelas bagi pembaca tentang ketidaksesuaian hukuman dengan kerugian yang ditimbulkan.

4.2.13. Analisis Berita 13 Media Indonesia

Judul : Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara, KY Analisis Potensi Pelanggaran Etik

Sumber : MediaIndonesia.com Tanggal : 27 Desember 2024

Ringkasan : Komisi Yudisial (KY) sedang mendalami potensi pelanggaran etik yang mungkin dilakukan oleh majelis hakim dalam kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis. Harvey dijatuhi vonis 6,5 tahun penjara, denda Rp1 miliar, dan uang pengganti sebesar Rp210 miliar dalam kasus pengolahan tata niaga timah yang menyebabkan kerugian besar. KY mengungkapkan telah mengikuti seluruh jalannya sidang, termasuk kesaksian para saksi, dan saat ini sedang menganalisis putusan yang telah dikeluarkan. Jika Harvey tidak dapat membayar uang pengganti dalam

waktu satu bulan, ia akan dihukum dengan tambahan penjara selama dua tahun.

Tabel 4.13. Analisis Berita 13 Media Indonesia

Struktur Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline</i>	Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara, KY Analisis Potensi Pelanggaran Etik
	<i>Lead</i>	KOMISI Yudisial (KY) terus mendalami kasus terdakwa Harvey Moeis atas kasus korupsi timah atau pengolahan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Juru Bicara Komisi Yudisial, Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan akan menganalisis potensi pelanggaran etik dari majelis hakim.
	Latar Berita	terkait dengan Komisi Yudisial (KY) yang sedang mendalami potensi pelanggaran etik dalam kasus Harvey Moeis, terdakwa korupsi dalam pengolahan tata niaga timah. Kasus ini menyebabkan kerugian negara yang signifikan. Harvey Moeis dijatuhi vonis 6,5 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp210 miliar. Komisi Yudisial mengikuti seluruh jalannya sidang, termasuk pemeriksaan saksi dan kesaksian ahli, dan kini sedang menganalisis putusan hakim. KY berusaha memastikan apakah ada pelanggaran etik dalam proses persidangan atau keputusan yang diambil oleh majelis hakim dalam perkara tersebut.
	Kutipan Sumber	Mukti Fajar Nur Dewata (Juru Bicara Komisi Yudisial) "Dari data data tersebut sedang dianalisis apakah ada potensi pelanggaran etik dari majelis hakim" "Atas hak inisiatif, KY telah melakukan pemantauan sidang kasus tersebut, diantaranya pada saat kesaksian ahli, saksi ade charhe dan saksi lainnya"
	Pernyataan Opini	Pernyataan opini dalam berita no 13 datang dari Komisi Yudisial (KY) yang menyatakan bahwa mereka sedang "menganalisis potensi pelanggaran etik dari majelis hakim" terkait dengan putusan yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis. KY mengungkapkan bahwa mereka telah mengikuti seluruh proses sidang, termasuk kesaksian saksi dan ahli, serta saat ini sedang mendalami apakah ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menangani kasus tersebut.
	Penutup	Bila tak menyanggupi membayar, maka diganti hukuman penjara tambahan. Yakni, selama dua tahun bui.
	Skrip	<i>What</i>
<i>Who</i>		Komisi Yudisial (KY), Harvey Moeis (terdakwa), Mukti Fajar Nur Dewata (Juru Bicara KY).
<i>When</i>		Proses analisis dan pemantauan sidang oleh KY telah berlangsung dan dilaporkan pada Jumat, 27 Desember 2024
<i>Where</i>		Komisi Yudisial (KY) yang melakukan pemantauan dan analisis kasus di Jakarta, terkait dengan sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
<i>Why</i>		KY mendalami apakah ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh majelis hakim terkait dengan putusan yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah.
<i>How</i>		KY melakukan pemantauan terhadap jalannya sidang,

Tematik	Paragraph, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat,	termasuk kesaksian para ahli dan saksi, dan kini sedang menganalisis putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim. Berita ini dimulai dengan informasi tentang langkah KY yang mendalami potensi pelanggaran etik dalam kasus korupsi Harvey Moeis. Diikuti dengan penjelasan mengenai pemantauan sidang yang dilakukan oleh KY, serta alasan dan proses analisis yang sedang berlangsung. Berita ini diakhiri dengan tindak lanjut dari Kejaksaan Agung yang mempertimbangkan untuk mengajukan banding.
Retoris	Kata, gambar/foto, metafora, idiom, grafik,	Gambar yang digunakan adalah sosok Harvey Moeis menggunakan masker hitam dan rompi seperti sedang berbicara. Berita ini menggunakan elemen-elemen retoris untuk menekankan pentingnya integritas dalam proses peradilan. Dengan menggambarkan langkah KY sebagai upaya objektif dan profesional dalam menilai potensi pelanggaran etik, serta menyoroti reaksi publik terhadap vonis yang dianggap tidak adil, berita ini mengajak pembaca untuk merenungkan keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Komisi Yudisial (KY) sedang mendalami potensi pelanggaran etik yang mungkin dilakukan oleh majelis hakim dalam kasus Harvey Moeis, terdakwa korupsi pengolahan tata niaga timah. Mukti Fajar Nur Dewata, Juru Bicara KY, menyatakan bahwa KY sedang menganalisis potensi pelanggaran etik dari majelis hakim yang menangani kasus ini. KY telah mengikuti seluruh jalannya persidangan, termasuk pemeriksaan saksi dan ahli, dan kini sedang menganalisis keputusan yang diambil oleh hakim. Mukti juga mengungkapkan bahwa KY memantau proses persidangan atas inisiatif mereka sendiri, termasuk saat pemeriksaan saksi ahli dan saksi lainnya, untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran etik dalam persidangan. Komisi Yudisial ingin memastikan bahwa hakim yang menangani kasus ini tetap menjaga independensi dan integritas dalam memutuskan perkara. Berita ini diakhiri dengan informasi bahwa Kejaksaan Agung sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding terhadap putusan yang lebih ringan kepada Harvey Moeis, dan mereka memiliki waktu tujuh hari untuk memutuskan apakah akan menerima putusan hakim atau melanjutkan dengan banding.

2. Struktur Skrip

Berita dimulai dengan *Headline* yang menjelaskan fokus utama, yaitu KY yang menyelidiki potensi pelanggaran etik dalam kasus Harvey Moeis. *Lead* memperkenalkan siapa yang terlibat, apa yang dilakukan, kapan, dan di mana proses ini berlangsung. Selanjutnya, berita memberikan rincian tentang langkah yang diambil oleh KY, penjelasan mengenai penyelidikan yang dilakukan, dan alasan di balik langkah tersebut. Berita ditutup dengan informasi tentang langkah selanjutnya yang diambil oleh Kejaksaan Agung. Struktur ini menyusun berita secara logis dan memberikan gambaran yang jelas mengenai kasus dan proses hukum yang sedang berlangsung.

3. Struktur Tematik

Komisi Yudisial (KY) sedang mendalami potensi pelanggaran etik yang mungkin dilakukan oleh majelis hakim dalam kasus Harvey Moeis, terdakwa korupsi pengolahan tata niaga timah. KY telah mengikuti seluruh jalannya persidangan dan sekarang sedang menganalisis putusan hakim terkait perkara ini. Mukti Fajar Nur Dewata, Juru Bicara KY, mengungkapkan bahwa Komisi Yudisial telah melakukan pemantauan terhadap sidang ini, termasuk pemeriksaan saksi dan ahli yang diajukan selama persidangan. KY melakukan pemantauan dan analisis atas inisiatif mereka sendiri untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran etik yang terjadi dalam proses persidangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas dan independensi hakim yang menangani kasus tersebut. Kejaksaan Agung juga telah menyatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding terhadap putusan hakim yang lebih ringan terhadap Harvey Moeis. Kejaksaan memiliki waktu 7 hari untuk memutuskan apakah mereka akan menerima putusan hakim atau mengajukan banding.

4. Struktur Retoris

Gambar yang digunakan menampilkan sosok Harvey Moeis mengenakan masker hitam dan rompi, seolah sedang berbicara. Posisi ini menunjukkan

adanya interaksi atau komunikasi, mungkin dengan pihak lain terkait proses hukum yang sedang dihadapinya. Masker hitam memberikan kesan tertutupan atau kerahasiaan, sementara rompi tahanan menandakan bahwa ia berada dalam pengawasan ketat. Gambar ini menciptakan kesan tegang dan serius, menggambarkan situasi yang penuh perhatian di sekitar Harvey Moeis. Berita ini menggunakan kata-kata yang menekankan objektivitas, keadilan, dan integritas dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Idiom seperti "menganalisis potensi pelanggaran etik" dan "memantau sidang" menggambarkan proses yang teliti dan penuh perhatian yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Metafora seperti "pentingnya integritas hakim" mempertegas nilai-nilai yang harus dijaga dalam sistem peradilan. Gambar yang menunjukkan Harvey Moeis menggunakan masker hitam dan rompi memberikan kesan visual yang menggambarkan ketegangan dalam persidangan dan proses hukum yang sedang berjalan.

4.2.14. Analisis Berita 14 Media Indonesia

Judul : Jaksa Belum Ambil Sikap Soal Hukuman 6,5 Tahun Penjara Harvey Moeis
Sumber : MediaIndonesia.com
Tanggal : 26 Desember 2024
Ringkasan : Jaksa penuntut umum (JPU) belum memutuskan sikap mereka terhadap putusan vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi pengolahan tata niaga timah. Harvey Moeis, yang merupakan suami artis Sandra Dewi, dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. JPU memiliki waktu tujuh hari untuk memutuskan apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan tersebut. Tuntutan awal dari JPU adalah 12 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar dan uang pengganti Rp 210 miliar. Majelis hakim tetap menjatuhkan uang pengganti sesuai tuntutan, namun hukuman penjara jauh lebih ringan dari yang dituntut. Kerugian negara akibat perbuatan Harvey diperkirakan mencapai Rp 300 triliun, yang meliputi kerugian sewa alat

pengolahan, pembayaran bijih timah, dan kerusakan lingkungan.

Tabel 4.14. Analisis Berita 14 Media Indonesia

Struktur Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline</i>	Jaksa Belum Ambil Sikap Soal Hukuman 6,5 Tahun Penjara Harvey Moeis
	<i>Lead</i>	Jaksa penuntut umum (JPU) belum mengambil sikap atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Harvey Moeis yang dijatuhi hukuman.
	Latar Berita	ringan, yakni 6,5 tahun penjara. Suami artis Sandra Dewi itu adalah salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada 2015-2022. Mengenai putusan vonis ringan terhadap Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi tata niaga timah yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun. Putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 23 Desember 2024. Harvey Moeis, yang merupakan suami artis Sandra Dewi, dijatuhi hukuman penjara selama 6,5 tahun, jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang menginginkan hukuman 12 tahun penjara. Setelah putusan tersebut dibacakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) diberi waktu tujuh hari untuk memutuskan apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan majelis hakim. Kejaksaan Agung juga memberikan keterangan bahwa mereka masih dalam tahap mempertimbangkan sikap yang akan diambil atas putusan tersebut.
	Kutipan Sumber	Harli Siregar (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung) 1. "(Ini) masih dalam waktu masa pikir-pikir. Menurut hukum acara, JPU memiliki waktu tujuh hari setelah putusan pengadilan untuk pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan" 2. "Jadi kita tunggu sikap JPU. Kalau sudah ada, sikap JPU, kita update"
	Pernyataan Opini	Pernyataan opini datang dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, yang menyatakan bahwa "tuntutan pidana penjara yang diajukan JPU dianggap terlalu berat bagi Harvey Moeis". Harli Siregar menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih dalam tahap berpikir apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan tersebut. Harli juga menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan tuntutan, JPU sudah memperhitungkan aspek hukum, termasuk faktor yang memberatkan dan meringankan.
	Penutup	Adapun kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Harvey bersama terdakwa lainnya mencapai Rp300 triliun. Angka itu terdiri dari kemahalan sewa alat penglogaman, yaitu Rp2,284 triliun, pembayaran bijih timah dari IUP Rp26,648 triliun, serta kerusakan lingkungan yang mencapai Rp 271,069 triliun.
Skrip	<i>What</i>	Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum memutuskan

			apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, yang dihukum 6,5 tahun penjara.
	<i>Who</i>		Harvey Moeis (terdakwa), Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar.
	<i>When</i>		Putusan dibacakan pada Senin, 23 Desember 2024, dan JPU memiliki waktu 7 hari untuk mengambil sikap setelah putusan.
	<i>Where</i>		Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
	<i>Why</i>		JPU belum memutuskan sikap karena masih dalam masa pikir-pikir untuk mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding atau menerima vonis ringan yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis.
	<i>How</i>		JPU memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan apakah mereka akan mengajukan banding atau menerima putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, yang lebih ringan dari tuntutan mereka.
Tematik	Paragraph, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat,		Berita ini mengorganisir informasi secara terstruktur, mulai dari pengenalan masalah, penjelasan mengenai keputusan yang diambil oleh majelis hakim, hingga penjelasan tentang sikap yang masih dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian berita ini diakhiri dengan informasi tentang langkah selanjutnya yang mungkin diambil oleh Kejaksaan Agung, yaitu apakah mereka akan mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis.
Retoris	Kata, gambar/foto, grafik, metafora	idiom,	Gambar yang digunakan adalah Harvey Moeis mengenakan rompi tahanan dan menggunakan masker hitam. Kata/Idiom "Belum mengambil sikap": Frase ini digunakan untuk menggambarkan ketidakpastian yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), menciptakan ketegangan antara apakah mereka akan menerima keputusan hakim atau mengajukan banding. "Masih dalam waktu masa pikir-pikir": Menunjukkan bahwa JPU sedang dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan yang masih berlangsung, memberikan kesan bahwa keputusan masih bisa berubah. Metafora dan Gaya Bahasa "Masa pikir-pikir": Frase ini berfungsi sebagai metafora untuk menunjukkan keadaan penuh pertimbangan yang membutuhkan waktu sebelum keputusan akhir diambil. "Tuntutan yang lebih tinggi dari putusan": Menggunakan frasa ini untuk menunjukkan kontras yang jelas antara tuntutan jaksa dan keputusan hakim, yang bisa menimbulkan kesan ketidakpuasan atau ketidakadilan dalam persepsi publik.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Berita ini dimulai dengan informasi utama tentang Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang belum mengambil sikap terhadap putusan Harvey Moeis, terdakwa korupsi pengolahan tata niaga timah. JPU memiliki waktu tujuh hari setelah putusan dibacakan pada Senin, 23 Desember 2024 untuk

memutuskan apakah akan mengajukan banding atau menerima vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa JPU masih dalam masa pikir-pikir dan akan memberikan update setelah mereka memutuskan sikap mereka. JPU sebelumnya menuntut Harvey Moeis dengan hukuman 12 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 210 miliar, yang mana masih dijatuhkan oleh hakim meskipun vonis penjaranya lebih ringan. Harli menambahkan bahwa tuntutan tersebut mempertimbangkan berbagai hal, termasuk faktor yang memberatkan dan meringankan dalam perkara ini. Harvey Moeis dijatuhi hukuman karena melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berujung pada kerugian negara sebesar Rp 300 triliun, termasuk kerugian akibat kegiatan sewa alat pengolahan, pembayaran bijih timah, dan kerusakan lingkungan.

2. Struktur Skrip

Latar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyatakan bahwa meskipun pihak kejaksaan menghormati keputusan hakim, mereka masih dalam proses mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Pernyataan atau Opini Harli Siregar menjelaskan bahwa meskipun vonis 6,5 tahun penjara lebih ringan dari tuntutan 12 tahun penjara, namun JPU masih memperhitungkan berbagai pertimbangan hukum sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Dalam hal ini, mereka akan menilai apakah keputusan hakim sesuai dengan keadilan yang diharapkan. Informasi Tambahan dalam persidangan, JPU menuntut Harvey Moeis dihukum 12 tahun penjara, dengan denda Rp1 miliar, dan uang pengganti Rp 210 miliar, yang semuanya tetap dijatuhkan oleh hakim. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Harvey Moeis mencapai Rp 300 triliun, yang terdiri dari kerugian akibat sewa alat pengolahan, pembayaran bijih timah, serta kerusakan lingkungan. Penutupan berita ini ditutup dengan informasi bahwa JPU akan

memberikan *update* jika mereka sudah memutuskan sikap terkait dengan putusan hakim, apakah mereka akan mengajukan banding atau menerima keputusan tersebut.

3. Struktur Tematik

Berita ini dimulai dengan informasi utama tentang Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang belum memutuskan sikap terkait dengan vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi pengolahan tata niaga timah. JPU diberi waktu tujuh hari setelah putusan pada 23 Desember 2024 untuk memutuskan apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa keputusan tersebut masih dalam masa pikir-pikir, dan mereka akan memberikan update jika sikap sudah diputuskan. Selanjutnya, berita menjelaskan bahwa JPU sebelumnya menuntut Harvey Moeis dengan hukuman 12 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 210 miliar, yang tetap dijatuhkan oleh hakim, meskipun hukuman penjara yang dijatuhkan jauh lebih ringan. Harli Siregar mengungkapkan bahwa pertimbangan dalam tuntutan tersebut didasarkan pada faktor-faktor hukum yang memberatkan dan meringankan. Di sisi lain, berita juga menyampaikan bahwa Harvey Moeis dijatuhi hukuman karena melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun. Berita ini ditutup dengan informasi bahwa JPU akan memberi tahu keputusan mereka mengenai banding dalam waktu dekat.

4. Struktur Retoris

Gambar yang digunakan menampilkan Harvey Moeis mengenakan rompi tahanan dan masker hitam. Penampilan ini menandakan bahwa ia berada dalam pengawasan hukum yang ketat, dengan rompi tahanan sebagai simbol status terdakwa. Masker hitam memberikan kesan penutupan identitas,

menciptakan nuansa kerahasiaan dan tertutupan terhadap publik. Gambar ini mencerminkan situasi yang serius dan penuh dengan tekanan hukum, menggambarkan kondisi Harvey Moeis dalam proses peradilan yang sedang berlangsung. Berita ini menggunakan beberapa elemen retorik untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan membangun ketegangan seputar keputusan hukum terhadap Harvey Moeis. Kata/idiom seperti "belum mengambil sikap" dan "masih dalam waktu masa pikir-pikir" menggambarkan ketidakpastian yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), mempertegas bahwa keputusan yang akan diambil masih dalam tahap evaluasi. Frasa "masih dalam waktu masa pikir-pikir" menciptakan kesan bahwa keputusan tersebut sangat penting dan memerlukan pertimbangan matang sebelum tindakan lebih lanjut diambil. Berita ini juga menciptakan ketegangan dengan menyatakan bahwa JPU memiliki waktu tujuh hari untuk membuat keputusan, yang menunjukkan adanya batas waktu yang jelas dan keputusan yang harus segera diambil. Selain itu, berita ini menggunakan metafora yang dapat ditemukan dalam frase "keputusan masih dalam proses berpikir", yang menggambarkan evaluasi atau pertimbangan hukum yang sedang berlangsung. Ketegangan juga dipicu dengan menyebutkan bahwa JPU mempertimbangkan apakah akan menerima vonis atau mengajukan banding, memberikan gambaran bahwa keputusan ini sangat memengaruhi perjalanan kasus. Gambar yang digunakan adalah foto dari Harvey Moeis yang mengenakan rompi tahanan setelah menjalani sidang, memperkuat citra seriusnya situasi yang dihadapi. Gambar ini memberi visualisasi kepada pembaca tentang status hukum Harvey, menciptakan kesan bahwa dia sedang menjalani proses hukum yang penuh ketegangan. Grafik yang membandingkan tuntutan JPU dengan vonis hakim atau memperlihatkan rincian kerugian negara akan semakin menegaskan ketidakcocokan antara hukuman yang dijatuhkan dan kerugian yang ditimbulkan. Dengan menggunakan kata yang menciptakan ketegangan dan visualisasi yang kuat, berita ini memberikan gambaran yang jelas mengenai proses hukum yang sedang berlangsung, memperlihatkan ketidakpastian dan perubahan keputusan yang akan diambil oleh JPU.

4.2.15. Analisis Berita 15 Media Indonesia

Judul : Kejagung Banding Vonis Ringan Harvey Moeis

Sumber : MediaIndonesia.com

Tanggal : 6 Januari 2025

Ringkasan : Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding atas vonis ringan yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah. Vonis tersebut, yang hanya 6,5 tahun penjara, dianggap tidak mencerminkan keadilan, mengingat kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 300 triliun. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Harli Siregar, menyatakan bahwa langkah banding ini diambil karena tuntutan 12 tahun penjara yang mereka ajukan belum terpenuhi. Meskipun majelis hakim telah menjatuhkan hukuman penjara yang lebih ringan, mereka menilai bahwa denda dan uang pengganti sesuai dengan pertimbangan hukum. Presiden Prabowo Subianto juga mengkritik vonis tersebut, menganggapnya merusak rasa keadilan masyarakat, dan berharap hakim dapat memberikan keputusan yang lebih tegas di tingkat banding.

Tabel 4.15. Analisis Berita 15 Media Indonesia

Struktur Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	Headline	Kejagung Banding Vonis Ringan Harvey Moeis
	Lead	Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding atas vonis ringan terdakwa kasus korupsi timah Harvey Moeis. Langkah banding ini sebagai upaya pemberian keadilan bagi masyarakat.
	Latar Berita	Berkaitan dengan keputusan Kejaksaan Agung yang mengajukan banding atas vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi pengolahan tata niaga timah. Harvey Moeis dijatuhi vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa, yang meminta hukuman 12 tahun penjara. Kasus ini melibatkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai Rp 300 triliun. Presiden Prabowo Subianto turut menyoroti keputusan tersebut, menilai bahwa vonis tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, karena terlalu ringan mengingat besarnya kerugian negara.
	Kutipan Sumber	Harli Siregar (Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum)) 1. "Tuntutan 12 tahun saja belum terpenuhi makanya kita banding" 2. "Penentuan tuntutan 12 tahun dilakukan secara proposional terhadap para terdakwa, karena ada juga yang dibebani uang pengganti yang triliunan" Prabowo (Presiden RI) "Naik banding enggak? Naik banding. Vonisnya 50 tahun kira- kira begitu"

	Pernyataan Opini	Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, yang menyatakan bahwa pihaknya mengajukan banding atas vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Moeis karena tuntutan JPU sebesar 12 tahun penjara belum terpenuhi. Harli Siregar berpendapat bahwa tuntutan tersebut telah disesuaikan secara proporsional dengan pertimbangan hukum yang berlaku, terutama terkait dengan kerugian negara yang sangat besar akibat kasus tersebut. Presiden Prabowo Subianto juga mengkritik vonis tersebut, menyebutnya sebagai keputusan yang merusak rasa keadilan di tengah masyarakat, mengingat kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 300 triliun. Prabowo berharap bahwa penegak hukum, khususnya hakim, dapat memberikan keputusan yang lebih tegas di tingkat banding.
	Penutup	Kemudian, Presiden Prabowo sempat menanyakan sikap Kejaksaan apakah banding atas vonis Harvey Moeis. Setelah mengetahui jaksa mengajukan banding, Prabowo berharap penyelesaian pengadilan tingkat banding bisa lebih tegas. "Naik banding enggak? Naik banding. Vonisnya 50 tahun kira-kira begitu," tukas Prabowo.
Skrip	<i>What</i> <i>Who</i> <i>When</i> <i>Where</i> <i>Why</i> <i>How</i>	<p>Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding atas vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah.</p> <p>Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Siregar (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung), Presiden Prabowo Subianto, dan Harvey Moeis (terdakwa).</p> <p>Banding diajukan setelah putusan vonis pada Senin, 23 Desember 2024, dan Presiden Prabowo mengkritik keputusan pada 6 Januari 2025.</p> <p>Jakarta, Indonesia. Keputusan banding ini berhubungan dengan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.</p> <p>Kejaksaan Agung merasa bahwa vonis 6,5 tahun penjara terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan JPU sebesar 12 tahun dan kerugian negara yang sangat besar, mencapai Rp 300 triliun.</p> <p>Kejaksaan Agung memanfaatkan hak banding yang diberikan oleh hukum, dengan alasan untuk memastikan keadilan dan memberikan hukuman yang setimpal dengan kerugian negara yang besar.</p>
Tematik	Paragraph, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat,	Berita ini dimulai dengan informasi bahwa Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyatakan bahwa banding diajukan karena tuntutan 12 tahun penjara belum terpenuhi. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto mengkritik vonis ringan tersebut, menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan keadilan mengingat kerugian negara sebesar Rp 300 triliun. Berita ini diakhiri dengan penegasan bahwa Kejaksaan Agung masih mempertimbangkan langkah banding untuk memastikan keadilan.
Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik, metafora	Gambar yang digunakan adalah sosok kepala pusat penerangan hukum (Kapuspenkum) kejaksaan Harli Siregar sedang membacakan hasil tuntutan banding atas vonis ringan terdakwa Harvey Moeis mencakup penggunaan kata/idiom seperti "vonis ringan" dan "kerugian negara Rp300 triliun" untuk menyoroti ketidakadilan dalam keputusan hakim. Pernyataan Presiden Prabowo yang mengusulkan vonis lebih berat, "Vonisnya 50 tahun kira-kira begitu," menggunakan hiperbola untuk menggambarkan kekecewaan.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Berita ini dimulai dengan informasi bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding atas vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagsagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa banding diajukan karena tuntutan 12 tahun penjara yang mereka ajukan belum terpenuhi. Dia menegaskan bahwa tuntutan tersebut telah disesuaikan secara proporsional dengan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam perkara ini. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga mengkritik vonis tersebut, menyebutkan bahwa hukuman yang dijatuhkan merusak rasa keadilan mengingat kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun. Prabowo berharap hakim di tingkat banding akan memberikan keputusan yang lebih tegas, bahkan menyarankan hukuman yang lebih berat. Berita ini diakhiri dengan penegasan bahwa Kejaksaan Agung akan memberikan update setelah sikap mereka terkait banding sudah diputuskan.

2. Struktur Skrip

Kejaksaan Agung mengajukan banding terhadap vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, terdakwa korupsi timah, karena dianggap terlalu ringan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagsagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa tuntutan 12 tahun penjara belum terpenuhi. Presiden Prabowo Subianto juga mengkritik vonis tersebut, menilai bahwa keputusan itu merusak rasa keadilan, mengingat kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun, dan berharap hakim di tingkat banding memberikan hukuman lebih tegas. Kejaksaan Agung akan memberikan update setelah sikap JPU terkait banding diputuskan.

3. Struktur Tematik

informasi utama tentang Kejaksaan Agung yang mengajukan banding atas vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis. Keputusan ini diambil karena pihak kejaksaan merasa vonis tersebut terlalu ringan

dibandingkan dengan tuntutan 12 tahun penjara yang mereka ajukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa tuntutan tersebut disesuaikan dengan pertimbangan hukum yang ada. Selanjutnya, berita menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengkritik vonis tersebut dan menganggapnya tidak mencerminkan rasa keadilan, mengingat kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun. Di akhir, berita menegaskan bahwa Kejaksaan Agung akan memberikan update setelah JPU memutuskan sikap mereka terkait banding.

4. Struktur Retoris

Gambar yang digunakan menampilkan sosok Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, sedang membacakan hasil tuntutan banding atas vonis ringan terdakwa Harvey Moeis. Gambar ini menggambarkan kewenangan dan otoritas dalam sistem hukum, dengan Kapuspenkum yang berperan dalam menyampaikan keputusan penting terkait proses hukum yang sedang berlangsung. Tindakan membacakan tuntutan banding ini menunjukkan adanya tindakan lanjutan terhadap vonis yang dianggap tidak sebanding, menandakan ketegasan pihak Kejaksaan Agung untuk memperjuangkan hukuman yang lebih berat. Dalam berita ini, kata dan idiom seperti "vonis ringan" dan "kerugian negara Rp 300 triliun" digunakan untuk menekankan ketidaksesuaian antara hukuman yang dijatuhkan dan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Pernyataan "tuntutan 12 tahun saja belum terpenuhi" memperlihatkan ketidakpuasan terhadap keputusan hakim, yang mendukung alasan mengapa Kejaksaan Agung mengajukan banding. Presiden Prabowo Subianto menggunakan frasa seperti "merusak rasa keadilan" untuk menggambarkan ketidaksetujuan kuat terhadap vonis tersebut, menunjukkan kekecewaan publik karena dianggap tidak adil. Metafora seperti "rasa keadilan" menggambarkan harapan masyarakat agar hukum benar-benar mencerminkan keadilan sosial. Gambar yang digunakan dalam berita ini memperlihatkan Harvey Moeis mengenakan rompi tahanan, memberikan kesan visual yang jelas mengenai status hukum yang dihadapinya. Meskipun berita ini tidak

mencantumkan grafik, angka kerugian negara sebesar Rp 300 triliun bisa divisualisasikan untuk memberi pemahaman yang lebih baik tentang besarnya kerugian dibandingkan dengan vonis yang dijatuhkan. Terakhir, Presiden Prabowo juga menyatakan, "Vonisnya 50 tahun kira-kira begitu," sebagai hiperbola untuk menekankan betapa ringannya vonis yang diberikan dan untuk menggambarkan keinginan agar keputusan di tingkat banding lebih tegas. Semua elemen ini digunakan untuk memperkuat narasi bahwa keputusan hukum yang ada tidak mencerminkan keadilan yang seharusnya diberikan dalam kasus korupsi besar ini.

4.2.16. Analisis Berita 16 Media Indonesia

Judul : Jaksa Akhirnya Ajukan Banding Harvey Moeis, Berapa Tuntutannya?
 Sumber : MediaIndonesia.com
 Tanggal : 1 Januari 2025
 Ringkasan : Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding atas vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi tata niaga timah. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut hukuman 12 tahun penjara, namun majelis hakim hanya memberikan vonis yang lebih ringan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyusun memori banding. Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Pujiyono Suwadi, menyatakan bahwa tuntutan JPU dalam memori banding tetap sama dengan yang diajukan pada persidangan pertama, yaitu 12 tahun penjara, dan hanya putusan pengadilan tingkat pertama yang akan diuji dalam sidang banding.

Tabel 4.16. Analisis Berita 16 Media Indonesia

Struktur Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline</i>	Jaksa Akhirnya Ajukan Banding Harvey Moeis, Berapa Tuntutannya?
	<i>Lead</i>	Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung atau Kejagung telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tipikor terhadap terdakwa kasus korupsi tata niaga timah, Harvey Moeis. Banding diajukan

	Latar Berita	lantaran majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 6,5 tahun kepada Harvey. Keputusan Kejaksaan Agung yang mengajukan banding atas vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah. Sebelumnya, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jaksa Penuntut Umum menuntut vonis 12 tahun penjara, tetapi majelis hakim memberikan hukuman yang lebih ringan. Kejaksaan Agung merasa bahwa vonis tersebut tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung memutuskan untuk mengajukan banding dan tetap mempertahankan tuntutan yang sebelumnya diajukan dalam persidangan pertama.
	Kutipan Sumber	Pujiyono Suwadi (Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak)) "Tuntutannya sama seperti tingkat pertama. Yang diuji dalam sidang banding hanya putusan pengadilan tingkat pertama, bukan buat tuntutan baru"
	Pernyataan Opini	Pujiyono menegaskan bahwa yang akan diuji dalam sidang banding adalah putusan pengadilan tingkat pertama, bukan tuntutan baru. Hal ini menunjukkan bahwa Komjak dan Kejaksaan Agung tetap berpegang pada tuntutan yang dianggap sesuai dengan keadilan, meskipun vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim lebih ringan.
	Penutup	"Tuntutannya sama seperti tingkat pertama. Yang diuji dalam sidang banding hanya putusan pengadilan tingkat pertama, bukan buat tuntutan baru," terang Pujiyono kepada Media Indonesia, Rabu (1/1).
Skrip	<i>What</i>	Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding atas vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah.
	<i>Who</i>	Kejaksaan Agung (Kejagung), Harvey Moeis, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Pujiyono Suwadi (Ketua Komisi Kejaksaan).
	<i>When</i>	Banding diajukan setelah putusan vonis pada Senin, 23 Desember 2024, dan memori banding sedang disusun pada 1 Januari 2025.
	<i>Where</i>	Jakarta, Indonesia, khususnya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan dalam proses banding di pengadilan yang lebih tinggi.
	<i>Why</i>	Kejaksaan Agung mengajukan banding karena vonis 6,5 tahun penjara dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan 12 tahun penjara yang diajukan JPU sebelumnya, dan kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini sangat besar.
	<i>How</i>	Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dengan memori banding yang menyatakan tuntutan yang diajukan pada persidangan pertama tetap berlaku, yaitu 12 tahun penjara.
Tematik	Paragraph, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat,	Artikel ini tentang Kejaksaan Agung yang mengajukan banding atas vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis. Artikel ini memperkenalkan alasan di balik banding tersebut, yaitu karena vonis tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan 12 tahun penjara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kalimat menjelaskan bahwa Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa banding diajukan karena tuntutan yang diajukan JPU belum terpenuhi. Hubungan antar kalimat membantu menjelaskan bagaimana Komisi Kejaksaan (Komjak), melalui Pujiyono Suwadi, menegaskan bahwa tuntutan banding akan tetap sama seperti di pengadilan pertama, yaitu 12 tahun penjara, dan hanya putusan pengadilan

Retoris	Kata, gambar/foto, metafora	idiom, grafik,	tingkat pertama yang akan diuji dalam sidang banding. Gambar yang digunakan dalam berita ini menggambarkan Harvey Moeis mengenakan rompi tahanan, yang memberikan gambaran visual yang kuat mengenai status terdakwa yang sedang menjalani proses hukum. Kata dan Idiom "Vonis ringan": Digunakan untuk menekankan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu Harvey Moeis. "Tuntutan 12 tahun saja belum terpenuhi": Idiom ini menggambarkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak memenuhi harapan jaksa dan dianggap tidak mencerminkan keadilan yang setimpal dengan kerugian negara yang ditimbulkan.
---------	-----------------------------	----------------	--

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah, karena dianggap terlalu ringan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Harli Siregar, menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menuntut 12 tahun penjara, tetapi hakim hanya memberikan hukuman yang lebih ringan. Kejaksaan Agung memutuskan untuk mengajukan banding karena tuntutan yang diberikan JPU belum terpenuhi. Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Pujiyono Suwadi, menyatakan bahwa dalam memori banding, tuntutan yang diajukan tetap sama dengan yang diajukan pada persidangan pertama, yaitu 12 tahun penjara, dan hanya putusan pengadilan tingkat pertama yang akan diuji dalam sidang banding. Berita ini diakhiri dengan penegasan bahwa Kejaksaan Agung akan memberikan pembaruan setelah JPU memutuskan sikap mereka terkait banding dan setelah proses banding berlangsung.

2. Struktur Skrip

Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah. Keputusan ini diambil karena vonis tersebut dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengajukan hukuman 12 tahun penjara. Kapan: Kejaksaan Agung mengajukan banding setelah putusan dijatuhkan pada Senin, 23 Desember 2024. Di mana: Proses

banding ini akan dilakukan di Pengadilan Tinggi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Harli Siregar, menjelaskan bahwa pihak kejaksaan memiliki waktu tujuh hari untuk mengambil sikap, baik mengajukan banding atau menerima putusan hakim. Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Pujiyono Suwadi, menegaskan bahwa dalam memori banding, tuntutan yang diajukan tetap sama dengan yang diajukan pada persidangan pertama, yaitu 12 tahun penjara, dan hanya putusan pengadilan tingkat pertama yang akan diuji dalam sidang banding. Mengapa: Keputusan ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, mengingat kerugian negara yang sangat besar, mencapai Rp 300 triliun. Bagaimana: Kejaksaan Agung akan memberikan pembaruan setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) memutuskan sikap mereka terkait banding dan setelah proses banding berlangsung.

3. Struktur Tematik

Artikel ini dimulai dengan pemberitahuan bahwa Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah, karena dianggap terlalu ringan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyusun memori banding karena tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum terpenuhi, yaitu 12 tahun penjara. Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Pujiyono Suwadi, menegaskan bahwa dalam memori banding, tuntutan JPU tetap sama seperti di pengadilan pertama, yaitu 12 tahun penjara. Struktur berita ini menghubungkan informasi mengenai tuntutan banding dengan tujuan untuk memberi keadilan yang lebih besar bagi masyarakat, mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini. Berita ini ditutup dengan penegasan bahwa Kejaksaan Agung akan memberikan pembaruan setelah proses banding dilanjutkan.

4. Struktur Retoris

Gambar yang digunakan dalam berita ini menggambarkan Harvey Moeis

mengenakan rompi tahanan, memberikan gambaran visual yang kuat mengenai status terdakwa yang sedang menjalani proses hukum. Rompi tahanan ini menandakan bahwa Harvey Moeis berada dalam pengawasan ketat dan menunjukkan keseriusan dari situasi hukum yang sedang dihadapinya. Gambar ini memperkuat citra formalitas dan ketegangan yang terkait dengan proses peradilan yang tengah berlangsung. Dalam berita ini, Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, yang dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan sebelumnya yang menginginkan 12 tahun penjara. Kata-kata seperti "terlalu ringan" digunakan untuk menekankan ketidakadilan yang dirasakan oleh Kejaksaan Agung terkait putusan tersebut. Idiom seperti "memori banding" menggambarkan proses hukum yang lebih lanjut yang dilakukan untuk menguji keputusan yang dianggap tidak setimpal dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Gambar yang digunakan dalam berita ini menggambarkan Harvey Moeis mengenakan rompi tahanan, yang memberikan gambaran visual yang kuat mengenai status terdakwa yang sedang menjalani proses hukum, metafora seperti "mencari keadilan" merujuk pada proses hukum yang bertujuan untuk menyeimbangkan rasa keadilan, yang mengacu pada kerugian negara yang sangat besar. Struktur ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ketidakpuasan terhadap vonis yang dianggap terlalu ringan dan bagaimana upaya Kejaksaan Agung berlanjut melalui proses banding untuk mencapai keadilan yang lebih sesuai dengan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan.

4.2.17. Analisis Berita 17 Media Indonesia

Judul : KY akan Minta Keterangan terkait Dugaan Pelanggaran Etik Hakim yang Vonis Ringan Harvey Moeis

Sumber : MediaIndonesia.com

Tanggal : 7 Januari 2025

Ringkasan : Komisi Yudisial (KY) menerima laporan tentang dugaan

pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang terkait dengan putusan vonis ringan terhadap Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Anggota KY, Joko Sasmito, mengungkapkan bahwa tim pengawasan hakim akan meminta keterangan dari beberapa pihak, termasuk ahli, untuk menilai apakah ada pelanggaran etik dalam putusan tersebut. KY menegaskan bahwa pihaknya akan fokus pada dugaan pelanggaran Kode Etik, namun tidak berwenang mengomentari materi putusan. KY sedang menindaklanjuti laporan tersebut dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung secara informal untuk memproses laporan lebih lanjut.

Tabel 4.17. Analisis Berita 17 Media Indonesia

Struktur Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline</i>	KY akan Minta Keterangan terkait Dugaan Pelanggaran Etik Hakim yang Vonis Ringan Harvey Moeis
	<i>Lead</i>	KOMISI Yudisial (KY) menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Pelanggaran Hakim (KEPPH) hakim yang menjatuhkan vonis ringan terdakwa kasus korupsi timah Harvey Moeis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Joko mengatakan tim pengawasan hakim akan meminta keterangan beberapa pihak, termasuk ahli, untuk melihat apakah ada pelanggaran etik di balik pertimbangan putusan tersebut.
	Latar Berita	Komisi Yudisial (KY) yang menerima laporan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terkait dengan vonis ringan yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, terdakwa dalam kasus korupsi timah. Laporan ini mencuat setelah putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat yang dianggap tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moeis. KY mulai mendalami laporan tersebut dan berencana untuk meminta keterangan dari berbagai pihak, termasuk ahli, guna menilai apakah ada pelanggaran etik di balik pertimbangan putusan hakim tersebut.
	Kutipan Sumber	Joko Sasmito (Anggota Komisi Yudisial (KY)) 1. “Hari seining tanggal 6 jan 2025, ada pelapora yang melaporkan kepada majelis hakim tersebut. Sambil kita nunggu Salinan putusan, karena kita baru terima petikan putusan saja” 2. “ Tentang perkembangan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Pelanggaran Hakim (KEPPH) yang dalam hal ini Majelis Hakim Terdakwa Harvey Moeis, masih kita dalam” “ Koordinasi dengan kejaksaan agung secara informal sudah kita jalin dan komunikasi dengan baik”
	Pernyataan Opini	“Koordinasi dengan kejaksaan agung secara informal sudah kita jalin dan komunikasi dengan baik,” kata Joko.
	Penutup	Anggota Komisi Yudisial (KY), Joko Sasmito, yang menyatakan bahwa KY akan fokus pada dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Skrip	<i>What</i>	(KEPPH) terkait putusan terhadap Harvey Moeis, dan tidak akan mengomentari materi pertimbangan putusan itu sendiri. Joko juga menegaskan bahwa KY sedang menindaklanjuti laporan tersebut dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memproses laporan sesuai prosedur yang berlaku.
	<i>Who</i>	Komisi Yudisial (KY) menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terkait dengan vonis ringan yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis.
	<i>When</i>	Laporan tersebut diterima oleh Komisi Yudisial (KY), dan Joko Sasmito, Anggota KY, memberikan keterangan terkait hal ini.
	<i>Where</i>	Laporan diterima pada Senin, 6 Januari 2025, dan tim KY mulai menyelidiki permasalahan ini pada tanggal tersebut.
	<i>Why</i>	Kasus ini berhubungan dengan putusan yang dijatuhkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
	<i>How</i>	KY menerima laporan karena adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dalam pertimbangan putusan majelis hakim terhadap Harvey Moeis yang dianggap tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi tersebut.
Tematik	Paragraph, proposisi, hubungan antar kalimat,	KY sedang mendalami laporan tersebut dengan meminta keterangan dari beberapa pihak terkait, termasuk ahli, dan berkoordinasi secara informal dengan Kejaksaan Agung. Artikel ini memulai dengan Komisi Yudisial (KY) yang menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terkait dengan vonis ringan terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah. Anggota KY, Joko Sasmito, menjelaskan bahwa pihaknya sedang menganalisis apakah ada pelanggaran etik dari majelis hakim yang menjatuhkan putusan tersebut. KY menegaskan bahwa mereka hanya akan fokus pada dugaan pelanggaran etik dan tidak berwenang mengomentari materi pertimbangan putusan itu. Artikel ini juga menyebutkan bahwa KY telah meminta keterangan dari berbagai pihak, termasuk ahli, untuk mendalami kasus tersebut dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung secara informal. Struktur tematik ini menghubungkan laporan dugaan pelanggaran etik dengan proses pemeriksaan dan tindak lanjut yang sedang dilakukan oleh Komisi Yudisial.
Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik, metafora	Gambar yang digunakan dalam berita ini menggambarkan Harvey Moeis mengenakan rompi tahanan, yang memberikan gambaran visual yang kuat mengenai status terdakwa yang sedang menjalani proses hukum. Berita ini mencakup penggunaan istilah seperti "Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)" yang menekankan pentingnya integritas hakim dalam proses pengadilan. Frasa "fokus pada dugaan pelanggaran" menunjukkan upaya KY untuk objektif dalam menyelidiki masalah tersebut. Metafora seperti "menindaklanjuti laporan" dan "memproses laporan sesuai prosedur yang berlaku" menggambarkan langkah sistematis yang diambil oleh KY untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etik. Meskipun artikel ini tidak mencakup gambar atau grafik, penggunaan kata-kata ini memperkuat kesan bahwa KY sedang menjalankan prosedur hukum dengan hati-hati dan objektif

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Komisi Yudisial (KY) menerima laporan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terkait vonis ringan terhadap Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah. Joko Sasmito, Anggota KY, menjelaskan bahwa pihaknya sedang menganalisis apakah ada pelanggaran etik dalam putusan tersebut. KY menegaskan bahwa mereka hanya akan fokus pada dugaan pelanggaran Kode Etik dan tidak berwenang mengomentari materi putusan itu sendiri. KY sedang menindaklanjuti laporan dengan meminta keterangan dari beberapa pihak terkait, termasuk ahli, untuk menilai apakah ada pelanggaran etik yang terjadi. Proses ini sedang dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan koordinasi informal yang telah dilakukan dengan Kejaksaan Agung.

2. Struktur Skrip

Komisi Yudisial (KY) menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terkait dengan vonis ringan yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah. Laporan ini terkait dengan pertimbangan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan kerugian negara yang timbul akibat tindakan korupsi tersebut. Kapan: Laporan ini diterima pada Senin, 6 Januari 2025, setelah putusan vonis dijatuhkan. Di mana: Laporan diterima di Komisi Yudisial yang berfokus pada dugaan pelanggaran etik dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mengapa: Laporan ini diajukan karena terdapat dugaan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim tidak sebanding dengan kerugian yang timbul, mengingat kasus ini melibatkan kerugian negara yang sangat besar. Bagaimana: KY saat ini sedang mendalami laporan dengan meminta keterangan dari berbagai pihak, termasuk ahli, serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung secara informal untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

3. Struktur Tematik

Artikel ini membahas tindakan Komisi Yudisial (KY) yang menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terkait dengan putusan vonis ringan yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah. Dalam berita ini, dijelaskan bahwa KY sedang mendalami laporan tersebut dengan tujuan untuk menilai apakah ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh majelis hakim yang memutuskan kasus tersebut. Joko Sasmito, Anggota KY, menjelaskan bahwa proses ini mencakup analisis terhadap dugaan pelanggaran etik, namun tidak berwenang untuk menilai materi pertimbangan putusan yang dijatuhkan. KY fokus pada kode etik hakim, yang merupakan isu utama dalam penyelidikan ini. Pihak KY mengonfirmasi bahwa mereka sedang meminta keterangan dari berbagai pihak terkait, termasuk ahli, untuk memastikan apakah putusan tersebut memenuhi standar etik yang diharapkan. Komisi Yudisial juga menegaskan bahwa mereka hanya akan menangani aspek etik dalam putusan hakim dan tidak terlibat dalam menilai atau mengubah materi dari putusan yang telah diambil. Meskipun demikian, KY melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung secara informal untuk memastikan proses penyelidikan berjalan lancar dan sesuai prosedur. Pada bagian akhir artikel, disebutkan bahwa meskipun laporan terkait pelanggaran etik hakim telah diterima, pihak KY masih menunggu salinan putusan yang lengkap untuk melanjutkan proses lebih lanjut. Dalam hal ini, KY memberikan perhatian besar terhadap objektivitas dan independensi hakim dalam menjalankan tugasnya, sehingga diharapkan pelanggaran etik dapat terdeteksi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Struktur ini menyusun informasi secara sistematis dan terorganisir, menghubungkan setiap langkah yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam upaya memproses laporan dugaan pelanggaran etik.

4. Struktur Retoris

Gambar yang digunakan dalam berita ini menggambarkan Harvey Moeis mengenakan rompi tahanan, memberikan gambaran visual yang kuat

mengenai status terdakwa yang sedang menjalani proses hukum. Rompi tahanan ini menandakan bahwa Harvey Moeis berada dalam pengawasan ketat dan menunjukkan keseriusan dari situasi hukum yang sedang dihadapinya. Gambar ini memperkuat citra formalitas dan ketegangan yang terkait dengan proses peradilan yang tengah berlangsung. Artikel ini menggunakan istilah "pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)" untuk menyoroti isu serius tentang integritas hakim yang memutuskan kasus Harvey Moeis. Istilah ini digunakan untuk menegaskan pentingnya kode etik dalam memastikan keadilan dan transparansi dalam sistem hukum. Penyebutan "fokus pada dugaan pelanggaran" menggambarkan niat Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan penyelidikan objektif, menunjukkan bahwa proses ini tidak mencampuri materi putusan yang diambil oleh hakim, tetapi lebih kepada aspek perilaku dan profesionalisme hakim tersebut. Metafora "menindaklanjuti laporan" digunakan untuk menggambarkan upaya KY dalam memproses laporan dengan penuh perhatian dan keseriusan. Hal ini menunjukkan bahwa KY sedang mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran etik dapat diuji dengan seksama. Selain itu, kalimat seperti "Koordinasi dengan Kejaksaan Agung secara informal sudah kita jalin" menggambarkan upaya yang telah dilakukan oleh KY untuk bekerja sama dengan pihak lain demi kelancaran proses penyelidikan. Frasa "meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk ahli" menambahkan bobot objektivitas dan profesionalisme dalam pendekatan KY. Hal ini memberikan gambaran bahwa setiap keputusan yang diambil akan berdasarkan bukti yang jelas dan pendapat dari berbagai pihak yang berkompeten.

4.2.18. Analisis Berita 18 Media Indonesia

Judul : Komisi III DPR Sebut Putusan Banding Harvey Moeis
Tamparan bagi Kejaksaan
Sumber : MediaIndonesia.com

Tanggal : 13 Februari 2025

Ringkasan : Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo, mengkritik vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah, yang meningkatkan hukuman dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara. Rudianto menyebut keputusan ini sebagai tamparan bagi Kejaksaan Agung

(Kejagung), karena tuntutan jaksa hanya 12 tahun, jauh lebih rendah daripada vonis yang dijatuhkan. Ia juga menyoroti polemik dari putusan pengadilan tingkat pertama yang dianggap tidak berkeadilan. Dengan vonis yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa, Rudianto meyakini masyarakat akan merasa bahwa sistem peradilan masih bisa memberikan rasa keadilan, dan hakim dianggap lebih progresif dalam memutuskan perkara korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar.

Tabel 4. 18. Analisis Berita 18

Struktur Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline</i>	Komisi III DPR Sebut Putusan Banding Harvey Moeis Tamparan bagi Kejaksaan
	<i>Lead</i>	Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mengatakan vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jadi tamparan bagi Kejaksaan Agung (Kejagung) atas banding kasus korupsi timah Harvey Moeis. Itu karena tuntutan jaksa lebih rendah.
	Latar Berita	Berita ini membahas kritik dari Rudianto Lallo, anggota Komisi III DPR, terhadap vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah. Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan untuk memperberat hukuman Harvey menjadi 20 tahun penjara, yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang meminta 12 tahun penjara. Sebelumnya, Harvey Moeis hanya dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Vonis yang lebih tinggi di tingkat banding ini menimbulkan polemik dan menjadi sorotan publik, mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis.
	Kutipan Sumber	Rudianto Lallo (Anggota Komisi III DPR) 1. "Ini tamparan bagi kejaksaan, karena kasusnya dihukum 20 tahun padahal tuntutan hanya 12 tahun" 2. "Koreksi bagi hakim tingkat pertama berarti putusnya dianggap tidak berkeadilan" 3. "Karena dengan keberanian hakim yang memutus lebih tinggi dari tuntutan berarti hakim ini sudah dianggap menyelami dan menggali nilai-nilai yang berkembang di masyarakat"
	Pernyataan Opini	Dari Rudianto Lallo, anggota Komisi III DPR, yang menyebut vonis 20 tahun penjara terhadap Harvey Moeis sebagai "tamparan bagi Kejaksaan Agung (Kejagung)" karena tuntutan jaksa yang lebih rendah, yakni 12 tahun penjara. Ia juga menilai bahwa putusan hakim di tingkat pertama, yang menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara kepada

		Harvey, "dianggap tidak berkeadilan", mengingat kerugian negara yang besar akibat kasus tersebut. Rudianto berpendapat bahwa dengan vonis yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa, hakim di tingkat banding "dianggap progresif" dan ini menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan, "masih ada rasa keadilan". Ia menganggap keputusan ini sebagai upaya hakim dalam menyelami dan menggali nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, terutama dalam memutuskan perkara korupsi besar tersebut.
	Penutup	Harvey juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar subsider 2 tahun penjara. Sementara itu, dalam tuntutannya, jaksa ingin Harvey dihukum dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan, plus uang pengganti sejumlah Rp 210 miliar subsider enam tahun penjara.
Skrip	<i>What</i>	Rudianto Lallo, anggota Komisi III DPR, mengkritik vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Harvey Moeis, yang dianggap sebagai tamparan bagi. Kejaksaan Agung karena lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang hanya 12 tahun penjara.
	<i>Who</i>	Rudianto Lallo, anggota Komisi III DPR, memberikan pendapatnya tentang Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah.
	<i>When</i>	Kamis, 13 Februari 2025, setelah putusan banding dijatuhkan
	<i>Where</i>	Komisi III DPR menyampaikan pendapatnya terkait kasus ini setelah vonis banding dijatuhkan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
	<i>Why</i>	Rudianto menganggap putusan hakim yang memperberat vonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa menunjukkan bahwa sistem peradilan masih bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, dan mengoreksi putusan hakim di tingkat pertama yang dianggap tidak berkeadilan.
	<i>How</i>	Rudianto menilai bahwa keputusan hakim yang memperberat hukuman ini mencerminkan keberanian hakim untuk bertindak lebih tegas dan menyuarakan keadilan sesuai dengan perkembangan nilai-nilai yang ada di masyarakat
Tematik	Paragraph, proposisi, hubungan antar kalimat, kalimat,	Artikel ini membahas pendapat Rudianto Lallo, anggota Komisi III DPR, yang memberikan kritik terhadap vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah. Rudianto menilai bahwa keputusan tersebut menjadi "tamparan bagi Kejaksaan Agung", mengingat tuntutan jaksa yang lebih rendah yaitu 12 tahun penjara. Rudianto juga mengkritik putusan di tingkat pertama yang hanya memberikan hukuman 6,5 tahun penjara, yang dianggapnya "tidak berkeadilan" dan terlalu ringan. Ia menegaskan bahwa vonis yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa di tingkat banding menunjukkan bahwa "masih ada rasa keadilan" dalam sistem peradilan Indonesia, dengan hakim dianggap lebih progresif dan mampu menyelami nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Hubungan antar kalimat dalam berita ini menghubungkan pendapat Rudianto mengenai perbedaan vonis, kritik terhadap keputusan hakim tingkat pertama, serta harapan terhadap hakim yang lebih berani dan adil dalam memberikan keputusan terhadap perkara korupsi besar.
Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik, metafora	Gambar yang digunakan adalah foto dari dalam ruangan Komisi III DPR RI dengan 6 anggota didalam fotonya dan beberapa bangku kosong.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Artikel ini dimulai dengan pernyataan Rudianto Lallo, anggota Komisi III DPR, yang memberikan kritik tajam terhadap vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Harvey Moeis. Rudianto menyebutkan bahwa keputusan tersebut adalah "tamparan bagi Kejaksaan Agung" karena vonis yang dijatuhkan lebih tinggi (20 tahun penjara) dibandingkan dengan tuntutan jaksa (12 tahun penjara). Kalimat ini mengungkapkan rasa ketidakpuasan terhadap keputusan pengadilan yang berbeda dengan harapan jaksa. Lalu, artikel ini mengungkapkan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama, yang memberikan vonis 6,5 tahun penjara, dianggap tidak "berkeadilan" oleh Rudianto. Ini menunjukkan bahwa keputusan yang lebih ringan di tingkat pertama memicu kritik publik. Dalam hal ini, Rudianto menambahkan bahwa dengan vonis yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa, hakim di tingkat banding dianggap lebih progresif dalam memberikan keputusan yang lebih adil bagi masyarakat. Selanjutnya, kalimat berikutnya menegaskan bahwa Rudianto melihat bahwa keputusan pengadilan banding ini memberikan rasa keadilan bagi publik, di mana hakim mampu menyelaraskan keputusan dengan perkembangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Artikel ini juga memberikan rincian tentang proses peradilan yang melibatkan Harvey Moeis terkait dengan kasus korupsi timah, yang menyebabkan kerugian negara yang besar. Struktur sintaksis artikel ini mengalir dari kritik terhadap putusan tingkat pertama, menuju penilaian terhadap keputusan banding, dan menghubungkan persepsi masyarakat dengan keputusan hukum yang diambil oleh hakim.

2. Struktur Skrip

Artikel ini membahas kritik tajam dari Rudianto Lallo, anggota Komisi III DPR, yang menganggap vonis 20 tahun penjara terhadap Harvey Moeis oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai "tamparan bagi Kejaksaan Agung". Ini karena vonis banding yang lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan jaksa, yang hanya meminta hukuman 12 tahun penjara. Kapan: Keputusan

ini disampaikan setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan vonis pada 13 Februari 2025. Di mana: Proses ini terjadi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, di mana sidang banding diadakan. Mengapa: Rudianto menilai bahwa vonis yang lebih tinggi ini menunjukkan bahwa pengadilan dapat bertindak lebih tegas dalam menegakkan keadilan, terutama karena kerugian negara yang sangat besar dalam kasus korupsi timah tersebut. Bagaimana: Rudianto melihat keputusan ini sebagai bentuk keberanian hakim untuk memberikan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, yang menginginkan hukuman yang lebih setimpal dengan kerugian negara. Artikel ini juga menyebutkan putusan pengadilan tingkat pertama, yang memberikan vonis 6,5 tahun penjara, yang dianggap "tidak berkeadilan" oleh Rudianto. Siapa: Rudianto Lallo, anggota Komisi III DPR, memberikan pendapatnya tentang putusan banding terhadap Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah. Rudianto berpendapat bahwa dengan vonis yang lebih tinggi di tingkat banding, hakim dianggap lebih progresif dan mampu memberikan keputusan yang memperbaiki kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Artikel ini menghubungkan keputusan hukum dengan persepsi publik yang menginginkan keadilan dan kesesuaian hukuman dengan kerugian yang ditimbulkan.

3. Struktur Tematik

Artikel ini dimulai dengan pendapat Rudianto Lallo, anggota Komisi III DPR, yang memberikan kritik tajam terhadap keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah. Rudianto menyebutkan bahwa vonis ini merupakan "tamparan bagi Kejaksaan Agung" karena vonis banding yang lebih tinggi (20 tahun penjara) dibandingkan dengan tuntutan jaksa (12 tahun penjara). Artikel ini menjelaskan bahwa keputusan ini dianggap menyentak rasa keadilan, terutama karena vonis di tingkat pertama yang hanya memberikan 6,5 tahun penjara. Rudianto menilai bahwa putusan yang lebih rendah di tingkat pertama dianggap tidak berkeadilan dan terlalu ringan. Selanjutnya, artikel menjelaskan bahwa dengan vonis yang lebih

tinggi di tingkat banding, hakim dianggap lebih progresif dan menyelaraskan keputusan dengan perkembangan nilai-nilai masyarakat, yang menginginkan hukuman yang lebih setimpal dengan kerugian negara yang besar. Artikel ini kemudian menghubungkan putusan banding dengan keinginan masyarakat untuk melihat keadilan ditegakkan dengan lebih tegas terhadap kasus-kasus korupsi besar. Hubungan antar kalimat dalam berita ini menggambarkan pendapat Rudianto yang mengkritik keputusan tingkat pertama, lalu dilanjutkan dengan penilaian positif terhadap putusan banding, serta harapan masyarakat agar sistem peradilan dapat lebih responsif terhadap tuntutan keadilan dalam kasus-kasus besar.

4. Struktur Retoris

Gambar yang digunakan adalah foto dari dalam ruangan Komisi III DPR RI, memperlihatkan enam anggota yang hadir di dalam foto, dengan beberapa bangku kosong di sekitarnya. Gambar ini menciptakan kesan bahwa pertemuan atau rapat sedang berlangsung, namun dengan beberapa kehadiran yang terbatas atau ketidakhadiran anggota lainnya. Kehadiran anggota yang terlihat menandakan adanya partisipasi aktif dalam diskusi atau proses yang sedang berlangsung di Komisi III, sementara bangku kosong memberikan nuansa ketegangan atau ketidaklengkapan dalam proses tersebut. Artikel ini mengkritik keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Harvey Moeis, yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang hanya meminta 12 tahun penjara. Rudianto Lallo, anggota Komisi III DPR, menyebutkan bahwa ini adalah "tamparan bagi Kejaksaan Agung", menggambarkan tekanan pada pihak Kejaksaan atas keputusan ini. Artikel juga menyoroti bahwa vonis 6,5 tahun penjara di tingkat pertama dianggap "tidak berkeadilan", dan keputusan banding dianggap lebih progresif. Gambar yang digunakan adalah foto dalam ruangan Komisi III DPR RI, menunjukkan 6 anggota DPR dengan beberapa bangku kosong, yang menambah konteks bahwa meskipun ada kritik, masih ada banyak ruang untuk perbaikan dalam sistem peradilan Indonesia.

4.2.19. Analisis Berita 19 Media Indonesia

Judul : Vonis Harvey Moeis di Perberat Menjadi 20 Tahun Penjara
 Sumber : MediaIndonesia.com
 Tanggal : 13 Februari 2025
 Ringkasan : Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah menjadi 20 tahun penjara. Sebelumnya, ia dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, yang dinilai tidak setimpal dengan kerugian negara sebesar Rp300 triliun. Selain hukuman penjara, Harvey Moeis juga dikenakan denda sebesar Rp1 miliar dan uang pengganti yang meningkat dari Rp210 miliar menjadi Rp420 miliar. Majelis hakim menilai Harvey tidak mendukung pemberantasan korupsi dan menyakiti hati masyarakat. Sebelumnya, jaksa mengajukan banding atas vonis ringan yang dijatuhkan di tingkat pertama. Proses banding juga akan dilakukan terhadap Helena Lim, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, dan Suparta.

Tabel 4.19. Analisis Berita 19 Media Indonesia

Struktur Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline</i>	Vonis Harvey Moeis di Perberat Menjadi 20 Tahun Penjara
	<i>Lead</i>	Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis hukuman Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara. Majelis menyatakan Harvey terbukti bersalah melakukan korupsi kasus Timah yang menyebabkan kerugian negara Rp300 triliun.
	Latar Berita	Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat vonis Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah, menjadikannya 20 tahun penjara, lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya 12 tahun. Sebelumnya, Harvey dijatuhi 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dianggap tidak setimpal dengan kerugian negara yang mencapai Rp300 triliun. Keputusan banding ini juga diikuti dengan penambahan denda dan uang pengganti.
	Kutipan Sumber	Teguh Harianto (Ketua Majelis Hakim) “Menjatuhkan terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda Rp 1 miliar”
	Pernyataan Opini	Pernyataan opini dari penulis artikel adalah “dia sudah menyakiti hati masyarakat karena terlibat kasus korupsi komoditas timah”
	Penutup	Kemudian, Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT), Suparta, dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah.
Skrip	<i>What</i>	Vonis terhadap Harvey Moeis diperberat menjadi 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
	<i>Who</i>	Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah, serta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memutuskan banding.

	<i>When</i>	13 Februari 2025
	<i>Where</i>	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
	<i>Why</i>	Vonis diperberat karena Harvey Moeis terbukti menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, yaitu Rp 300 triliun, dan tidak mendukung pemberantasan korupsi.
	<i>How</i>	Majelis hakim mengubah vonis dengan menambah hukuman pidana, denda, dan uang pengganti yang sebelumnya lebih ringan.
Tematik	Paragraph, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat,	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara dalam kasus korupsi timah, yang menyebabkan kerugian negara Rp 300 triliun. Sebelumnya, vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya 6,5 tahun, yang dianggap tidak setimpal dengan kerugian besar yang ditimbulkan. Majelis hakim banding memutuskan hukuman lebih berat karena Harvey dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi dan telah menyakiti hati masyarakat. Selain pidana penjara, Harvey juga diwajibkan membayar denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp420 miliar. Keputusan ini mencerminkan adanya upaya untuk memberikan keadilan yang lebih sesuai dengan dampak sosial yang ditimbulkan dari tindakannya.
Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik, metafora	Gambar yang digunakan adalah Harvey Moeis mengenakan kemeja putih sedang duduk didalam ruang pengadilan.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis hukuman Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara. Majelis menyatakan bahwa Harvey terbukti bersalah melakukan korupsi kasus Timah yang menyebabkan kerugian negara Rp300 triliun. Putusan itu dibacakan dalam sidang banding yang diketuai Teguh Harianto, dengan anggota Budi Susilo, Catur Iriantoro, Anthon Saragih, dan Hotma Maya Marbun. “Menjatuhkan terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda Rp1 miliar,” kata Teguh di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Kamis (13/2), selain menjatuhkan pidana penjara dan denda, majelis hakim banding juga menggandakan hukuman pidana pengganti Harvey Moeis dari Rp210 miliar menjadi Rp420 miliar. Pertimbangan yang memberatkan adalah fakta bahwa Harvey tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan telah mengecewakan masyarakat karena terlibat dalam kasus korupsi terkait komoditas timah. Vonis terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi pengelolaan timah sebelumnya menuai perhatian publik karena dianggap

tidak sebanding. Jaksa telah mengajukan banding atas vonis tersebut, yang sebelumnya menuntut 12 tahun penjara untuk Harvey Moeis, namun vonis yang dijatuhkan lebih ringan, yakni 6,5 tahun. Selain itu, pembacaan putusan banding juga akan dilakukan untuk pemilik perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange (QSE), Helena Lim, serta mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.

2. Struktur Skrip

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengubah keputusan pengadilan pertama dengan memperberat vonis Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara atas tindak pidana korupsi timah yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun. Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah yang terlibat dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk, dijatuhkan vonis 20 tahun penjara, lebih tinggi daripada tuntutan jaksa yang hanya 12 tahun penjara. Vonis ini dibacakan pada Kamis, 13 Februari 2025, dalam sidang banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Majelis hakim menilai bahwa Harvey Moeis tidak mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia dan tindakannya menyebabkan kerugian sosial besar bagi masyarakat, oleh karena itu vonisnya diperberat. Putusan banding memperberat hukuman dan juga menambah uang pengganti dari Rp210 miliar menjadi Rp420 miliar. Vonis terhadap Harvey Moeis sebelumnya hanya 6,5 tahun penjara dan dianggap tidak setimpal dengan kerugian besar yang ditimbulkan oleh tindakannya. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Selain itu, Harvey juga diwajibkan membayar denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp420 miliar. Majelis hakim di tingkat banding juga menilai bahwa Harvey telah menyakiti hati masyarakat karena keterlibatannya dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara secara signifikan. Keputusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan berusaha memberikan keadilan yang lebih sesuai dengan dampak sosial yang ditimbulkan dari tindakan kriminal besar tersebut.

3. Struktur Tematik

Dimulai dengan paragraf pembuka: Berita ini dimulai dengan pengumuman bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara. Di sini, fokus utama adalah pada keputusan banding yang memperberat hukuman terdakwa dalam kasus korupsi timah yang menyebabkan kerugian negara Rp300 triliun. Proposisi: Majelis hakim di tingkat banding menguatkan keputusan dengan menjatuhkan hukuman lebih berat karena Harvey Moeis dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia dan telah menyakiti hati masyarakat. Hal ini menjadi alasan dalam memperberat vonis yang dijatuhkan sebelumnya, yakni 6,5 tahun penjara. Kalimat Penjelas: Setelah menjelaskan vonis baru yang dijatuhkan, berita ini melanjutkan dengan menyebutkan rincian hukuman, termasuk denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp420 miliar. Ada juga perbandingan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya mengajukan 12 tahun penjara, tetapi putusan akhir lebih berat. Hubungan Antar Kalimat: Setiap kalimat disusun dengan alur yang jelas, dimulai dengan keputusan hukuman yang lebih berat di pengadilan banding, diikuti dengan alasan mengapa hukuman tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Selanjutnya, dijelaskan dampak sosial dari kasus ini, yaitu kerugian yang ditimbulkan pada masyarakat. Artikel ini juga menyoroti bahwa vonis terhadap Harvey Moeis memicu perhatian masyarakat yang merasa bahwa hukuman 6,5 tahun tidak setimpal dengan kerugian besar yang ditimbulkan oleh tindakannya.

4. Struktur Retoris

Gambar yang digunakan menunjukkan Harvey Moeis mengenakan kemeja putih, sedang duduk di dalam ruang pengadilan. Penampilannya yang rapi dengan kemeja putih menciptakan kesan formalitas dan keseriusan dalam menghadapi proses hukum. Posisi duduknya di ruang pengadilan menandakan bahwa ia tengah berada dalam tahap pembacaan putusan atau proses hukum lainnya, memperkuat suasana yang penuh dengan tekanan dan ketegangan. Kata-kata seperti "menjatuhkan pidana" dan "denda"

menggambarkan tindakan tegas yang diambil oleh majelis hakim untuk memberi sanksi kepada terdakwa. Istilah "sakit hati masyarakat" digunakan untuk menunjukkan dampak emosional yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moeis, menggambarkan perasaan ketidakadilan yang dirasakan oleh publik. Sebagai metafora, kata "menjatuhkan pidana" bisa dipahami sebagai keputusan pengadilan yang tak hanya mencerminkan hukum, tetapi juga sebagai penegasan akan keadilan yang diterapkan. Dari segi gambar, foto yang relevan mungkin mencakup gambar ruang sidang Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atau potret Harvey Moeis di ruang pengadilan, yang menambah dimensi visual pada proses hukum yang sedang berlangsung. Artikel ini menghubungkan kalimat satu dengan lainnya untuk memperjelas alasan di balik peningkatan vonis dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat pada sistem hukum.

4.2.20. Analisis Berita 20 Media Indonesia

Judul : Hukuman Harvey Moeis Jadi 20 Tahun, Pengacara :
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun
Sumber : MediaIndonesia.com
Tanggal : 13 Februari 2025
Ringkasan : Ketidakpuasan penasihat hukum Harvey Moeis, Junaedi Saibih, terhadap vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta atas kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah. Junaedi mengkritik hakim karena tidak mempertimbangkan asas hukum yang jelas (ratio legis) dan lebih mengutamakan kepentingan publik (ratio populis). Ia menyebutkan bahwa kliennya hanya terlibat dalam diskusi bisnis yang berakhir dengan keuntungan untuk PT Timah. Pakar hukum Saiful Anam juga menganggap vonis tersebut terlalu berat, karena kerugian yang dituduhkan tidak bersifat riil dan tidak dapat dihitung dengan jelas. Meskipun Harvey Moeis telah divonis lebih ringan di tingkat pertama (6,5 tahun penjara), vonis banding akhirnya memperberat hukuman menjadi 20 tahun penjara, tambahan denda dan uang pengganti yang lebih tinggi.

Tabel 4.20. Analisis Berita 20 Media Indonesia

Struktur Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline</i>	Hukuman Harvey Moeis Jadi 20 Tahun, Pengacara : Innalillahi wa inna ilaihi rajiun
	<i>Lead</i>	Penasihat Hukum Harvey Moeis, Junaedi Saibih mengaku kecewa vonis 20 tahun penjara terhadap kliennya terkait kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk 2015-2022 yang dijatuhkan di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.
	Latar Berita	berkaitan dengan vonis yang diterima oleh Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah di PT Timah Tbk, yang awalnya dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonisnya menjadi 20 tahun penjara, serta menambah denda dan uang pengganti yang harus dibayar. Keputusan tersebut memicu reaksi dari penasihat hukum Harvey, Junaedi Saibih, yang mengkritik keputusan tersebut dan menyebut bahwa hakim lebih mengutamakan kepentingan publik daripada asas hukum yang jelas. Selain itu, pakar hukum Saiful Anam juga menilai vonis tersebut tidak adil karena kerugian yang
	Kutipan Sumber	dituduhkan bersifat potensial dan tidak riil. Junaedi Saibih (Penasihat Hukum Harvey Moeis) 1. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah wafat <i>Rule of Law</i> pada hari Kamis, 13 Februari 2025, setelah rilisnya bocoran putusan pengadilan tinggi" 2. "Akrobatik hukum atas penggunaan ketentuan hukum yang salah adalah pembangkangan atas legalitas" 3. "Terbukti produksi PT Timah meningkat dan perusahaan tersebut untung hingga Rp1 triliun" Saiful Anam (Pakar Hukum Universitas Sahid) 1. "Jadi kerugian yang bersifat potensial tidak jelas berapa, jumlahnya pun tidak dapat ditentukan berapa, sehingga tidak adil jika yang bersangkutan dikenakan hukuman sampai dengan 20 tahun." 2. "Jangan sampai seseorang yang tidak melakukan tindak pidana dan tidak merugikan siapa pun dipaksa untuk mempertanggungjawabkannya"
	Pernyataan Opini	Junaedi Saibih (Penasihat Hukum Harvey Moeis) mengatakan, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah wafat <i>Rule of Law</i> pada hari Kamis, 13 Februari 2025, setelah rilisnya bocoran putusan pengadilan tinggi." Junaedi juga mengkritik keputusan hakim yang menurutnya lebih mengedepankan ratio populis (kepentingan publik) daripada ratio legis (asas hukum), dan menyebut adanya "akrobatik hukum" atas penggunaan ketentuan hukum yang salah, yang ia anggap sebagai pembangkangan atas legalitas. Saiful Anam (Pakar Hukum Universitas Sahid) berpendapat bahwa vonis 20 tahun penjara terhadap Harvey Moeis adalah "terlalu berat." Ia juga menyatakan bahwa kerugian yang dituduhkan kepada Harvey adalah bersifat potensial, bukan riil, dan sulit untuk menentukan jumlah pastinya. Saiful menegaskan bahwa pengadilan harus berimbang dalam mempertimbangkan kesalahan dan perbuatan yang dilakukan, agar tidak ada seseorang yang dihukum atas sesuatu yang tidak mereka lakukan atau
	Penutup	yang tidak merugikan siapa pun. Sementara itu, dalam tuntutananya, jaksa ingin Harvey

Skrip	<i>What</i>	dihukum dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan, plus uang pengganti sejumlah Rp 210 miliar subsider enam tahun penjara.
	<i>Who</i>	Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperberat vonis Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah. Selain itu, Harvey juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp420 miliar.
	<i>When</i>	Harvey Moeis, Penasihat Hukum Harvey Moeis (Junaedi Saibih), Pakar Hukum Universitas Sahid (Saiful Anam).
	<i>Where</i>	Vonis diperberat pada 13 Februari 2025 oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Pernyataan opini dan kritik datang pada 13 Februari 2025 setelah pembacaan putusan.
	<i>Why</i>	Pengadilan Tinggi Jakarta, Jakarta Vonis diperberat karena perbuatan Harvey Moeis dinilai sangat merugikan masyarakat dan pemerintah. Keputusan ini juga merespons tuntutan masyarakat dan perhatian publik terhadap keputusan vonis yang lebih ringan sebelumnya.
Tematik	<i>How</i>	Pengadilan Tinggi Jakarta melakukan pembacaan putusan banding dan memperberat hukuman dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara. Pakar hukum dan penasihat hukum mengkritik keputusan ini, dengan alasan bahwa vonis tersebut terlalu berat dan tidak adil dalam konteks kerugian yang dituduhkan.
	Paragraph, proposisi, hubungan kalimat, kalimat, kalimat, antar kalimat,	Artikel ini membahas vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta kepada Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah, yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa 12 tahun. Penasihat hukum Harvey, Junaedi Saibih, mengkritik keputusan tersebut, menganggap hakim lebih mengedepankan ratio populis ketimbang asas hukum yang jelas. Pakar hukum, Saiful Anam, juga menilai vonis tersebut tidak adil karena kerugian yang dituduhkan bersifat potensial. Keputusan ini menimbulkan perdebatan terkait keadilan dalam sistem hukum Indonesia.
Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik, metafora	Gambar yang digunakan adalah sosok ketua majelis hakim sedang membacakan hasil sidang, di dalam ruangan sidang lalu di depannya ada seperti kamera yang sedang merekam keberlangsungan selama sidang berjalan.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Penasihat Hukum Harvey Moeis, Junaedi Saibih, menyatakan kekecewaannya atas vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan kepada kliennya terkait kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk pada periode 2015-2022 oleh Pengadilan Tinggi Jakarta di tingkat banding. Junaedi menilai hakim tidak mempertimbangkan asas hukum (ratio legis) dan lebih

mengutamakan kepentingan publik (ratio populis). "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggalnya Rule of Law pada hari Kamis, 13 Februari 2025, setelah bocornya putusan pengadilan tinggi," ujar Junaedi dalam keterangannya, Kamis (13/2). "Akrobatik hukum dalam penerapan ketentuan hukum yang salah adalah bentuk pembangkangan terhadap legalitas," tambahnya. Junaedi menjelaskan bahwa dalam kasus ini, kliennya hanya terlibat dalam diskusi terkait rencana bisnis PT Timah dengan pihak swasta untuk meningkatkan produksi, yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan. "Terbukti produksi PT Timah meningkat dan perusahaan tersebut meraup keuntungan hingga Rp1 triliun," kata Junaedi. Sementara itu, Pakar Hukum Universitas Sahid, Saiful Anam, berpendapat bahwa vonis 20 tahun penjara terhadap Harvey Moeis terlalu berat. Ia menilai kerugian yang dituduhkan masih bersifat potensial dan tidak bersifat riil. "Kerugian yang bersifat potensial tidak jelas berapa, jumlahnya pun tidak bisa dipastikan, sehingga tidak adil jika ia dijatuhi hukuman hingga 20 tahun," ujarnya, Kamis (13/2). Saiful menjelaskan bahwa dalam hukum pidana terdapat prinsip Lex Scripta dan Lex Certa, yang mengharuskan rumusan delik pidana harus jelas dan tertulis. Ia juga menekankan bahwa pengadilan harus objektif dalam mempertimbangkan kesalahan dan perbuatan yang dilakukan. "Jangan sampai seseorang yang tidak melakukan tindak pidana dan tidak merugikan siapa pun dipaksa untuk bertanggung jawab,"

2. Struktur Skrip

Penasihat hukum Harvey Moeis, Junaedi Saibih, mengungkapkan rasa kecewa atas vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta terkait dengan kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah. Junaedi menilai hakim lebih mengutamakan ratio populis (kepentingan publik) dibandingkan ratio legis (asas hukum). Vonis tersebut dianggap tidak adil karena menurut Junaedi, Harvey hanya terlibat dalam diskusi untuk meningkatkan produksi PT Timah, yang terbukti menghasilkan keuntungan hingga Rp 1 triliun. Selain itu, pakar hukum Saiful Anam juga menyatakan

bahwa kerugian yang disebutkan dalam kasus ini masih bersifat potensial dan tidak dapat dihitung secara pasti, sehingga menjadikan vonis 20 tahun penjara tidak adil. Sebelumnya, Harvey divonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, di tingkat banding, vonisnya diperberat menjadi 20 tahun penjara, dengan tambahan uang pengganti Rp 420 miliar.

3. Struktur Tematik

Artikel ini membahas keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperberat vonis terhadap Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah. Pada awalnya, Harvey hanya divonis 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun setelah banding, hukuman tersebut diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hal ini menuai kritik dari penasihat hukum Harvey, Junaedi Saibih, yang merasa kecewa karena vonis tersebut dianggap tidak mempertimbangkan prinsip ratio legis dan lebih mengutamakan ratio populis. Selain itu, pakar hukum Saiful Anam juga mengkritik vonis tersebut, menilai bahwa kerugian yang dituduhkan tidak riil dan tidak sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan. Artikel ini juga menjelaskan bahwa meskipun Harvey dijatuhi hukuman berat, ia tetap diwajibkan membayar denda dan uang pengganti yang sangat besar. Keputusan ini memicu perdebatan mengenai keadilan dalam sistem hukum Indonesia, terutama terkait dengan pertimbangan dalam vonis dan apakah hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang terjadi.

4. Struktur Retoris

Gambar yang digunakan menampilkan sosok ketua majelis hakim sedang membacakan hasil sidang di dalam ruangan sidang, dengan kamera yang sedang merekam jalannya persidangan di depannya. Gambar ini menunjukkan proses peradilan yang terbuka, dengan kamera sebagai simbol transparansi dan pengawasan publik terhadap jalannya sidang. Tindakan hakim yang membacakan hasil sidang menekankan keseriusan dan

formalitas dalam proses hukum, sementara keberadaan kamera memperkuat kesan bahwa sidang tersebut sedang dokumentasi dan diawasi secara publik. Dalam berita ini, struktur retorik yang digunakan mengarah pada penggunaan ekspresi emosional dan kritik terhadap sistem hukum yang dianggap tidak adil. Penasihat hukum Harvey Moeis, Junaedi Saibih, mengungkapkan kekecewaannya dengan mengutip frasa "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun" untuk menekankan rasa keprihatinannya atas keputusan yang dianggap membelakangi asas hukum (*ratio legis*) dan lebih mengutamakan pendapat publik (*ratio populi*). Junaedi mengkritik hakim yang, menurutnya, salah dalam menggunakan ketentuan hukum dan melanggar legalitas yang berlaku. Dia juga menyatakan bahwa dalam kasus ini, Harvey Moeis hanya terlibat dalam diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi PT Timah yang akhirnya menghasilkan keuntungan besar. Kemudian, Saiful Anam, seorang pakar hukum dari Universitas Sahid, juga memberikan kritik serupa, menilai bahwa kerugian negara yang diungkapkan dalam perkara ini bersifat potensial dan tidak jelas, yang berarti penjatuhan vonis 20 tahun penjara terhadap Harvey dianggap tidak proporsional dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang jelas (*Lex Scripta* dan *Lex Certa*). Saiful menegaskan bahwa pengadilan harus lebih bijak dalam mempertimbangkan kesalahan dan perbuatan yang dilakukan terdakwa, agar hukum tidak menjadi alat untuk menindas pihak yang seharusnya tidak terbukti bersalah. Sebelumnya, Harvey Moeis divonis dengan hukuman 6,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, namun keputusan tersebut kemudian dibatalkan dan vonisnya diperberat menjadi 20 tahun penjara dengan tambahan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp420 miliar di Pengadilan Tinggi Jakarta.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Hasil Analisis *Framing* Pemberitaan Sidang Vonis Kasus Korupsi Harvey Moeis Pada Kompas.com dan MediaIndonesia.com

Peneliti telah mendapatkan hasil analisis dari beberapa perbedaan terhadap gaya penulisan berita mengenai sidang vonis kasus korupsi Harvey Moeis pada media Kompas.com dan MediaIndonesia.com seperti Kompas.com dalam pemberitaannya mengenai kasus vonis Harvey Moeis lebih menekankan pada ketidakpuasan publik terhadap keputusan hakim yang dianggap tidak adil. Pemberitaan ini berfokus pada fakta bahwa meskipun kerugian negara mencapai Rp 300 triliun, vonis yang dijatuhkan pada Harvey Moeis hanya 6,5 tahun penjara, yang jelas jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta 12 tahun. Artikel ini juga mengutip komentar dari sejumlah tokoh publik, seperti Mahfud MD dan pakar hukum, yang menyoroti adanya ketidakadilan dalam putusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa *framing* yang dibangun oleh Kompas.com lebih banyak mengedepankan perspektif sosial dan kritik terhadap sistem hukum yang ada. MediaIndonesia.com mengarah pada *framing* yang lebih fokus pada keberhasilan proses hukum, dengan penekanan pada keputusan banding yang memperberat hukuman Harvey menjadi 20 tahun penjara. Media ini memberikan gambaran bahwa meskipun pada tahap pertama vonisnya dirasa terlalu ringan, langkah hukum yang diambil di tingkat banding merupakan pembenaran atas ketidakpuasan masyarakat. Dengan membingkai berita ini, MediaIndonesia.com mengedepankan sistem hukum yang dianggap responsif dan lebih tegas dalam menangani kasus korupsi besar.

Dapat disimpulkan hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan gaya penulisan antara Kompas.com dan MediaIndonesia.com dalam membingkai pemberitaan mengenai sidang vonis kasus korupsi Harvey Moeis. Kompas.com lebih menekankan pada ketidakpuasan publik terhadap keputusan hakim yang dianggap tidak adil, dengan fokus pada fakta bahwa vonis yang dijatuhkan jauh lebih ringan dibandingkan dengan kerugian negara yang besar. *Framing* yang dibangun cenderung mengkritik sistem hukum yang ada dan lebih menyoroti

perspektif sosial. Pemberitaan mengenai sidang vonis kasus korupsi Harvey Moeis di Kompas.com lebih banyak menyoroti aspek hukum dan proses persidangan, dengan fokus pada jalannya persidangan dan perkembangan keputusan hukum yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis. Pemberitaan ini memberikan gambaran mengenai proses hukum yang lebih mendalam, serta dampaknya terhadap sistem peradilan Indonesia. Artikel-artikel ini menyampaikan fakta-fakta dari sisi legalitas, dan lebih netral dalam penyampaian. Di sisi lain, MediaIndonesia.com lebih fokus pada keberhasilan proses hukum, khususnya pada keputusan banding yang memperberat vonis menjadi 20 tahun penjara. Media ini membingkai pemberitaan untuk menunjukkan bahwa meskipun vonis awal dirasa terlalu ringan, langkah hukum yang diambil di tingkat banding merupakan respons positif terhadap ketidakpuasan publik, menggambarkan sistem hukum yang lebih tegas dan responsif dalam menangani kasus korupsi besar. Sementara itu, pemberitaan di MediaIndonesia.com cenderung lebih fokus pada dampak sosial dan reaksi publik terhadap vonis yang dijatuhkan.

Media ini lebih menekankan pada bagaimana keputusan pengadilan, meskipun pada tahap pertama dinilai terlalu ringan, berhasil memperberat hukuman melalui proses banding, yang disorot sebagai langkah positif. MediaIndonesia.com menampilkan narasi yang lebih mengarah pada pemulihan keadilan sosial melalui langkah hukum yang lebih tegas, dan bagaimana publik merespons keputusan tersebut. Dengan demikian, perbedaan jelas antara kedua media ini terletak pada penekanan mereka: Kompas.com lebih menyoroti sisi legal dan proses peradilan, sedangkan MediaIndonesia.com lebih menekankan pada aspek sosial dan reaksi publik terhadap keputusan vonis.

Tabel 4.21. Perbandingan Pembingkai Berita Sidang Vonis Kasus Korupsi Harvey Moeis di Media Kompas.com dan MediaIndonesia.com

Perangkat <i>Framing</i>	Kompas.com	MediaIndonesia.com
Sintaksis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menekankan pada aspek legal dengan fokus pada proses hukum yang dijalani dan vonis yang dianggap ringan. 2. <i>Headline</i> cenderung fokus pada legalitas dan fakta peristiwa 3. <i>Lead</i> memberikan gambaran umum dari sisi hukum dan perkembangan persidangan. 4. Artikel disusun dengan bahasa objektif dan formal, berfokus pada kronologi peristiwa hukum yang terjadi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menekankan pada proses hukum berkelanjutan, terutama keputusan banding yang memperberat vonis menjadi 20 tahun. 2. <i>Headline</i> cenderung menyoroti kritik dan ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan hukum yang dianggap tidak adil 3. <i>Lead</i> menekankan pada reaksi publik dan ketidakpuasan terhadap keputusan pengadilan
Skrip	Skrip lebih berfokus pada urutan legal dari peristiwa, mengikuti proses hukum yang ada	Skripsi lebih menekankan pada reaksi sosial, dengan fokus pada protes publik dan kritik terhadap hukuman yang ringan
Tematik	Mengangkat keadilan hukum, penegakan hukum yang kuat, dan transparansi pengadilan	Lebih mengarah pada kritik terhadap sistem hukum dan perbedaan sosial yang muncul akibat vonis ringan
Retoris	Gambar yang biasa digunakan adalah foto mengenai proses hukum, seperti gambaran sidang, foto terdakwa, dan suasana pengadilan.	Gambar yang digunakan lebih menunjukkan protes sosial seperti gambar karikatur, namun ada juga yang menggunakan foto di dalam ruangan sidang atau sosok Harvey Moeis sedang menggunakan rompi. Media ini menggunakan gambar untuk mempertegas kritik terhadap keadilan dan menambah emosi pembaca terkait keputusan yang dianggap tidak memadai

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kedua media, Kompas.com dan MediaIndonesia.com, menggunakan perangkat *framing* yang berbeda dalam membingkai pemberitaan mengenai sidang vonis kasus korupsi Harvey Moeis. Kompas.com lebih menekankan pada aspek legal dan kritik terhadap keputusan hakim yang dianggap tidak adil, dengan fokus pada proses hukum yang dijalani dan ketidakadilan sosial yang timbul akibat vonis yang terlalu ringan. Sementara itu, MediaIndonesia.com lebih fokus pada proses hukum berkelanjutan. khususnya keputusan banding yang memperberat hukuman menjadi 20 tahun penjara, menggambarkan sistem hukum yang dianggap lebih tegas dan responsif terhadap ketidakpuasan publik. *Framing* yang digunakan oleh Kompas.com menonjolkan ketidakpuasan dan ketimpangan dalam sistem hukum.

Sedangkan MediaIndonesia.com lebih menekankan pada keberhasilan sistem hukum dalam mengoreksi keputusan yang dianggap tidak adil melalui jalur banding. Headline, Lead, dan sintaksisnya lebih menggunakan bahasa formal dan netral, dengan tujuan untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai jalannya persidangan. Sebaliknya, MediaIndonesia.com lebih menonjolkan kritik sosial dan reaksi negatif publik terhadap vonis yang dijatuhkan. Mereka menggambarkan bahwa masyarakat merasa kecewa dengan keputusan pengadilan yang dianggap terlalu ringan mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi tersebut. Dalam pemberitaan mereka, ada lebih banyak bahasa yang provokatif dan emosional yang bertujuan menggugah perasaan publik dan mengkritik sistem hukum yang dianggap tidak adil. Media ini juga menekankan aspek sosial dari kasus ini, dengan membahas dampak keputusan tersebut pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

- Selain itu, dari segi struktur skrip, Kompas.com mengikuti alur yang sangat logis dan kronologis, menggambarkan perjalanan hukum dengan jelas tanpa banyak mengalihkan fokus ke hal-hal lain. Di sisi lain, MediaIndonesia.com lebih menekankan pada reaksi masyarakat dan kritik terhadap keputusan hukum, menjadikan ketidakadilan sosial sebagai tema utama dalam pemberitaan mereka.

Dalam struktur tematik, Kompas.com lebih menonjolkan keadilan hukum dan transparansi proses peradilan, sedangkan MediaIndonesia.com berfokus pada kritik terhadap sistem hukum yang dianggap tidak mencerminkan prinsip keadilan yang sebenarnya. Media ini menekankan bahwa keputusan yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerugian negara yang sangat besar akibat tindakan korupsi. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Kompas.com berusaha untuk memberikan informasi yang objektif dan faktual mengenai kasus tersebut, sementara MediaIndonesia.com lebih banyak menonjolkan kritik tajam terhadap kebijakan dan reaksi publik terhadap keputusan pengadilan. Kedua media tersebut menggunakan bahasa dan *framing* yang berbeda, dengan Kompas.com yang lebih formal dan MediaIndonesia.com yang lebih mengarah pada kritik sosial.

MediaIndonesia.com lebih sering menggunakan gambar yang menampilkan reaksi sosial, seperti demonstrasi atau aksi massa, untuk menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap vonis yang dijatuhkan. Gambar-gambar ini

menambah dimensi emosional dan memperkuat kritik sosial terhadap ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, penggunaan gambar kedua media, kompas.com lebih mengedepankan formalitas dan objektivitas menggambarkan proses hukum, sementara MediaIndonesia.com lebih menyoroti kritik terhadap sistem hukum melalui gambar yang menggambarkan ketidakpuasan sosial.



